



Katalog BPS : 7203002

Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi

Financial Statistics of Province Governance

2012-2015



BADAN PUSAT STATISTIK

Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi

Financial Statistics of Province Governance

2012-2015



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAHAN PROVINSI 2012-2015

Financial Statistics of Province Governance 2012-2015

ISSN : 0126-7906

No. Publikasi / Publication Number : 06310.1507

Katalog BPS / BPS Catalogue : 7203002

Ukuran Buku / Book Size : 29,7 cm x 21 cm

Jumlah Halaman / Number of Pages : vi + 149 halaman/pages

Naskah / Manuscript :

Subdirektorat Statistik Keuangan

Subdirectorate of Financial Statistics

Gambar Kulit / Cover Design :

Sub Direktorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Sub Directorate of Statistical Compilation and Publication

Diterbitkan oleh / Published by :

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

BPS - Statistics Indonesia

Dicetak oleh / Printed by :

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi merupakan publikasi tahunan yang diolah dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari kantor Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia yang diperoleh melalui Survei Keuangan Pemerintah Daerah.

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) Pemerintah Provinsi, untuk periode tahun 2012-2014. Selain data realisasi APBD, publikasi ini memuat pula data tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga publikasi ini dapat disajikan. Kritik dan saran yang membangun dari pengguna data sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Jakarta, Desember 2015
Kepala Badan Pusat Statistik,



Dr. Suryamin, M.Sc.

INTRODUCTION

Provincial Government Financial Statistics is an annual publication that compiled and published by BPS-Statistic Indonesia. The financial data are obtained from the office of the provincial government through the Financial Survey conducted throughout Indonesia.

The data and information presented in this publication contains data on the realization of Revenue and Expenditure (Budget realization) of the provincial government, for the years of 2012-2014. In addition, this publication also contains data on State (Budget) Revenue and Expenditure in 2015.

We are grateful and thanks to all those who have given their support which make this publication be realized. Constructive suggestions from the users are expected for further improvement for the next issues.

Jakarta, December 2015

BPS-STATISTICS INDONESIA



Dr. Suryamin, M.Sc.
Chief Statistician

DAFTAR ISI/CONTENTS

	<u>HALAMAN</u>
	<u>PAGE</u>
Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	iii
Daftar Isi/ <i>Contents</i>	v
I. Penjelasan Umum/ <i>General Explanation</i>	1
II. Uraian Ringkas/ <i>Brief Description</i>	19

TABEL

TABLE

1. Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Receipt and Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2012-2015</i>	37
2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan/ <i>Actual Receipt of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Receipt 2012-2015</i>	43
3A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Revenue of Provincial Government Throughout Indonesia 2012-2015</i>	81
3B. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Financing Receipt of Provincial Government Throughout Indonesia 2012-2015</i>	93
4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran/ <i>Actual Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure 2012-2015</i>	97

DAFTAR ISI/CONTENTS

<u>TABEL</u>		<u>HALAMAN</u>
<i>TABLE</i>		<i>PAGE</i>
5A. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Indirect Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2012-2015.....</i>		135
5B. Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Direct Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2012-2015.....</i>		144
5C. Realisasi Belanja Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Financing Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2012-2015</i>		148

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi secara umum memuat data tentang Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia. Periode yang dicakup adalah empat tahun anggaran, yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015.

Beberapa indikator/informasi penting yang dimuat dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi ini, antara lain:

- a. Informasi tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi.
- b. Informasi tentang potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing provinsi.
- c. Informasi untuk menentukan jenis dan besaran bantuan bagi masing-masing provinsi, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai potensi dan kemampuan dari

I. GENERAL EXPLANATION

I.1. Preliminary

Provincial Government Finance Statistics publication covers data on Receipt and Expenditure of provincial governments all around Indonesia. The time period is for the four fiscal years, i.e. from 2012 to 2015.

Some indicators/important information covered in the publication of Provincial Government Finance Statistics, among others are:

- a. Information on actual revenue and expenditure of Provincial Government.*
- b. Information on the potential and the contribution of fund sources in each province.*
- c. Information to determine the type and amount of grant/relief fund for each province, both the Special Allocation Fund (DAK) and the General Allocation Fund (DAU).*

In other words, the Provincial Government Finance Statistics publication can be used as an indicator to assess the potential and capabilities of each provinces, in attempting to

masing-masing provinsi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

I.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kantor Gubernur masing-masing provinsi yang dikumpulkan melalui survei Keuangan Daerah dengan menggunakan Daftar K-1 dan APBD-1.

I.3. Konsep dan Definisi

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi adalah realisasi/perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain - lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

improve the welfare of local communities in its region.

I.2. Scope and Data Collection Method

Provincial Government Finance Statistics data is obtained from Regional Finance and Asset Management Agency of the Governor office all over Indonesia which is collected through Financial Survey by using the questioner K-1 and APBD-1.

I.3. Concept and Definition

Actual Receipt and Expenditure of Provincial Government is the realization/provincial budget calculations for every fiscal year.

Revenue

Revenue consists of:

- a. Original Local Government Revenue*
- b. Balanced Budget*
- c. Other Legal Revenue*

Original Local Government Revenue is revenue that withheld based on local regulations in accordance with the

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta,

legislation, for the purposes of financing their activities. PAD consists of local taxes, retributions, income of regional government corporate and management of separated regional government wealth and other local government revenue.

Local Taxes is revenue that levied based on the local laws and regulations. Local taxes can be divided into two categories: 1) local tax that set up by local rule, and 2) state tax that are managed and used by the local government. Local tax revenue consists of motor vehicle tax, title transfer tax, motor vehicle fuel tax, and others.

Retributions is a levy taken in accordance with any services or facilities provided by the local government directly to taxpayers. Retributions include health care, testing of motor vehicles, the replacement cost of printing maps,

pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek, dan lain-lain.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan / atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

fishing vessel testing, the use of regional assets, wholesale or retail markets, the sale of local production, the land use designation permits, licenses route of public transport and other.

Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Regional Government Wealth is revenue in the form of income of regional government corporate and separated regional government wealth which consists of the Regional Water Company's earnings, the profit share of bank, the profit share of non-banking financial institutions, the other locally-owned company's profits, and the return on equity/investment to a third party.

Other Original Local Government Revenue is the revenue of local government that includes the sale of regional assets that can not be separated, giro services, interest income and commissions, discounts or other forms as a result of the sale and / or supply of goods and/or services by region.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksplorasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup **kesenjangan fiskal**

Balanced Budget is the fund coming from the state budget that allocated to regions to fund their needs in the context of decentralization. Balanced budget consists of Tax share/Non Tax share, General Allocation Fund (DAU), and the Special Allocation Fund (DAK).

Tax share consists of land and building tax (PBB), customs of land and buildings right (BPHTB), income tax of Article 25 and Article 29, and Article 21 of the Personal Income Tax, and others.

Non-Tax Share consist of dues of utilization right of forest (HPH), provision of forest resources (PSDH), land titling state, landrent, dues of exploration/exploitation/royalties, levies on fishery enterprise and result of fishery, mining oil/gas nature result, and others.

General Allocation Fund (DAU) is the transfer of fund from the central government to local government that is intended to reduce the fiscal gap

(*fiscal gap*) dan **pemerataan** kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu **kemandirian** pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri pendapatan hibah; dana darurat

across regions and the equalization of fiscal capacity in order to support the independence of local governments in carrying out its functions and duties to serve the public.

Special allocation fund (DAK) is a fund set up to the region to meet specific need. There are three criterias for special need as set out in the legislation, namely:

- *The need can not be calculated by using the formula of the general allocation fund*
- *The need is a commitment or a national priority*
- *The need is to finance reforestation and afforestation of the region*

Thus DAK is basically a specific transfer for the purposes that have been outlined.

Other Legal Revenue is other income that coming from the central government and or from the central agencies, as well as from other local government. Other revenue comprises; grants; emergency fund

yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; bantuan dana kontijensi/penyeimbang/penyesuaian dari pemerintah; bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan yang sah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil

which is fund of the state budget allocated to areas get a national disaster, extraordinary experiencing a national disaster, extraordinary events and/or solvency crisis; tax share from provincial and other local governments; contingency funds/balancing/adjustment from government; financial assistance from provincial and other local governments, and other legal income

Local Government Expenditure

Local Government Expenditure

consists of:

- 1. Indirect Expenditure*
- 2. Direct Expenditure*

Indirect Expenditure *is part of personnel expenditure, interest expenditure, subsidies expenditure, grant expenditure, social assistance expenditure, sharing fund expenditure, financial assistance expenditure and unpredicted expenditure. Those items are not directly related to the implementation of programs and activities.*

Indirect Personnel Expenditure *is a compensation in the form of salaries and benefits, and other income provided to civil servants*

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

based on legislation. Include here are representations and benefits for head and the members of parliament, salaries and benefits of regional head and deputy head of the region, as well as other income that stipulated under law budgeted.

***Interest Expenditure** is expenditure used to pay debt interest that calculated based on the principal outstanding under the short term, medium term and long term agreement.*

***Subsidies Expenditure** is expenditure that has been budgeted and used to support the cost of production to the certain company/organisation, so that the selling price of the goods/services produced can be affordable. The intended company/agency must be providing products or services for public/society needs.*

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga / organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah

Grant Expenditure is expenditure that has been setting out to give to other party as a grant, both in form of money, goods and or services. The grant can be given to the central government, other local governments, village government, regional corporate/state/enterprise, agency/institution/organization, or community group/individual.

Social Assistance Expenditure is expenditure that is budgeted to provide assistance to civil society organizations, political parties and others with the aim to improve the welfare of the community.

Social Assistance to Community Organizations is the provision of assistance to community organizations for social purposes. This assistance done selectively and has clarity in its use.

Sharing Fund Expenditure to Provincial/District/City and Village Government is expenditure that has been budgeted as sharing fund which is derived from provincial revenue, and given to district/city, village, or a particular local government revenue

daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari:

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.

that is given to other local governments in accordance with law.

This expenditure consists of:

- *Tax shares expenditure to the provincial government*
- *Local tax shares expenditure to the district / city*
- *Local tax shares expenditure to the village government*
- *Local retribution shares to the district / city*
- *Local retribution shares to village government*

Financial Assistance Expenditure to Provincial/District/City and Village Government is a general or specific assistance from the provincial government to the district / city, village government, or other local governments for the purpose of equalizing and increasing the financial capability. General financial assistance is the assistance from the local government where the use and the management of fund delivered is done by the recipient government.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari:

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya
- Bantuan keuangan kepada partai politik

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait

Specific financial assistance is the assistance where the used and the management of fund is directed by the donor government.

Financial Assistance consists of:

- *Financial assistance to the provincial government*
- *Financial assistance to district / city government*
- *Financial assistance to the village government*
- *Financial assistance to local government/other village government*
- *Financial assistance to Political Party*

Unpredicted Expenditure is expenses used for the activity that is unusual or unexpected such as natural disaster and social disaster, including refund of the excess revenue from previous years.

Direct Expenditure is a part of personnel expenditure, goods and services expenditure, and capital expenditure, that are budgeted directly related to the implementation of programs and activities

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan, pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

that are budgeted directly related to the implementation of programs and activities.

Direct Personnel Expenditure is expenses used for honorarium/ wages, overtime and other expenses to increase employee motivation and quality in implementing government programs and activities.

Goods and Services Expenditure is expenses used for purchasing/procurement of goods that worth less than a year (non durable goods), and or the use of services in carrying out the programs and activities of the local government.

Purchasing/procurement of the goods and services among other are for non durable goods, materials, office services, insurance premiums, vehicle maintenance, printing and copying, building rent, vehicle rent, heavy equipment rent, leasing of office supplies and equipment, food and beverages, uniforms, wearpack, official journey, travel duty, returning officers and other goods and services

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Capital Expenditure is expenses used for purchasing/procurement of a tangible fixed asset that worth more than a year (durable goods).

The establishment of these assets include provision of land, heavy equipment, transportation equipment, workshop tools, agricultural tools, equipment and office supplies, computers, mebelair, kitchen appliances, room interior design, studio equipment, communication tools, measuring tools, medical equipment, laboratory equipment, construction of roads, bridges, water installations, street lighting, parking area and urban forests, electric and telephone installations, buildings, books/literature, arts, animal procurement/ livestock and plants, as well as weapons/ security.

Local Government Financing is any revenue that needs to be paid back and /or expenditure that will be readmitted, both in the current fiscal year and in the next fiscal years. Net financing is the difference between financing receipt and financing expenditure.

Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan daerah ;
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
 - b. Transfer dari dana cadangan
 - c. Penerimaan pinjaman dan obligasi
 - d. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
2. Pengeluaran pembiayaan daerah ;
 - a. Transfer ke dana cadangan
 - b. Penyertaan modal
 - c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
 - d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.

Total net financing should be able to cover the budget deficit, on the other way around budget surplus would be allocated to finance expenses, whether for payment of principal, as well as for investment or the creation of a reserved fund.

Local government financing consists of:

- 1. Local government financing receipt;*
 - a. Last fiscal year budget surplus*
 - b. Transfer from reserved fund*
 - c. Receipt from loans and bonds*
 - d. Income of separated selling assets*
- 2. Local government financing expenditure;*
 - a. Transfer to reserved fund*
 - b. Equity*
 - c. Principal payment of debt*
 - d. Current fiscal year budget surplus*

Last Fiscal Year Budget Surplus is last fiscal year surplus/deficit plus the financing receipt less financing expenditure.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat

Reserved Fund Disbursement is revenue derived from the disbursement of the reserve fund, i.e from reserved fund account to general cash account along the current fiscal year.

Income of Separated Property Sales Results is the selling of government assets through third party, or the income of local government divestment of equity.

Local Government Revenue from Loan is revenue from the loans, including the issuance of local bonds that will be issued in the current fiscal year.

Revenue from Lending is all revenue obtained from lending to the central government and/or to other local government.

Establishment of Reserved Fund is expenditure to establish a reserved fund to finance activities that the provision of funds can not be

Sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran

fully implemented in one fiscal year.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Equity (Investment) of Local Government is government expenses that allocated to equity/investment, both in the short and long term, permanent or non-permanent. This investment can be in the form of deposit, the purchase of government securities (GS), Bank Indonesia Certificates (SBI), Treasury Bills (SPN), shares, investment in state/public enterprises, purchase of bonds and long-term debt.

Payment of Principal Debt is the payment of the principal debt which is calculated based on the short, medium and long term agreement.

Regional Lending is government spending in the form of lending to the central government, local government, and/or third parties.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

Current Fiscal Year Budget Surplus
is a surplus/deficit added by the financing receipt subtracted by financing expenditure.

II. URAIAN RINGKAS

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan yang handal dan profesional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

II. BRIEF DESCRIPTION

Regional development is an effort to create the government which has reliable and professional capabilities. As an integral part of national development which aims to improve the living standar and welfare of the people, development in the local government, both at the provincial level and district/city level must be carried out effectively and efficiently. Thereby, the regional independency and equality of development will be achieved.

The issue of financial independence becomes very important, particularly the ones that relate to regional financial contribution to regional economic growth. The contribution of local government expenditure on regional economic growth is an opportunity that should be utilized optimally to stimulate the local economy.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut.

Dealing with the matter, the provincial government formulates the Receipt and Expenditure Budget (APBD) Province as a form of regional development planning. In the APBD, the details of programs that will be implemented along with funding sources were recorded. Budgeting should be arranged in such a way, so it can improve the performance of regional government and public services oriented.

The sources of funds for financing the regional development should be come from the region's own financial ability, with the aim to accelerate the government independency. In other words the local government must be spurred to increase the capability in financing the organization and public services by utilized their own potensial fund.

II.1. Pendapatan Daerah

Tabel A menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan, dengan total pendapatan 186,01 triliun rupiah pada tahun 2012; 205,78 triliun rupiah pada tahun 2013; dan menjadi 233,28 triliun rupiah pada tahun 2014 atau mengalami pertumbuhan sebesar 10,63 persen pada tahun 2013 dan 13,36 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pendapatan pemerintah provinsi ditargetkan naik 13,19 persen menjadi 264,06 triliun rupiah. Peningkatan target pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan asli daerah terutama komponen hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta komponen dana perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan pemerintah provinsi dalam meningkatkan penerimaan BPD, perusahaan daerah, dividen, BPR-BKK dan penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Hasil yang signifikan terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

II.1. Revenue

Table A shows that the realization of the Provincial government's total revenue in Indonesia during 2012-2014 continue to increase, with the total revenue of 186.01 trillion rupiahs in 2012, 205.78 trillion rupiahs in 2013, and 233.28 trillion rupiahs in 2014, or increased by 10.63 percent; and 13.36 percent respectively. In 2015, the revenue of provincial government is targeted to increase by 13.19 percent to 264.06 trillion rupiahs. The increasing was mostly caused by the increasing of original government revenue, especially from income of regional government corporate and management of separated regional government wealth component and the increasing of balanced budget, especially from Special Allocation Fund (DAK). This condition is the result of the efforts that have been made to increase receipt of BPD, regional government corporate, dividend, BPR-BKK and equity/investment to a third party. The significant result of it was in DKI Jakarta.

Tabel A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (Miliar Rupiah), 2012-2015
Actual Revenue of Provincial Goverment Throughout Indonesia by Kind of Revenue (Billion Rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pendapatan	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	86 542	101 596	121 451	136 356
a.	Pajak Daerah	72 997	86 980	103 088	120 326
b.	Retribusi Daerah	2 646	1 268	1 705	1 732
c.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 642	2 838	2 972	3 485
d.	Lain-lain PAD yang Sah	8 257	10 511	13 685	10 813
2.	Dana Perimbangan	61 998	64 834	68 883	73 294
a.	Bagi Hasil Pajak	20 404	17 781	17 482	21 500
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	12 880	14 300	15 406	13 426
c.	Dana Alokasi Umum	27 382	30 978	34 122	35 972
d.	Dana Alokasi Khusus	1 333	1 775	1 873	2 396
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	37 470	39 350	42 944	54 406
JUMLAH/TOTAL		186 010	205 780	233 277	264 057

*) Data APBD

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

Selama periode tahun 2012-2014, PAD terus mengalami kenaikan, yaitu dari 86,54 triliun rupiah pada tahun 2012 menjadi 101,60 triliun rupiah pada tahun 2013 dan 121,45 triliun rupiah pada tahun 2014. Pajak daerah merupakan komponen yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap PAD.

The Original Local Government Revenue (PAD) is one of the important sources of income for the region. The local government that has capability to increase its PAD significantly, meaning that this region has been able to utilized the existing potential optimally.

During the period 2012-2014, the development of PAD was steady increasing, i.e, from 86.54 trillion rupiah in 2012 to 101.60 trillion rupiahs in 2013 and 121.45 trillion rupiahs in 2014. This increasing was supported by local tax revenue as the biggest contribution to PAD in each years.

Komponen lain-lain PAD yang sah berada pada peringkat kedua, kemudian diikuti oleh pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah.

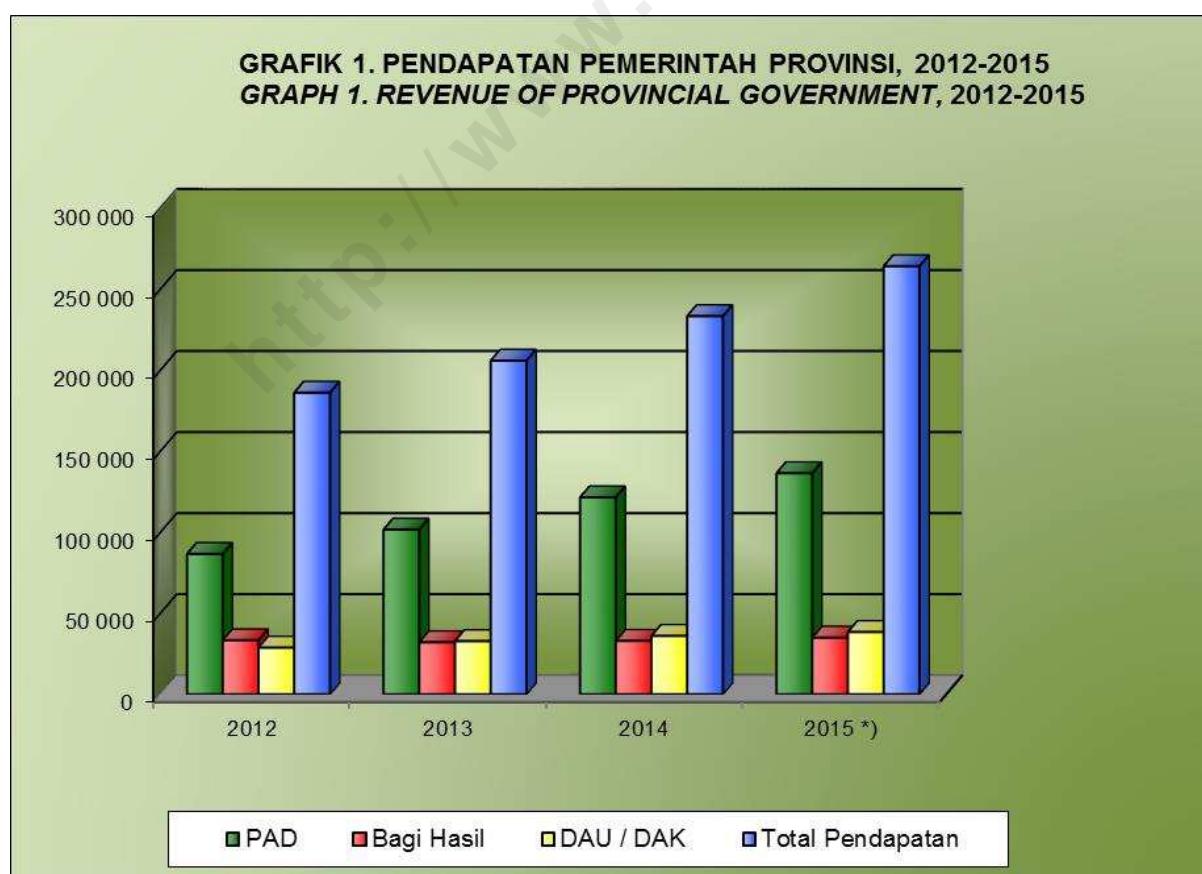
Pada tahun 2015, PAD ditargetkan naik menjadi 136,36 triliun rupiah, sedangkan penerimaan pajak daerah ditargetkan meningkat sebesar 16,72 persen.

PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat,

The second biggest contribution was from others legal PAD, followed by management of separated local government wealth, and retributions.

In 2015, PAD was targeted to 136.36 trillion rupiahs, while tax revenue was targeted to increase by 16.72 percent.

PAD is an important component in measuring the financial independence of a local government. The greater the role of PAD in the budget, the more independence is the local



dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Jika tingkat kemandirian suatu daerah “**rendah sekali**”, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “**rendah**”, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “**sedang**”, menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “**tinggi**”, bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

*government. If the level of independence of a region is “**very low**”, it can be said that the central government has the dominant role than the local government itself. Meanwhile, if a region has a degree of independence “**low**”, it means that the central government intervention has been decreased, because the region is considered to be a little more able to implement regional autonomy. Then, for the government with “**medium**” category, it means that the government region has been able to implement regional autonomy, while the category of “**high**”, it could be mean that the local government has been able and independent in carrying out the affairs of local autonomy.*

Tabel B. Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Tingkat Kemandirian 2012-2015
The Distribution of Province in Indonesia by Independence Rate Categories 2012-2015

Kategori Kemandirian (1)	2012 (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 *) (5)
Rendah Sekali (0-25 %)	9	8	8	8
Rendah (>25-50 %)	16	15	15	16
Sedang (>50-75 %)	8	10	11	10
Tinggi (>75%)	0	0	0	0
Jumlah	33	33	34	34

*) Data APBD

Kontribusi PAD terhadap pendapatan pemerintah provinsi pada tahun 2012 hingga 2014 masih berkisar antara 40 hingga 50 persen, sehingga secara rata-rata tingkat kemandirian provinsi di Indonesia pada tahun-tahun tersebut masih dikategorikan rendah. Pada tahun 2012 tingkat kemandirian provinsi di Indonesia sebesar 46,53 persen dimana masih masuk dalam kategori rendah. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa secara umum pemerintah provinsi belum dapat dikatakan mandiri.

Pada tahun 2013, kontribusi PAD mengalami kenaikan menjadi 49,37 persen, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 52,06 persen pada tahun 2014. Pemerintah provinsi sangat berhati-hati dalam mentargetkan anggaran PAD-nya pada tahun 2015, karena khawatir tidak dapat memenuhi target, sehingga porsi PAD terhadap total pendapatannya menurun menjadi 51,64 persen.

Selanjutnya, pada tabel C dapat dilihat bahwa kontribusi pendapatan daerah yang berasal dari PAD tetap memberikan peranan terbesar. Pajak daerah merupakan komponen PAD yang memiliki kontribusi paling besar

PAD contribution to total revenue of provincial goverment in 2012 to 2014 was in the range 40 to 50 percent. Thus, on average, the independence level of provinces in Indonesia categorized as low level. In 2012, the independence level of provinces in Indonesia was 46.53 percent which was still in low level. It indicated that, in general, the provincial goverment still can not be said to be indepedent.

In 2013, PAD contribution increased to 49.37 percent; and become 52.06 percent in 2014. The provincial goverment was very careful in targeting the PAD in 2015, for the reason of that they could not meet the target. Consequently, PAD contribution to total revenue decreased to 51.64 percent in 2015.

Moreover, from table C it can be seen that the PAD contribution to total revenue had dominant effect. Local taxes were component of PAD which had the biggest contribution,

dengan besaran yang terus meningkat pada tiap tahunnya, yaitu sebesar 39,24 persen pada tahun 2012; 42,27 persen pada tahun 2013; 44,19 persen pada tahun 2014; dan ditargetkan sebesar 45,57 persen pada tahun 2015.

with the value is always increased in each years. The values were 39.24 percent in 2012, 42.27 percent in 2013, and 44.19 percent in 2014. The local taxes contribution to PAD also has been targeted to 45.57 percent in 2015.

Tabel C. Kontribusi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (persen), 2012-2015
Revenue Contribution of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Revenue (percent), 2012-2015

No.	Jenis Pendapatan	2012	2013	2014	2015 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pendapatan Asli Daerah		46,53	49,37	52,06	51,64
a. Pajak Daerah		39,24	42,27	44,19	45,57
b. Retribusi Daerah		1,42	0,62	0,73	0,66
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1,42	1,38	1,27	1,32
d. Lain-lain PAD yang Sah		4,44	5,11	5,87	4,09
2. Dana Perimbangan		33,33	31,51	29,53	27,76
a. Bagi Hasil Pajak		10,97	8,64	7,49	8,14
b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		6,92	6,95	6,60	5,08
c. Dana Alokasi Umum		14,72	15,05	14,63	13,62
d. Dana Alokasi Khusus		0,72	0,86	0,80	0,91
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah		20,14	19,12	18,41	20,60
JUMLAH/ TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Data APBD

Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan memiliki kecenderungan menurun dengan kontribusi sebesar 33,33 persen; 31,51 persen; dan 29,53 persen terhadap total pendapatan pada tahun 2012-2014. Pada tahun 2015 dana perimbangan dianggarkan memiliki kontribusi sebesar 27,76 persen.

Revenue derived from the balanced budget has tendency to decrease with a contribution of 33.33 percent, 31.51 percent, and 29.53 percent during the period of 2012-2014. In 2015 the balanced budget contribution has been determined as much as 27.76 percent.

Penerimaan dari dana perimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu i) dana bagi hasil berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam, ii) dana alokasi yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Kontribusi terbesar pada dana perimbangan ini berasal dari DAU, diikuti dengan bagi hasil pajak. Disisi lain jika dilihat dari DAU dan DAK yang diberikan pemerintah pusat, menandakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat kurang dari 20 persen.

Sumber penerimaan pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terkecil adalah lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2012 kontribusi komponen ini hanya sebesar 20,14 persen sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 19,12 persen dan 18,41 persen. Dan di tahun 2015 lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan mempunyai kontribusi sebesar 20,60 persen. Peningkatan kontribusi disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan pada tiap-tiap provinsi.

The balanced budget consists of two parts, namely, i) the revenue from tax shares and natural resource shares, ii) the allocation of funds which include General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) that came from central government fund transfers. The highest contribution of the balanced budget was from General Allocation Fund (DAU), followed by tax shares. Viewed from the DAU and DAK that given by central government, it showed that dependency level of local government to central government is less than 20 percent.

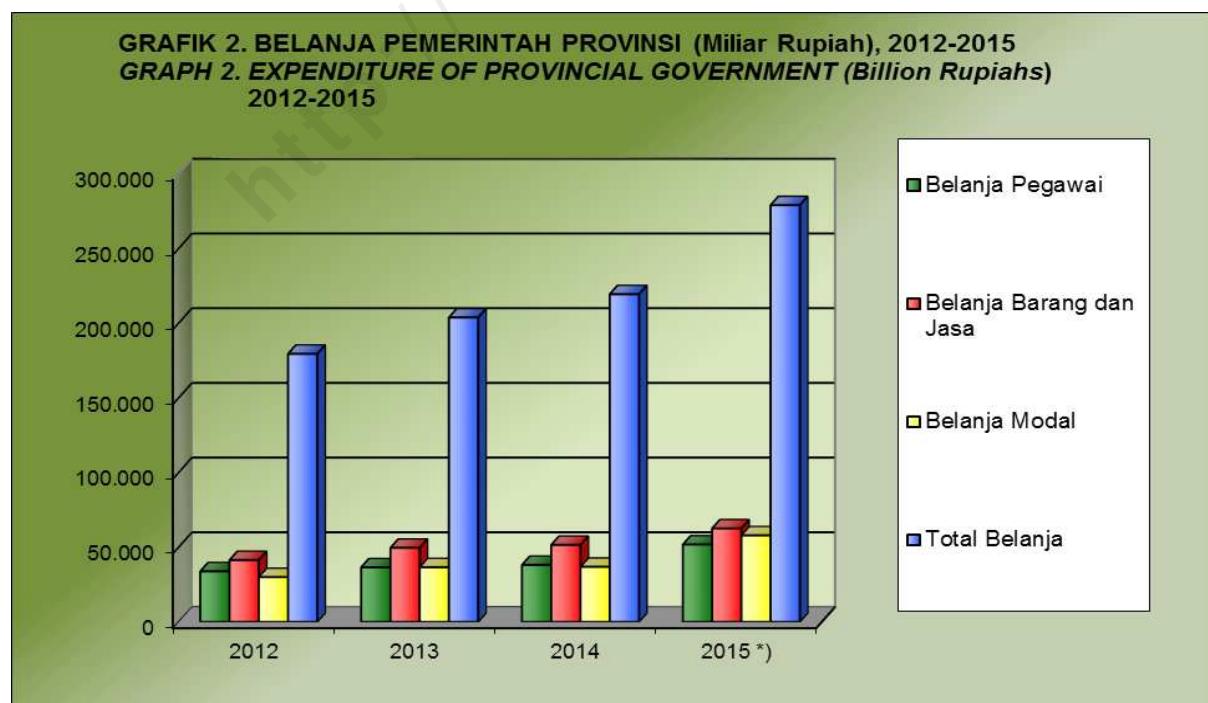
Then, the other component of local government revenue is others legal revenue that has the smallest contribution to total revenue. In 2012, its contribution amounted to 20.14 percent, while in 2013 and 2014 it was 19.12 percent and 18.41 percent respectively. Similarly, for 2015, others legal revenue contribution was expected to increase to 20.60 percent. This increasing is due to the increased of funding adjustments received by each province.

II.3. Belanja Daerah

Secara umum realisasi belanja daerah pada kurun waktu 2012-2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 179,45 triliun rupiah pada tahun 2012 menjadi 203,75 triliun rupiah tahun 2013 dan 219,33 triliun rupiah pada tahun 2014. Pada tahun 2015 belanja daerah dianggarkan sebesar 278,97 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 27,19 persen dibanding tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun pada bagian belanja langsung.

II.3. Local Government Expenditure

In general, local government expenditure during 2012-2014 increased every years, that was, from 179.45 trillion rupiahs in 2012 to 203.75 trillion rupiahs in 2013 and 219.33 trillion rupiahs in 2014. Whereas, in 2015 local government expenditure was targeted to 278.97 trillion rupiahs or increased by 27.19 percent compared to 2014. This increasing was due to the increase in almost all types of expenditure, both indirect expenditure and direct expenditure.



Dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 2012-2014 secara umum terjadi surplus. Namun untuk tahun 2015, diperkirakan akan terjadi defisit anggaran dimana pendapatan bernilai 264,06 triliun rupiah (Tabel A) sedangkan belanja daerah bernilai 278,97 triliun rupiah (Tabel D). Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan komponen pembiayaan untuk menutup kekurangannya. Secara rinci realisasi belanja pemerintah disajikan pada tabel D.

In terms of the realization of revenue and expenditure, in general, during 2012-2014, the provincial government budget experienced a surplus. Whereas, in fiscal year 2015, it was estimated has deficit budget, that reflected in the value of revenue that was 264.06 trillion rupiahs (Table A) and the expenditure was 278.97 trillion rupiahs (Table D). The deficit can be covered by the local government financing receipt. In details, the actual expenditure of local government can be seen in Table D.

Tabel D. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (Miliar Rupiah), 2012-2015
Actual Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure (Billion Rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Belanja	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		101 469	109 748	123 758	151 218
1. Belanja Pegawai		27 209	28 593	30 925	44 551
2. Belanja Bunga		26	36	45	113
3. Belanja Subsidi		27	26	32	981
4. Belanja Hibah		33 609	35 964	33 018	37 840
5. Belanja Bantuan Sosial		1 402	2 267	1 641	3 404
6. Belanja Bagi Hasil		20 956	22 612	31 843	36 877
7. Belanja Bantuan Keuangan		18 004	20 048	26 086	26 772
8. Pengeluaran Tidak Terduga		236	202	168	681
B. BELANJA LANGSUNG		77 977	94 001	95 577	127 752
1. Belanja Pegawai		6 637	7 874	7 216	7 242
2. Belanja Barang dan Jasa		41 370	49 557	51 521	62 566
3. Belanja Modal		29 970	36 569	36 839	57 944
JUMLAH/TOTAL		179 446	203 749	219 335	278 970

*) Data APBD

Dari struktur belanja secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa komponen belanja didominasi oleh belanja barang dan jasa. Pada tahun 2012-2014, belanja tersebut berturut-turut sebesar 41,37 triliun rupiah, 49,56 triliun rupiah, dan 51,52 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 19,79 persen pada tahun 2013 dan 3,96 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar 62,57 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 21,44 persen dibanding tahun 2014.

Komponen belanja berikutnya yang cukup dominan adalah belanja pegawai, dalam hal ini gabungan dari belanja pegawai langsung dan tidak langsung. Pada tahun 2012, belanja tersebut tercatat sebesar 33,85 triliun rupiah dan pada tahun 2013 sebesar 36,47 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 7,74 persen dari tahun 2012. Sementara itu, pada tahun 2014 realisasi belanja pegawai sebesar 38,14 triliun rupiah atau naik sebesar 4,59 persen dari tahun 2013. Dan di tahun 2015, belanja pegawai dianggarkan mengalami kenaikan sebesar 35,79 persen atau sebesar 51,79 triliun rupiah.

Based on the expenditure structure, it can be seen that the dominant component of the expenditure was goods and services expenditure. During 2012 to 2014, the goods and services expenditure was recorded to 41.37 trillion rupiahs, 49.56 trillion rupiahs, and 51.52 trillion rupiahs or increased by 19.79 percent in 2013 and 3.96 percent in 2014. In 2015, goods and services expenditure has been budgeted to 62.57 trillion rupiahs or increased by 21.44 percent compared to 2014

The next dominant component of expenditure was personnel expenditure, covering both direct and indirect personnel expenditure. In 2012, it recorded at 33.85 trillion rupiahs, and in 2013 it amounted to 36.47 trillion rupiahs or increased by 7.74 persen to that in 2012. Meanwhile, personnel expenditure in 2014 was 38.14 trillion rupiahs or increased by 4.59 persen from one year before. Then, in 2015 it budgeted to 51.79 trillion rupiahs or increased by 35.79 percent.

Tabel E. Kontribusi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (persen), 2012-2015
Contribution of Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure (percent), 2012-2015

No.	Jenis Belanja	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		56,55	53,86	56,42	54,21
1. Belanja Pegawai		15,16	14,03	14,10	15,97
2. Belanja Bunga		0,01	0,02	0,02	0,04
3. Belanja Subsidi		0,02	0,01	0,01	0,35
4. Belanja Hibah		18,73	17,65	15,05	13,56
5. Belanja Bantuan Sosial		0,78	1,11	0,75	1,22
6. Belanja Bagi Hasil		11,68	11,10	14,52	13,22
7. Belanja Bantuan Keuangan		10,03	9,84	11,89	9,60
8. Pengeluaran Tidak Terduga		0,13	0,10	0,08	0,24
B. BELANJA LANGSUNG		43,45	46,14	43,58	45,79
1. Belanja Pegawai		3,70	3,86	3,29	2,60
2. Belanja Barang dan Jasa		23,05	24,32	23,49	22,43
3. Belanja Modal		16,70	17,95	16,80	20,77
JUMLAH/TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel E menunjukkan kontribusi dari struktur belanja secara keseluruhan, dimana pada tahun 2012-2015 belanja tidak langsung memberikan kontribusi yang lebih besar dari belanja langsung. Pada tahun 2012-2014, komponen belanja tidak langsung yang memiliki kontribusi terbesar adalah belanja hibah dengan kontribusi masing-masing sebesar 18,73 persen, 17,65 persen, dan 15,05 persen. Sedangkan untuk tahun 2015 komponen yang dianggarkan paling dominan peranannya dalam belanja

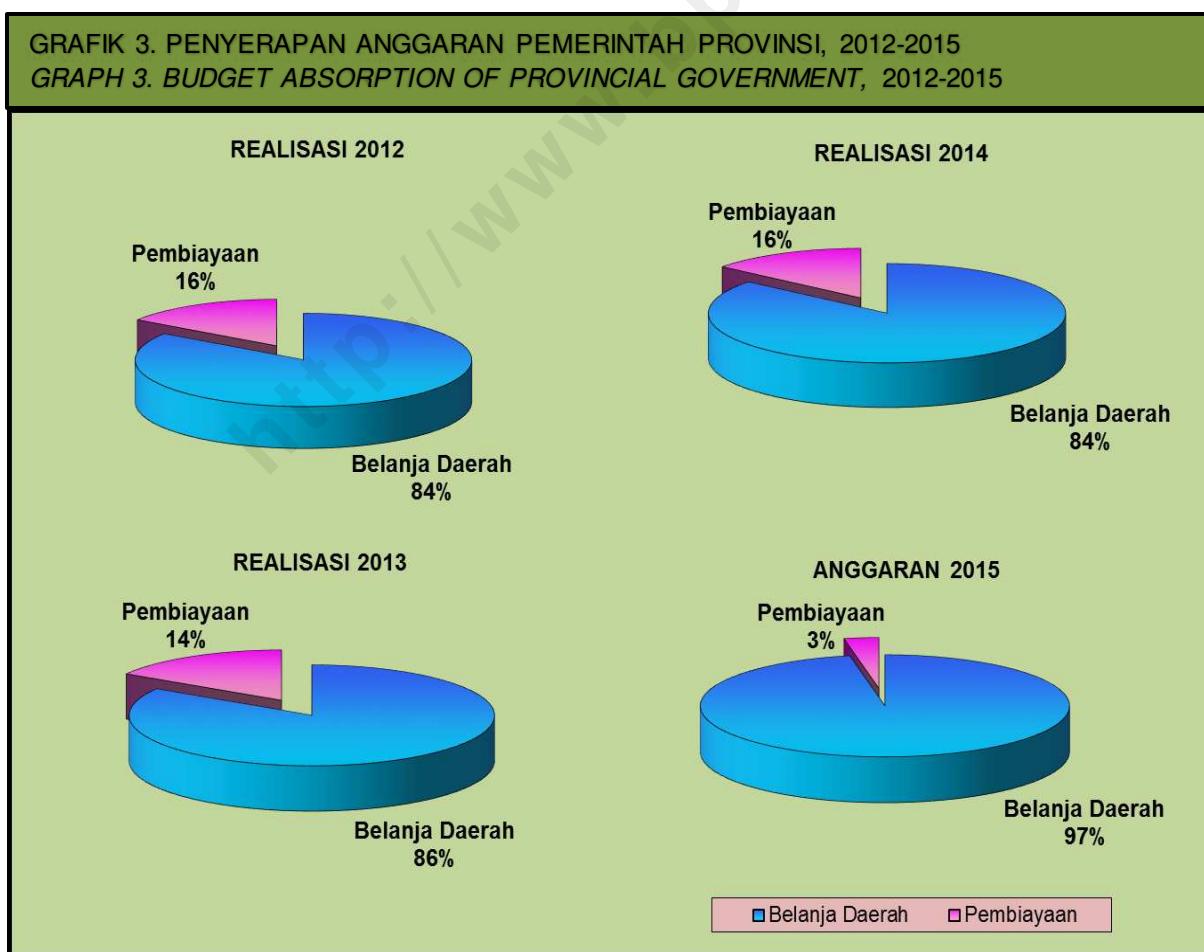
Table E figured out the contribution of each component to total expenditure during 2012-2015, where the value of indirect expenditure was higher than direct expenditure. During 2012 to 2014, grant expenditure was the component with the highest contribution to indirect expenditure, namely 18.73 percent, 17.65 percent, and 15.05 percent, respectively. Meanwhile, in 2015, personnel expenditure was budgeted as the component with the highest contribution

tidak langsung adalah belanja pegawai dengan kontribusi sebesar 15,97 persen.

Sementara itu, untuk belanja langsung, komponen yang mempunyai kontribusi yang besar adalah belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Kontribusi keduanya sebesar 39,76 persen pada tahun 2012, 42,27 persen pada tahun 2013, 40,29 persen pada tahun 2014, dan dianggarkan mempunyai kontribusi sebesar 43,20 persen pada tahun 2015.

to indirect expenditure that was 15.97 percent.

Meanwhile, in terms of direct expenditure structure, the component with highest portion were goods and services expenditure and capital expenditure. The contribution of both expenditures were 39.76 percent in 2012, 42.27 percent in 2013, and 40.29 percent in 2014. It has been targeted to have contribution of 43.20 percent in 2015.



Penyerapan anggaran daerah yang merupakan persentase realisasi belanja terhadap pendapatan daerah pada tahun 2012 mencapai 84,46 persen, naik menjadi 85,85 persen pada tahun 2013 dan turun menjadi 83,81 persen pada tahun 2014. Sedangkan target penyerapan anggaran pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 96,96 persen (grafik 3).

The absorption of local budget, which is represented by the percentage of actual expenditure to total revenue in 2012 was recorded as much as 84.46 percent, then increased to 85.85 percent in 2013. In 2014, the absorption of budget decreased to 83.81 percent. Meanwhile, the target of budget absorption in 2015 was 96.96 percent (graph 3).

TABEL

TABLE 1.

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.a (juta rupiah), 2012

TABLE 1.a *ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA*
(million rupiahs), 2012

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Aceh	9 180 143	1 508 841	10 688 984	8 757 320	1 931 664	10 688 984	
2. Sumatera Utara	7 201 840	720 865	7 922 705	7 633 634	289 071	7 922 705	
3. Sumatera Barat	2 922 582	361 250	3 283 832	2 962 291	321 541	3 283 832	
4. Riau	6 847 315	1 906 680	8 753 995	6 670 764	2 083 231	8 753 995	
5. Jambi	2 654 694	632 401	3 287 095	2 531 598	755 497	3 287 095	
6. Sumatera Selatan	5 223 884	477 176	5 701 060	5 060 923	640 137	5 701 060	
7. Bengkulu	1 562 525	197 340	1 759 865	1 518 453	241 412	1 759 865	
8. Lampung	3 742 004	117 690	3 859 694	3 834 736	24 958	3 859 694	
9. Bangka Belitung	1 384 937	242 124	1 627 061	1 332 039	295 022	1 627 061	
10. Kepulauan Riau	2 473 412	290 738	2 764 150	2 249 826	514 324	2 764 150	
11. DKI Jakarta	35 379 180	6 475 552	41 854 732	31 558 707	10 296 025	41 854 732	
12. Jawa Barat	16 878 129	3 003 186	19 881 315	16 922 477	2 958 838	19 881 315	
13. Jawa Tengah	11 694 480	707 736	12 402 216	11 446 844	955 372	12 402 216	
14. DI Yogyakarta	2 171 734	293 609	2 465 343	2 053 826	411 517	2 465 343	
15. Jawa Timur	15 543 040	1 359 475	16 902 515	15 311 543	1 590 972	16 902 515	
16. Banten	5 413 705	374 845	5 788 550	5 317 736	470 814	5 788 550	
17. Bali	3 633 134	787 312	4 420 446	3 562 733	857 713	4 420 446	
18. Nusa Tenggara Barat	2 242 817	17 714	2 260 531	2 189 182	71 349	2 260 531	
19. Nusa Tenggara Timur	2 241 542	188 711	2 430 253	2 164 356	265 897	2 430 253	
20. Kalimantan Barat	2 932 913	383 302	3 316 215	3 043 957	272 258	3 316 215	
21. Kalimantan Tengah	2 514 031	451 606	2 965 637	2 351 347	614 290	2 965 637	
22. Kalimantan Selatan	4 381 611	933 954	5 315 565	4 004 269	1 311 296	5 315 565	
23. Kalimantan Timur	11 886 471	2 837 724	14 724 195	11 357 198	3 366 997	14 724 195	
24. Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	
25. Sulawesi Utara	1 834 908	189 114	2 024 022	1 771 118	252 904	2 024 022	
26. Sulawesi Tengah	1 962 393	209 217	2 171 610	2 013 022	158 588	2 171 610	
27. Sulawesi Selatan	4 433 963	212 338	4 646 301	4 603 648	42 653	4 646 301	
28. Sulawesi Tenggara	1 811 984	23 591	1 835 575	1 714 896	120 679	1 835 575	
29. Gorontalo	933 170	63 969	997 139	885 021	112 118	997 139	
30. Sulawesi Barat	959 030	19 000	978 030	868 133	109 897	978 030	
31. Maluku	1 436 646	78 104	1 514 750	1 355 988	158 762	1 514 750	
32. Maluku Utara	1 196 746	199 701	1 396 447	1 259 660	136 787	1 396 447	
33. Papua Barat	3 873 388	398 119	4 271 507	3 898 932	372 575	4 271 507	
34. Papua	7 462 045	779 591	8 241 636	7 239 667	1 001 969	8 241 636	
JUMLAH/TOTAL	186 010 396	26 442 575	212 452 971	179 445 844	33 007 127	212 452 971	

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.b (juta rupiah), 2013

TABLE 1.b ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA

(million rupiahs), 2013

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembinaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembinaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Aceh	10 671 827	1 968 699	12 640 526	11 220 428	1 420 098	12 640 526	
2. Sumatera Utara	7 397 986	14 108	7 412 094	7 260 468	151 626	7 412 094	
3. Sumatera Barat	3 147 839	276 751	3 424 590	3 113 313	311 277	3 424 590	
4. Riau	6 994 646	1 978 313	8 972 959	7 525 283	1 447 676	8 972 959	
5. Jambi	2 886 305	690 767	3 577 072	3 010 741	566 331	3 577 072	
6. Sumatera Selatan	5 468 140	521 335	5 989 475	5 678 704	310 771	5 989 475	
7. Bengkulu	1 696 370	241 356	1 937 726	1 727 006	210 720	1 937 726	
8. Lampung	3 901 951	23 711	3 925 662	3 884 536	41 126	3 925 662	
9. Bangka Belitung	1 529 111	285 022	1 814 133	1 609 667	204 466	1 814 133	
10. Kepulauan Riau	2 843 718	514 289	3 358 007	2 715 832	642 175	3 358 007	
11. DKI Jakarta	39 517 544	9 463 721	48 981 265	38 301 502	10 679 763	48 981 265	
12. Jawa Barat	19 237 611	2 934 631	22 172 242	18 396 745	3 775 497	22 172 242	
13. Jawa Tengah	13 343 358	1 306 017	14 649 375	12 724 776	1 924 599	14 649 375	
14. DI Yogyakarta	2 583 057	403 200	2 986 257	2 509 643	476 614	2 986 257	
15. Jawa Timur	17 372 769	1 753 509	19 126 278	16 738 658	2 387 620	19 126 278	
16. Banten	6 230 230	450 814	6 681 044	5 295 139	1 385 905	6 681 044	
17. Bali	4 109 378	899 203	5 008 581	3 868 741	1 139 840	5 008 581	
18. Nusa Tenggara Barat	2 379 594	28 135	2 407 729	2 379 594	28 135	2 407 729	
19. Nusa Tenggara Timur	2 393 070	245 945	2 639 015	2 381 311	257 704	2 639 015	
20. Kalimantan Barat	3 262 314	222 258	3 484 572	3 296 607	187 965	3 484 572	
21. Kalimantan Tengah	2 809 096	559 334	3 368 430	2 928 725	439 705	3 368 430	
22. Kalimantan Selatan	4 350 811	1 203 925	5 554 736	4 750 074	804 662	5 554 736	
23. Kalimantan Timur	11 631 697	3 198 904	14 830 601	13 780 245	1 050 356	14 830 601	
24. Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	
25. Sulawesi Utara	2 062 083	252 914	2 314 997	2 025 591	289 406	2 314 997	
26. Sulawesi Tengah	2 132 935	147 789	2 280 724	2 145 228	135 496	2 280 724	
27. Sulawesi Selatan	4 867 593	149 803	5 017 396	4 924 218	93 178	5 017 396	
28. Sulawesi Tenggara	1 972 560	203 680	2 176 240	1 812 945	363 295	2 176 240	
29. Gorontalo	1 052 626	101 033	1 153 659	1 050 817	102 842	1 153 659	
30. Sulawesi Barat	1 073 860	101 380	1 175 240	1 044 071	131 169	1 175 240	
31. Maluku	1 545 465	149 438	1 694 903	1 576 449	118 454	1 694 903	
32. Maluku Utara	1 315 899	125 225	1 441 124	1 387 593	53 531	1 441 124	
33. Papua Barat	5 637 697	372 575	6 010 272	4 512 430	1 497 842	6 010 272	
34. Papua	8 361 139	768 416	9 129 555	8 171 352	958 203	9 129 555	
JUMLAH/TOTAL	205 780 279	31 556 200	237 336 479	203 748 432	33 588 047	237 336 479	

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.c (juta rupiah), 2014

TABLE ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(million rupiahs), 2014

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembinaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembinaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	11 606 325	1 399 324	13 005 649	12 045 848	959 801	13 005 649
2.	Sumatera Utara	7 772 029	51 426	7 823 455	7 808 557	14 898	7 823 455
3.	Sumatera Barat	3 635 838	240 277	3 876 115	3 483 673	392 442	3 876 115
4.	R i a u	8 132 410	1 451 087	9 583 497	5 602 074	3 981 423	9 583 497
5.	J a m b i	3 165 056	514 103	3 679 159	3 204 633	474 526	3 679 159
6.	Sumatera Selatan	6 237 368	10 179	6 247 547	5 770 733	476 814	6 247 547
7.	Bengkulu	1 986 239	210 176	2 196 415	1 934 722	261 693	2 196 415
8.	Lampung	4 526 532	41 141	4 567 673	4 454 187	113 486	4 567 673
9.	Bangka Belitung	1 719 594	201 966	1 921 560	1 596 087	325 473	1 921 560
10.	Kepulauan Riau	2 919 185	538 525	3 457 710	3 312 459	145 251	3 457 710
11.	DKI Jakarta	43 824 301	7 593 995	51 418 296	37 799 664	13 618 632	51 418 296
12.	Jawa Barat	22 310 953	3 586 472	25 897 425	20 797 988	5 099 437	25 897 425
13.	Jawa Tengah	15 157 460	1 689 438	16 846 898	15 086 065	1 760 833	16 846 898
14.	D I Yogyakarta	3 139 872	389 527	3 529 399	2 981 068	548 331	3 529 399
15.	Jawa Timur	20 772 484	1 846 787	22 619 271	20 006 319	2 612 952	22 619 271
16.	Banten	7 068 433	1 069 805	8 138 238	6 192 156	1 946 082	8 138 238
17.	B a l i	4 577 678	1 039 710	5 617 388	4 491 646	1 125 742	5 617 388
18.	Nusa Tenggara Barat	2 789 427	13 828	2 803 255	2 614 100	189 155	2 803 255
19.	Nusa Tenggara Timur	2 787 589	235 105	3 022 694	2 693 049	329 645	3 022 694
20.	Kalimantan Barat	3 719 770	127 745	3 847 515	3 652 914	194 601	3 847 515
21.	Kalimantan Tengah	3 129 695	386 720	3 516 415	3 235 800	280 615	3 516 415
22.	Kalimantan Selatan	4 793 165	863 395	5 656 560	4 917 828	738 732	5 656 560
23.	Kalimantan Timur	11 285 828	1 050 356	12 336 184	11 274 556	1 061 628	12 336 184
24.	Kalimantan Utara	1 513 353	313 461	1 826 814	642 365	1 184 449	1 826 814
25.	Sulawesi Utara	2 320 811	249 382	2 570 193	2 229 484	340 709	2 570 193
26.	Sulawesi Tengah	2 440 227	147 909	2 588 136	2 445 661	142 475	2 588 136
27.	Sulawesi Selatan	5 503 161	339 681	5 842 842	5 600 387	242 455	5 842 842
28.	Sulawesi Tenggara	2 189 560	331 004	2 520 564	2 088 600	431 964	2 520 564
29.	Gorontalo	1 209 049	92 443	1 301 492	1 204 490	97 002	1 301 492
30.	Sulawesi Barat	1 240 242	129 255	1 369 497	1 227 422	142 075	1 369 497
31.	M a l u k u	1 823 030	89 520	1 912 550	1 726 133	186 417	1 912 550
32.	Maluku Utara	1 508 578	24 142	1 532 720	1 481 565	51 155	1 532 720
33.	Papua Barat	5 762 348	1 334 409	7 096 757	5 428 849	1 667 908	7 096 757
34.	P a p u a	10 709 819	833 203	11 543 022	10 303 787	1 239 235	11 543 022
JUMLAH/TOTAL		233 277 409	28 435 496	261 712 905	219 334 869	42 378 036	261 712 905

ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.d (juta rupiah), 2015

TABLE RECEIPT AND EXPENDITURE BUDGET OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(million rupiahs), 2015

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembinaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembinaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	12 010 743	898 706	12 909 449	12 755 644	153 805	12 909 449
2.	Sumatera Utara	8 674 837	5 105	8 679 942	8 679 942	0	8 679 942
3.	Sumatera Barat	3 952 164	220 000	4 172 164	4 051 128	121 036	4 172 164
4.	R i a u	8 721 574	1 962 400	10 683 974	10 683 974	0	10 683 974
5.	J a m b i	3 293 251	219 910	3 513 161	3 513 161	0	3 513 161
6.	Sumatera Selatan	7 193 703	110 000	7 303 703	6 609 709	693 994	7 303 703
7.	Bengkulu	2 204 195	71 053	2 275 248	2 258 697	16 551	2 275 248
8.	Lampung	4 697 691	26 000	4 723 691	4 723 191	500	4 723 691
9.	Bangka Belitung	1 903 060	227 502	2 130 562	2 130 562	0	2 130 562
10.	Kepulauan Riau	3 226 955	458 500	3 685 455	3 670 455	15 000	3 685 455
11.	DKI Jakarta	60 442 739	8 843 683	69 286 422	63 650 105	5 636 317	69 286 422
12.	Jawa Barat	23 914 485	1 400 000	25 314 485	24 753 758	560 727	25 314 485
13.	Jawa Tengah	17 097 686	450 000	17 547 686	17 337 686	210 000	17 547 686
14.	D I Yogyakarta	3 424 276	281 989	3 706 265	3 696 265	10 000	3 706 265
15.	Jawa Timur	22 863 538	1 193 115	24 056 653	23 720 920	335 733	24 056 653
16.	Banten	7 644 634	1 325 000	8 969 634	8 947 634	22 000	8 969 634
17.	B a l i	4 608 609	580 856	5 189 465	4 989 465	200 000	5 189 465
18.	Nusa Tenggara Barat	3 039 988	11 650	3 051 638	2 993 638	58 000	3 051 638
19.	Nusa Tenggara Timur	3 282 665	61 161	3 343 826	3 289 126	54 700	3 343 826
20.	Kalimantan Barat	4 571 001	75 000	4 646 001	4 576 001	70 000	4 646 001
21.	Kalimantan Tengah	3 463 600	243 465	3 707 065	3 652 065	55 000	3 707 065
22.	Kalimantan Selatan	4 893 868	566 000	5 459 868	5 428 868	31 000	5 459 868
23.	Kalimantan Timur	8 536 213	800 000	9 336 213	9 336 213	0	9 336 213
24.	Kalimantan Utara	1 565 052	799 572	2 364 624	2 364 624	0	2 364 624
25.	Sulawesi Utara	2 557 555	109 234	2 666 789	2 641 789	25 000	2 666 789
26.	Sulawesi Tengah	2 768 255	76 139	2 844 394	2 837 564	6 830	2 844 394
27.	Sulawesi Selatan	6 170 178	132 933	6 303 111	6 167 111	136 000	6 303 111
28.	Sulawesi Tenggara	2 263 037	150 505	2 413 542	2 321 893	91 649	2 413 542
29.	Gorontalo	1 419 851	58 881	1 478 732	1 468 732	10 000	1 478 732
30.	Sulawesi Barat	1 438 116	68 310	1 506 426	1 504 426	2 000	1 506 426
31.	M a l u k u	2 297 206	66 240	2 363 446	2 355 710	7 736	2 363 446
32.	Maluku Utara	1 827 928	116 456	1 944 384	1 824 428	119 956	1 944 384
33.	Papua Barat	6 100 541	746 207	6 846 748	6 766 729	80 019	6 846 748
34.	P a p u a	11 987 596	1 305 864	13 293 460	13 268 460	25 000	13 293 460
JUMLAH/TOTAL		264 056 790	23 661 436	287 718 226	278 969 673	8 748 553	287 718 226

TABEL
2.

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENERIMAAN
 (ribu rupiah), 2012-2015**
**TABLE 2 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA BY KIND OF RECEIPT
 (thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 * (4)	2015 * (5)	2015 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		186 010 396 198	205 780 279 058	233 277 408 354	264 056 789 650		
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		86 541 912 951	101 596 400 437	121 450 818 035	136 355 998 144		
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		72 996 679 774	86 979 670 640	103 087 606 002	120 326 064 477		
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		2 645 679 139	1 267 843 490	1 705 308 478	1 731 839 091		
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		2 642 209 423	2 837 923 962	2 972 476 313	3 485 394 400		
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		8 257 344 615	10 510 962 345	13 685 427 242	10 812 700 176		
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		61 998 339 390	64 834 193 347	68 882 788 511	73 294 422 494		
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		20 403 672 925	17 781 418 940	17 481 607 781	21 500 061 188		
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		12 880 322 497	14 299 514 233	15 406 003 394	13 426 024 074		
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		27 381 818 820	30 977 874 897	34 121 932 565	35 971 973 787		
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		1 332 525 148	1 775 385 277	1 873 244 771	2 396 363 445		
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		37 470 143 857	39 349 685 274	42 943 801 808	54 406 369 012		
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		26 442 574 719	31 556 200 366	28 435 496 655	23 661 436 136		
JUMLAH/TOTAL		212 452 970 917	237 336 479 424	261 712 905 009	287 718 225 786		

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.1 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.1 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		9 180 143 048	10 671 826 520	11 606 324 715	12 010 742 783
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		901 720 376	1 325 435 091	1 731 130 840	1 883 113 759
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		687 476 817	752 846 745	1 030 679 175	1 147 306 353
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		6 317 974	6 346 062	3 701 217	4 900 000
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		96 317 228	123 628 755	134 013 450	142 500 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		111 608 357	442 613 529	562 736 998	588 407 406
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 334 800 286	2 675 448 212	2 551 683 310	1 659 438 446
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		251 127 885	254 514 663	77 430 824	274 769 551
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		122 177 984	1 253 339 521	1 199 685 909	58 191 339
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		911 080 707	1 092 445 518	1 201 612 787	1 237 894 986
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		50 413 710	75 148 510	72 953 790	88 582 570
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		6 943 622 386	6 670 943 217	7 323 510 565	8 468 190 578
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		1 508 840 609	1 968 699 122	1 399 323 697	898 705 783
JUMLAH/TOTAL		10 688 983 657	12 640 525 642	13 005 648 412	12 909 448 566

*) Data APBD

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.2 (ribu rupiah), 2012-2015**
**TABLE 2.2 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5)	2015 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		7 201 839 293	7 397 986 772	7 772 029 153	8 674 837 294	
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		4 052 104 891	4 091 285 887	4 416 811 865	5 257 668 175	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		3 636 074 646	3 685 437 788	4 054 634 671	4 743 736 526	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		33 494 628	79 173 619	78 497 614	83 519 774	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		263 801 190	229 337 171	156 330 873	282 309 000	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		118 734 427	97 337 309	127 348 707	148 102 875	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 605 181 560	1 710 602 556	1 812 638 981	1 838 572 482	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		451 848 733	424 244 826	380 468 139	460 776 895	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		8 315 200	8 088 878	23 310 178	28 663 311	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		1 103 389 237	1 223 445 404	1 349 132 276	1 349 132 276	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		41 628 390	54 823 448	59 728 388	0	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		1 544 552 842	1 596 098 329	1 542 578 307	1 578 596 637	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		720 866 154	14 107 542	51 426 062	5 105 000	
JUMLAH/TOTAL		7 922 705 447	7 412 094 314	7 823 455 215	8 679 942 294	

*) Data APBD

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
 (ribu rupiah), 2012-2015**
**TABEL 2.3 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA BARAT BY KIND OF RECEIPT
 (thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		2 922 582 140	3 147 840 359	3 635 837 761	3 952 164 796
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 225 466 023	1 366 178 102	1 729 222 284	1 754 687 385	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	994 570 032	1 085 164 285	1 354 541 147	1 395 115 224	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	38 054 666	34 595 713	16 751 318	14 387 677	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	80 348 993	93 871 535	94 207 475	68 569 316	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	112 492 332	152 546 569	263 722 344	276 615 168	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 143 895 852	1 240 879 867	1 333 059 018	1 441 568 251	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	183 066 225	131 404 781	132 678 673	145 582 469	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	9 768 542	5 610 600	16 385 839	12 126 076	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	918 560 365	1 039 922 511	1 129 886 306	1 221 128 606	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	32 500 720	63 941 975	54 108 200	62 731 100	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	553 220 265	540 782 390	573 556 459	755 909 160	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	361 250 283	276 750 267	240 276 961	220 000 000	
JUMLAH/TOTAL	3 283 832 423	3 424 590 626	3 876 114 722	4 172 164 796	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.4 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.4 *ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU BY KIND OF RECEIPT*
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		6 847 315 820	6 994 646 205	8 132 409 892	8 721 574 283
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		2 588 688 445	2 725 623 913	3 245 087 745	3 656 360 898
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		2 058 595 751	2 110 997 530	2 496 771 206	2 924 923 047
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		12 174 266	24 359 497	16 992 124	24 369 294
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		139 601 792	146 463 620	154 214 508	208 544 824
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		378 316 636	443 803 266	577 109 907	498 523 733
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		3 618 842 731	3 610 182 230	4 231 808 634	4 196 336 985
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		502 497 680	618 581 036	668 492 187	559 669 579
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		2 564 673 767	2 226 231 958	2 698 594 353	2 903 245 156
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		489 179 914	726 630 916	820 984 584	654 220 250
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		62 491 370	38 738 320	43 737 510	79 202 000
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		639 784 644	658 840 062	655 513 513	868 876 400
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		1 906 680 479	1 978 312 715	1 451 086 907	1 962 400 000
JUMLAH/TOTAL		8 753 996 299	8 972 958 920	9 583 496 799	10 683 974 283

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.5 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.5 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAMBI BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 * (6)
A.	PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>	2 654 694 237	2 886 305 068	3 165 055 793	3 293 250 798
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	995 822 608	1 063 922 065	1 281 239 473	1 218 125 069
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	808 258 461	841 884 452	1 010 560 585	1 019 755 850
1.2.	Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	12 053 725	15 363 759	14 587 181	18 144 020
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	29 984 606	26 879 028	32 219 309	50 020 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	145 525 816	179 794 826	223 872 398	130 205 199
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 332 579 087	1 489 852 560	1 514 518 389	1 713 020 175
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	217 355 132	246 548 942	194 972 088	251 045 177
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	350 162 175	353 397 070	321 853 079	414 397 115
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	731 952 242	836 578 062	948 337 712	995 754 598
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	33 109 538	53 328 486	49 355 510	51 823 285
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	326 292 542	332 530 443	369 297 931	362 105 554
B.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	632 401 128	690 767 077	514 103 467	219 909 958
JUMLAH/TOTAL		3 287 095 365	3 577 072 145	3 679 159 260	3 513 160 756

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.6 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.6 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA SELATAN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		5 223 884 081	5 468 139 691	6 237 367 763	7 193 702 637
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 001 739 389	2 021 696 787	2 407 905 239	2 784 966 906	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 803 818 849	1 882 596 916	2 267 779 726	2 530 928 661	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	13 376 825	16 522 296	11 422 670	13 495 184	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	85 892 644	59 352 769	30 668 098	145 941 418	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	98 651 071	63 224 806	98 034 745	94 601 643	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 378 798 651	2 649 216 454	2 982 866 001	3 262 707 213	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	490 241 630	572 654 634	548 897 750	497 915 042	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 127 002 330	1 180 856 653	1 385 670 591	1 709 844 091	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	716 153 261	870 516 767	985 542 760	985 542 760	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	45 401 430	25 188 400	62 754 900	69 405 320	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	843 346 041	797 226 450	846 596 523	1 146 028 518	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	477 175 785	521 334 563	10 179 492	110 000 000	
JUMLAH/TOTAL	5 701 059 866	5 989 474 254	6 247 547 255	7 303 702 637	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.7 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.7 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BENGKULU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 * (4)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		1 562 525 395	1 696 369 921	1 986 238 994	2 204 194 621
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		483 768 275	525 207 935	672 064 468	695 033 820
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		370 247 703	394 141 932	483 711 051	496 996 347
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		7 655 853	12 326 203	4 625 281	4 194 888
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		7 636 009	12 069 161	17 080 376	16 652 096
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		98 228 710	106 670 639	166 647 760	177 190 489
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		882 996 673	977 347 954	1 104 582 676	1 225 693 875
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		61 848 269	53 933 686	50 653 058	52 282 428
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		17 216 628	17 179 110	44 907 411	63 437 427
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		775 311 166	854 647 828	955 095 187	1 046 080 820
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		28 620 610	51 587 330	53 927 020	63 893 200
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		195 760 447	193 814 032	209 591 850	283 466 926
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		197 339 471	241 356 037	210 176 309	71 052 751
JUMLAH/TOTAL		1 759 864 866	1 937 725 958	2 196 415 303	2 275 247 372

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.8 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.8 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAMPUNG BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		3 742 004 283	3 901 950 614	4 526 532 292	4 697 690 698
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		1 687 701 199	1 771 297 935	2 274 685 573	2 341 611 590
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		1 465 711 124	1 547 336 215	1 946 452 924	2 122 600 000
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		8 209 834	8 672 979	9 253 336	8 014 153
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		21 270 704	25 144 919	25 462 865	25 838 906
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		192 509 537	190 143 822	293 516 448	185 158 531
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 280 851 522	1 384 043 537	1 472 486 569	1 579 395 052
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		164 927 667	145 424 014	142 641 117	131 447 701
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		145 696 928	117 848 110	144 940 791	206 240 038
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		939 139 287	1 060 663 183	1 136 053 041	1 192 855 693
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		31 087 640	60 108 230	48 851 620	48 851 620
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		773 451 562	746 609 142	779 360 150	776 684 056
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		117 688 684	23 710 615	41 141 205	26 000 000
JUMLAH/TOTAL		3 859 692 967	3 925 661 229	4 567 673 497	4 723 690 698

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.9 (ribu rupiah), 2012-2015
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		1 384 937 385	1 529 111 282	1 719 594 419	1 903 060 960
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		438 373 573	495 796 075	562 928 837	575 722 066
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		396 527 427	447 462 199	508 262 616	517 786 493
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		3 689 016	5 327 341	9 357 404	6 139 822
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		7 193 086	5 390 252	1 025 926	7 500 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		30 964 044	37 616 283	44 282 891	44 295 751
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		821 499 996	907 835 915	1 025 142 797	1 147 712 494
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		63 591 599	60 622 259	52 839 392	54 983 955
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		98 684 932	85 902 968	122 110 799	139 396 326
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		634 087 815	717 140 118	806 820 146	897 887 443
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		25 135 650	44 170 570	43 372 460	55 444 770
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		125 063 816	125 479 292	131 522 785	179 626 400
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		242 123 559	285 022 225	201 966 080	227 501 517
JUMLAH/TOTAL		1 627 060 944	1 814 133 507	1 921 560 499	2 130 562 477

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.10 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.10 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KEPULAUAN RIAU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		2 473 411 609	2 843 717 790	2 919 185 332	3 226 955 273
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	723 053 960	907 982 039	1 070 208 289	1 127 745 000	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	685 601 565	852 188 093	1 006 068 104	1 078 250 000	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	5 352 202	13 413 198	2 713 029	8 465 000	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	2 559 183	0	0	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	32 100 193	39 821 565	61 427 156	41 030 000	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 594 446 909	1 753 710 493	1 664 959 883	1 860 047 273	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	199 561 150	198 090 541	203 987 983	242 313 505	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	910 862 352	862 879 432	721 284 492	879 252 847	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	460 857 807	656 067 610	698 009 318	695 943 711	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	23 165 600	36 672 910	41 678 090	42 537 210	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	155 910 740	182 025 258	184 017 160	239 163 000	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	290 737 799	514 289 374	538 524 513	458 500 000	
JUMLAH/TOTAL	2 764 149 408	3 358 007 164	3 457 709 845	3 685 455 273	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.11 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.11 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 * (4)	2015 * (5)	2015 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		35 379 180 052	39 517 544 012	43 824 300 561	60 442 738 784		
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		22 040 801 448	26 852 192 453	31 274 215 886	40 355 853 088		
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		17 721 493 016	23 370 213 237	27 050 949 024	36 079 102 000		
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		1 820 435 448	333 787 344	515 162 936	600 000 000		
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		351 823 211	397 234 722	465 979 963	600 000 000		
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		2 147 049 773	2 750 957 150	3 242 123 963	3 076 751 088		
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		11 554 964 808	9 387 539 402	9 677 533 225	12 760 465 925		
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		10 984 787 700	8 863 205 864	9 279 068 989	12 659 962 912		
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		294 849 251	225 151 072	312 478 954	100 503 013		
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		275 327 857	299 182 466	85 985 282	0		
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		0	0	0	0		
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		1 783 413 796	3 277 812 157	2 872 551 450	7 326 419 771		
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		6 475 552 012	9 463 721 531	7 593 994 776	8 843 683 216		
JUMLAH/TOTAL		41 854 732 064	48 981 265 543	51 418 295 337	69 286 422 000		

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.12 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.12 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		16 878 128 995	19 237 611 310	22 310 953 031	23 914 485 396
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		9 982 917 415	12 360 109 870	15 038 153 310	15 851 202 864
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		9 149 214 330	11 236 145 855	13 753 760 403	14 942 465 917
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		57 326 324	63 654 936	70 081 405	62 037 467
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		232 647 377	261 601 089	304 380 445	277 345 935
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		543 729 384	798 707 990	909 931 057	569 353 545
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		2 832 746 609	2 950 532 546	3 260 505 636	2 528 916 818
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		1 199 350 816	1 026 017 163	1 076 897 693	873 581 024
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		315 078 753	371 990 322	417 706 527	328 051 409
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		1 269 960 760	1 472 453 011	1 687 686 386	1 303 654 355
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		48 356 280	80 072 050	78 215 030	23 630 030
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		4 062 464 971	3 926 968 894	4 012 294 085	5 534 365 714
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		3 003 186 559	2 934 630 844	3 586 471 831	1 400 000 000
JUMLAH/TOTAL		19 881 315 554	22 172 242 154	25 897 424 862	25 314 485 396

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.13 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.13 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TENGAH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		11 694 479 699	13 343 358 327	15 157 460 004	17 097 686 334
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		6 629 308 010	8 212 800 641	9 916 358 231	11 696 822 243
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		5 590 597 156	6 716 170 095	8 213 117 978	10 266 079 853
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		68 250 252	69 970 596	79 475 022	84 022 367
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		238 231 933	263 267 978	291 844 276	319 188 988
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		732 228 669	1 163 391 972	1 331 920 955	1 027 531 035
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		2 318 806 100	2 467 814 629	2 542 626 745	2 694 385 621
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		610 215 375	583 478 946	490 753 590	650 875 594
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		141 067 324	130 953 804	168 776 726	181 606 198
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		1 516 892 951	1 670 859 369	1 803 931 189	1 803 931 189
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		50 630 450	82 522 510	79 165 240	57 972 640
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		2 746 365 589	2 662 743 057	2 698 475 028	2 706 478 470
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		707 735 960	1 306 017 472	1 689 438 285	450 000 000
JUMLAH/TOTAL		12 402 215 659	14 649 375 799	16 846 898 289	17 547 686 334

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.14 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.14 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DI YOGYAKARTA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5)	(6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		2 171 734 308	2 583 056 764	3 139 871 880	3 424 276 010	
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		1 004 063 126	1 216 102 750	1 464 604 954	1 453 213 231	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		871 630 605	1 063 314 118	1 291 664 421	1 296 531 744	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		34 115 158	38 043 014	44 595 095	40 376 418	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		35 492 533	40 817 517	48 247 880	55 978 162	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		62 824 830	73 928 101	80 097 558	60 326 907	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		894 544 325	957 561 851	1 013 811 390	1 046 869 045	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		112 691 591	89 148 689	70 324 850	80 502 169	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		5 743 298	5 582 494	6 431 380	6 738 114	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		757 056 696	828 334 768	899 923 550	920 544 722	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		19 052 740	34 495 900	37 131 610	39 084 040	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		273 126 857	409 392 163	661 455 536	924 193 734	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		293 608 593	403 200 659	389 527 178	281 988 867	
JUMLAH/TOTAL		2 465 342 901	2 986 257 423	3 529 399 058	3 706 264 877	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.15 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.15 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		15 543 039 549	17 372 768 544	20 772 483 874	22 863 537 765
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		9 725 627 569	11 596 376 615	14 442 216 520	14 771 139 275
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		7 816 590 831	9 404 934 972	11 517 684 924	12 591 000 000
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		118 823 638	105 580 782	148 638 032	136 337 487
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		352 899 912	332 020 395	342 920 270	351 344 506
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		1 437 313 188	1 753 840 466	2 432 973 294	1 692 457 282
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		3 069 016 102	2 919 371 008	3 485 336 764	4 345 684 182
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		1 507 072 635	1 134 478 292	1 123 170 491	1 236 834 603
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		16 892 271	240 250 663	393 742 118	1 455 548 682
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		1 491 561 136	1 496 594 268	1 866 548 185	1 587 261 707
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		53 490 060	48 047 785	101 875 970	66 039 190
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		2 748 395 878	2 857 020 921	2 844 930 590	3 746 714 308
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		1 359 475 042	1 753 509 144	1 846 787 127	1 193 115 371
JUMLAH/TOTAL		16 902 514 591	19 126 277 688	22 619 271 001	24 056 653 136

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.16 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.16 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		5 413 705 184	6 230 229 814	7 068 432 912	7 644 633 698
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		3 395 883 044	4 118 551 716	4 899 125 741	5 133 482 400
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		3 257 728 615	3 943 816 592	4 624 337 476	4 944 467 880
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		6 418 728	13 669 634	30 734 862	41 827 000
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		32 293 949	38 331 096	42 421 275	40 900 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		99 441 752	122 734 394	201 632 128	106 287 520
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 015 105 168	1 126 004 172	1 159 872 633	1 122 953 698
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		451 137 610	494 140 096	415 270 933	455 310 674
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		3 446 980	4 181 762	3 573 210	5 675 711
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		530 833 378	617 081 101	728 490 012	640 981 003
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		29 687 200	10 601 213	12 538 478	20 986 310
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		1 002 716 972	985 673 926	1 009 434 538	1 388 197 600
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		374 844 507	450 814 202	1 069 804 863	1 325 000 000
JUMLAH/TOTAL		5 788 549 691	6 681 044 016	8 138 237 775	8 969 633 698

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.17 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.17 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		3 633 133 585	4 109 377 804	4 577 678 391	4 608 608 718
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		2 042 091 096	2 529 976 146	2 920 416 698	2 840 927 951
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		1 813 341 219	2 202 392 551	2 517 432 372	2 583 385 033
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		50 545 903	32 012 802	71 324 628	37 393 205
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		76 701 656	106 105 514	89 747 348	87 040 110
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		101 502 318	189 465 279	241 912 350	133 109 603
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		908 371 147	980 714 800	1 018 431 009	1 025 947 167
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		180 266 157	131 057 469	144 532 786	149 853 189
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		0	13 456 075	0	0
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		694 079 080	792 365 876	832 297 473	831 597 268
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		34 025 910	43 835 380	41 600 750	44 496 710
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		682 671 342	598 686 858	638 830 684	741 733 600
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		787 311 641	899 202 574	1 039 709 937	580 856 381
JUMLAH/TOTAL		4 420 445 226	5 008 580 378	5 617 388 328	5 189 465 099

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.18 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.18 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		2 242 817 129	2 379 593 701	2 789 427 242	3 039 987 552
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		745 979 811	858 454 205	1 115 060 397	1 256 936 903
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		580 615 755	697 834 322	904 783 591	1 007 154 427
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		10 129 108	12 917 378	19 838 517	16 264 406
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		53 821 736	52 715 118	55 670 167	56 646 030
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		101 413 212	94 987 387	134 768 122	176 872 040
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 054 470 183	1 075 004 986	1 212 086 447	1 305 287 245
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		169 222 739	148 645 947	149 750 882	152 984 035
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		22 303 389	9 598 323	27 281 795	33 926 020
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		809 617 715	859 353 026	980 390 340	1 063 713 760
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		53 326 340	57 407 690	54 663 430	54 663 430
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		442 367 135	446 134 510	462 280 398	477 763 404
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		17 713 224	28 134 779	13 828 458	11 650 000
JUMLAH/TOTAL		2 260 530 353	2 407 728 480	2 803 255 700	3 051 637 552

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.19 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.19 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA TIMUR BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 * (4)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		2 241 542 051	2 393 070 440	2 787 588 697	3 282 665 034
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		459 657 187	528 832 134	763 337 478	829 811 062
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		315 287 237	363 720 612	559 803 346	636 726 117
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		9 850 009	8 589 942	18 408 844	34 149 935
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		42 740 305	53 317 241	63 445 963	75 770 160
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		91 779 636	103 204 339	121 679 325	83 164 850
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 098 619 869	1 165 848 623	1 282 745 347	1 481 037 037
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		100 345 548	83 417 371	74 913 781	89 685 140
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		538 607	616 889	1 908 066	5 415 632
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		940 646 764	1 003 991 703	1 131 687 590	1 300 445 875
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		57 088 950	77 822 660	74 235 910	85 490 390
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		683 264 995	698 389 683	741 505 872	971 816 935
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		188 710 799	245 944 915	235 104 724	61 161 306
JUMLAH/TOTAL		2 430 252 850	2 639 015 355	3 022 693 421	3 343 826 340

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.20 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.20 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		2 932 912 821	3 262 314 100	3 719 770 111	4 571 000 933
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		1 164 425 412	1 347 396 425	1 621 610 891	2 166 920 791
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		986 813 358	1 129 549 657	1 343 346 494	1 945 759 554
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		89 055 036	108 076 248	166 639 948	119 376 119
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		47 620 148	55 010 160	62 865 346	65 648 568
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		40 936 870	54 760 360	48 759 103	36 136 550
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 249 834 007	1 382 042 462	1 531 868 903	1 687 980 742
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		154 586 920	131 778 562	127 364 266	149 417 478
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		28 104 240	31 378 670	51 092 301	47 384 895
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		1 023 229 807	1 144 712 840	1 290 222 856	1 405 594 169
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		43 913 040	74 172 390	63 189 480	85 584 200
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		518 653 402	532 875 213	566 290 317	716 099 400
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		383 302 411	222 258 326	127 744 740	75 000 000
JUMLAH/TOTAL		3 316 215 232	3 484 572 426	3 847 514 851	4 646 000 933

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.21 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.21 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		2 514 031 289	2 809 096 139	3 129 694 746	3 463 600 000
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	945 362 708	1 093 821 486	1 253 708 122	1 399 867 368	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	836 503 945	973 244 830	1 087 630 498	1 262 556 240	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	6 963 110	7 371 574	9 065 199	9 623 378	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	22 159 324	25 298 652	29 760 680	30 000 000	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	79 736 329	87 906 430	127 251 745	97 687 750	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 296 011 128	1 442 477 674	1 557 416 499	1 711 928 503	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	163 501 928	169 674 606	144 812 235	159 817 408	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	131 068 852	146 986 818	198 245 696	198 989 287	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	951 256 068	1 062 516 940	1 152 428 738	1 280 595 848	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	50 184 280	63 299 310	61 929 830	72 525 960	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	272 657 453	272 796 979	318 570 125	351 804 129	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	451 605 920	559 334 316	386 719 707	243 464 715	
JUMLAH/TOTAL	2 965 637 209	3 368 430 455	3 516 414 453	3 707 064 715	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.22 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.22 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN SELATAN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		4 381 610 479	4 350 810 456	4 793 164 631	4 893 867 638
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		2 517 518 566	2 502 279 216	2 898 704 954	3 001 297 216
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		2 199 594 030	2 136 882 989	2 395 925 506	2 648 326 199
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		9 275 042	20 534 550	20 001 837	20 152 379
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		42 309 263	916 252	1 116 058	39 275 500
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		266 340 231	343 945 425	481 661 553	293 543 138
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 534 463 778	1 505 123 319	1 523 714 616	1 417 991 006
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		196 743 601	195 943 995	171 176 951	159 000 000
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		646 336 615	584 114 343	596 622 189	493 375 000
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		652 535 312	683 511 441	701 725 536	701 725 536
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		38 848 250	41 553 540	54 189 940	63 890 470
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		329 628 135	343 407 921	370 745 061	474 579 416
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		933 954 408	1 203 925 399	863 395 088	566 000 000
JUMLAH/TOTAL		5 315 564 887	5 554 735 855	5 656 559 719	5 459 867 638

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.23 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.23 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TIMUR BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		11 886 470 505	11 631 697 052	11 285 828 192	8 536 213 350
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		5 409 949 386	5 885 262 004	6 663 113 275	5 545 993 570
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		4 486 404 585	4 929 791 599	5 429 125 999	4 669 869 000
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		22 495 632	33 676 707	15 494 253	12 204 020
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		208 293 801	291 684 072	309 599 926	281 184 550
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		692 755 368	630 109 626	908 893 097	582 736 000
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		6 071 586 086	5 335 759 150	4 253 320 982	2 624 018 350
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		715 648 111	825 858 411	662 727 209	668 000 000
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		5 268 684 084	4 446 313 563	3 532 243 333	1 890 054 485
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		52 637 761	55 539 336	57 312 515	57 312 515
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		34 616 130	8 047 840	1 037 925	8 651 350
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		404 935 033	410 675 898	369 393 935	366 201 430
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		2 837 723 895	3 198 903 975	1 050 356 119	800 000 000
JUMLAH/TOTAL		14 724 194 400	14 830 601 027	12 336 184 311	9 336 213 350

*) Data APBD

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2012-2015**
**TABEL 2.24 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		0	0	1 513 352 878	1 565 051 547
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		0	0	11 833 885	349 246 995
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		0	0	0	346 246 995
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		0	0	0	0
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		0	0	0	0
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		0	0	11 833 885	3 000 000
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		0	0	1 228 625 713	1 003 004 752
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		0	0	104 848 110	131 569 861
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		0	0	1 094 988 347	160 239 643
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		0	0	20 567 986	651 247 428
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		0	0	8 221 270	59 947 820
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		0	0	272 893 280	212 799 800
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		0	0	313 461 401	799 572 065
JUMLAH/TOTAL		0	0	1 826 814 279	2 364 623 612

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.25 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.25 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5)	(6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		1 834 908 288	2 062 083 090	2 320 810 783	2 557 555 499	
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		633 650 533	789 631 755	937 681 927	1 028 490 800	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		554 846 121	667 921 447	785 141 595	911 161 600	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		14 790 121	25 269 651	34 468 180	39 679 200	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		24 433 971	33 010 612	29 410 022	30 000 000	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		39 580 320	63 430 045	88 662 130	47 650 000	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		933 366 697	1 029 942 557	1 093 949 318	1 191 740 699	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		92 316 876	84 261 033	69 660 411	78 728 000	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		6 975 400	5 651 107	14 761 225	19 172 000	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		790 534 491	885 684 277	949 852 622	1 026 948 809	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		43 539 930	54 346 140	59 675 060	66 891 890	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		267 891 058	242 508 778	289 179 538	337 324 000	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		189 114 090	252 914 032	249 382 344	109 233 605	
JUMLAH/TOTAL		2 024 022 378	2 314 997 122	2 570 193 127	2 666 789 104	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.26 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.26 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGAH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		1 962 393 167	2 132 935 005	2 440 226 816	2 768 255 464
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		605 821 437	662 226 616	824 611 352	883 321 883
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		494 753 016	555 077 910	663 633 353	786 211 296
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		3 123 783	3 622 024	4 326 901	3 399 989
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		5 474 894	8 170 067	9 548 970	12 259 077
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		102 469 744	95 356 615	147 102 128	81 451 521
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 042 926 565	1 160 797 527	1 239 776 947	1 439 007 125
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		83 175 645	81 976 567	62 083 121	78 262 293
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		14 426 121	18 212 925	25 866 332	65 155 677
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		902 087 729	994 658 685	1 087 885 014	1 221 602 865
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		43 237 070	65 949 350	63 942 480	73 986 290
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		313 645 165	309 910 862	375 838 517	445 926 456
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		209 216 673	147 788 886	147 909 346	76 138 677
JUMLAH/TOTAL		2 171 609 840	2 280 723 891	2 588 136 162	2 844 394 141

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.27 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.27 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI SELATAN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		4 433 963 020	4 867 592 610	5 503 161 406	6 170 178 054
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		2 198 776 396	2 560 045 632	3 029 122 239	3 380 993 212
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		1 949 194 027	2 253 427 933	2 667 266 553	3 044 546 191
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		113 058 779	60 528 671	94 595 827	89 851 070
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		67 557 465	71 057 299	74 599 105	80 227 283
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		68 966 125	175 031 729	192 660 754	166 368 668
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 349 192 581	1 422 165 817	1 531 386 241	1 530 716 897
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		299 680 577	256 812 149	218 129 274	247 991 298
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		9 797 950	11 317 890	30 681 746	24 357 442
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		996 939 584	1 089 771 438	1 209 598 741	1 180 010 167
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		42 774 470	64 264 340	72 976 480	78 357 990
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		885 994 043	885 381 161	942 652 926	1 258 467 945
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		212 338 656	149 803 013	339 681 251	132 932 844
JUMLAH/TOTAL		4 646 301 676	5 017 395 623	5 842 842 657	6 303 110 898

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.28 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.28 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 * (6)
A.	PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>	1 811 984 328	1 972 559 881	2 189 559 758	2 263 036 904
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	439 184 125	514 857 030	599 942 751	533 101 637
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	336 932 584	408 107 144	457 838 380	405 603 271
1.2.	Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	19 160 705	24 471 159	18 244 034	18 335 522
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	25 046 620	23 843 795	23 315 540	24 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	58 044 216	58 434 932	100 544 797	85 162 844
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 020 125 146	1 160 895 854	1 236 016 579	1 321 756 467
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	69 714 283	67 214 668	62 477 343	27 476 090
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	45 493 192	59 378 675	61 153 215	44 362 850
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	870 257 871	981 035 741	1 053 636 011	1 176 423 577
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	34 659 800	53 266 770	58 750 010	73 493 950
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	352 675 057	296 806 997	353 600 428	408 178 800
B.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	23 590 982	203 679 670	331 004 017	150 505 134
JUMLAH/TOTAL		1 835 575 310	2 176 239 551	2 520 563 775	2 413 542 038

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.29 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.29 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF GORONTALO BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 * (4)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		933 169 935	1 052 625 775	1 209 049 489	1 419 850 511
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	180 039 376	214 684 375	281 920 210	318 172 268	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	168 068 662	200 883 464	247 137 061	298 220 946	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	88 420	571 212	1 967 050	2 175 000	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	1 946 292	4 000 000	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	11 882 294	13 229 699	30 869 807	13 776 322	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	637 007 089	722 098 488	800 313 829	936 274 443	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	30 667 268	26 408 286	22 554 272	28 031 074	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	191 189	392 411	1 106 059	2 504 718	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	582 140 302	652 284 261	734 279 438	845 395 651	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	24 008 330	43 013 530	42 374 060	60 343 000	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	116 123 470	115 842 912	126 815 450	165 403 800	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	63 968 779	101 032 865	92 443 365	58 881 561	
JUMLAH/TOTAL	997 138 714	1 153 658 640	1 301 492 854	1 478 732 072	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.30 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.30 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		959 029 569	1 073 860 195	1 240 241 991	1 438 115 506
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	140 396 940	154 131 860	223 704 906	239 795 819	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	119 939 739	132 801 331	196 874 903	216 196 519	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	1 422 265	2 326 506	4 031 227	4 141 800	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	530 814	1 175 246	1 175 000	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	19 034 936	18 473 209	21 623 530	18 282 500	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	671 146 618	772 106 138	857 098 935	992 140 187	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	43 462 087	39 214 271	27 843 302	11 532 482	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	217 890	377 275	2 455 801	24 581 422	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	590 680 361	685 497 592	776 214 122	895 580 933	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	36 786 280	47 017 000	50 585 710	60 445 350	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	147 486 011	147 622 197	159 438 150	206 179 500	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	19 000 000	101 379 671	129 254 556	68 310 487	
JUMLAH/TOTAL	978 029 569	1 175 239 866	1 369 496 547	1 506 425 993	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.31 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.31 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 * (4)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		1 436 645 207	1 545 464 676	1 823 030 023	2 297 206 010
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		267 502 524	304 364 506	425 425 608	603 458 017
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		204 292 148	217 800 853	279 566 231	407 189 258
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		25 576 587	43 994 598	70 162 844	66 406 956
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		19 133 252	19 311 339	31 317 239	69 001 900
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		18 500 537	23 257 716	44 379 294	60 859 903
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		959 240 295	1 026 829 361	1 165 471 924	1 400 504 593
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		82 945 042	72 694 999	66 624 446	121 873 039
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		8 741 099	3 052 290	9 009 006	14 234 880
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		829 491 474	897 657 192	1 019 704 312	1 177 774 674
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		38 062 680	53 424 880	70 134 160	86 622 000
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		209 902 388	214 270 809	232 132 491	293 243 400
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		78 105 094	149 438 146	89 519 602	66 239 687
JUMLAH/TOTAL		1 514 750 301	1 694 902 822	1 912 549 625	2 363 445 697

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.32 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.32 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5)	(6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		1 196 746 356	1 315 899 116	1 508 577 673	1 827 927 649	
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		115 905 322	165 886 908	203 059 698	248 646 493	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		91 735 153	137 782 856	145 451 712	169 135 747	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		7 201 989	16 604 423	41 852 324	47 240 121	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		73 140	170 360	634 494	634 493	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		16 895 040	11 329 269	15 121 168	31 636 132	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		858 295 011	940 667 169	1 089 674 339	1 309 937 956	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		66 657 071	50 805 123	44 229 087	58 194 166	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		50 620 895	47 582 504	64 198 612	75 957 780	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		703 159 025	772 591 162	906 623 550	1 061 177 950	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		37 858 020	69 688 380	74 623 090	114 608 060	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		222 546 023	209 345 039	215 843 636	269 343 200	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		199 701 142	125 225 151	24 141 586	116 455 591	
JUMLAH/TOTAL		1 396 447 498	1 441 124 267	1 532 719 259	1 944 383 240	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.33 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.33 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 * (6)
A.	PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>	3 873 388 417	5 637 696 634	5 762 348 201	6 100 541 343
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	175 450 133	236 282 890	306 674 697	289 969 200
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	142 529 273	184 122 827	229 610 362	231 288 200
1.2.	Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	1 420 766	1 944 900	1 206 600	1 545 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	8 809 755	13 020 674	14 364 750	20 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	22 690 339	37 194 489	61 492 985	37 136 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 516 156 701	2 992 755 350	2 783 645 235	3 034 151 452
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	191 649 305	232 101 384	175 115 617	271 712 574
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	384 475 833	1 630 850 129	1 425 049 229	1 402 481 153
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	901 398 453	1 064 872 637	1 122 264 659	1 284 079 945
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	38 633 110	64 931 200	61 215 730	75 877 780
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	2 181 781 583	2 408 658 394	2 672 028 269	2 776 420 691
B.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	398 118 932	372 575 438	1 334 408 797	746 207 071
JUMLAH/TOTAL		4 271 507 349	6 010 272 072	7 096 756 998	6 846 748 414

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.34 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 2.34 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2012 (1) (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		7 462 044 974	8 361 139 391	10 709 818 950	11 987 595 808
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		623 162 648	597 707 375	944 929 692	882 299 190
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		401 691 994	453 677 291	566 062 615	659 441 989
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		15 773 347	24 524 172	57 091 739	59 670 440
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		22 598 926	25 792 803	32 942 178	15 898 578
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		183 098 381	93 713 109	288 833 160	147 288 183
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		2 118 450 110	2 511 020 686	2 643 812 997	3 457 230 338
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		311 768 070	287 065 667	244 216 931	288 079 783
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		130 708 426	200 789 929	287 888 085	430 914 337
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		1 569 782 444	1 889 267 850	1 991 202 341	2 277 932 698
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		106 191 170	133 897 240	120 505 640	460 303 520
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		4 720 432 216	5 252 411 330	7 121 076 261	7 648 066 280
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		779 591 449	768 415 821	833 202 864	1 305 864 549
JUMLAH/TOTAL		8 241 636 423	9 129 555 212	11 543 021 814	13 293 460 357

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 3.A (ribu rupiah), 2012-2015
ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	9 180 143 048	10 671 826 520	11 606 324 715	12 010 742 783
2.	Sumatera Utara	7 201 839 293	7 397 986 772	7 772 029 153	8 674 837 294
3.	Sumatera Barat	2 922 582 140	3 147 840 359	3 635 837 761	3 952 164 796
4.	R i a u	6 847 315 820	6 994 646 205	8 132 409 892	8 721 574 283
5.	J a m b i	2 654 694 237	2 886 305 068	3 165 055 793	3 293 250 798
6.	Sumatera Selatan	5 223 884 081	5 468 139 691	6 237 367 763	7 193 702 637
7.	Bengkulu	1 562 525 395	1 696 369 921	1 986 238 994	2 204 194 621
8.	Lampung	3 742 004 283	3 901 950 614	4 526 532 292	4 697 690 698
9.	Bangka Belitung	1 384 937 385	1 529 111 282	1 719 594 419	1 903 060 960
10.	Kepulauan Riau	2 473 411 609	2 843 717 790	2 919 185 332	3 226 955 273
11.	DKI Jakarta	35 379 180 052	39 517 544 012	43 824 300 561	60 442 738 784
12.	Jawa Barat	16 878 128 995	19 237 611 310	22 310 953 031	23 914 485 396
13.	Jawa Tengah	11 694 479 699	13 343 358 327	15 157 460 004	17 097 686 334
14.	D I Yogyakarta	2 171 734 308	2 583 056 764	3 139 871 880	3 424 276 010
15.	Jawa Timur	15 543 039 549	17 372 768 544	20 772 483 874	22 863 537 765
16.	Banten	5 413 705 184	6 230 229 814	7 068 432 912	7 644 633 698
17.	B a l i	3 633 133 585	4 109 377 804	4 577 678 391	4 608 608 718
18.	Nusa Tenggara Barat	2 242 817 129	2 379 593 701	2 789 427 242	3 039 987 552
19.	Nusa Tenggara Timur	2 241 542 051	2 393 070 440	2 787 588 697	3 282 665 034
20.	Kalimantan Barat	2 932 912 821	3 262 314 100	3 719 770 111	4 571 000 933
21.	Kalimantan Tengah	2 514 031 289	2 809 096 139	3 129 694 746	3 463 600 000
22.	Kalimantan Selatan	4 381 610 479	4 350 810 456	4 793 164 631	4 893 867 638
23.	Kalimantan Timur	11 886 470 505	11 631 697 052	11 285 828 192	8 536 213 350
24.	Kalimantan Utara	0	0	1 513 352 878	1 565 051 547
25.	Sulawesi Utara	1 834 908 288	2 062 083 090	2 320 810 783	2 557 555 499
26.	Sulawesi Tengah	1 962 393 167	2 132 935 005	2 440 226 816	2 768 255 464
27.	Sulawesi Selatan	4 433 963 020	4 867 592 610	5 503 161 406	6 170 178 054
28.	Sulawesi Tenggara	1 811 984 328	1 972 559 881	2 189 559 758	2 263 036 904
29.	Gorontalo	933 169 935	1 052 625 775	1 209 049 489	1 419 850 511
30.	Sulawesi Barat	959 029 569	1 073 860 195	1 240 241 991	1 438 115 506
31.	M a l u k u	1 436 645 207	1 545 464 676	1 823 030 023	2 297 206 010
32.	Maluku Utara	1 196 746 356	1 315 899 116	1 508 577 673	1 827 927 649
33.	Papua Barat	3 873 388 417	5 637 696 634	5 762 348 201	6 100 541 343
34.	P a p u a	7 462 044 974	8 361 139 391	10 709 818 950	11 987 595 808
JUMLAH/TOTAL		186 010 396 198	205 780 279 058	233 277 408 354	264 056 789 650

*) Data APBD

TABEL 3.1

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah),
2012-2015**
**ACTUAL ORIGINAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	901 720 376	1 325 435 091	1 731 130 840	1 883 113 759	
2. Sumatera Utara	4 052 104 891	4 091 285 887	4 416 811 865	5 257 668 175	
3. Sumatera Barat	1 225 466 023	1 366 178 102	1 729 222 284	1 754 687 385	
4. Riau	2 588 688 445	2 725 623 913	3 245 087 745	3 656 360 898	
5. Jambi	995 822 608	1 063 922 065	1 281 239 473	1 218 125 069	
6. Sumatera Selatan	2 001 739 389	2 021 696 787	2 407 905 239	2 784 966 906	
7. Bengkulu	483 768 275	525 207 935	672 064 468	695 033 820	
8. Lampung	1 687 701 199	1 771 297 935	2 274 685 573	2 341 611 590	
9. Bangka Belitung	438 373 573	495 796 075	562 928 837	575 722 066	
10. Kepulauan Riau	723 053 960	907 982 039	1 070 208 289	1 127 745 000	
11. DKI Jakarta	22 040 801 448	26 852 192 453	31 274 215 886	40 355 853 088	
12. Jawa Barat	9 982 917 415	12 360 109 870	15 038 153 310	15 851 202 864	
13. Jawa Tengah	6 629 308 010	8 212 800 641	9 916 358 231	11 696 822 243	
14. DI Yogyakarta	1 004 063 126	1 216 102 750	1 464 604 954	1 453 213 231	
15. Jawa Timur	9 725 627 569	11 596 376 615	14 442 216 520	14 771 139 275	
16. Banten	3 395 883 044	4 118 551 716	4 899 125 741	5 133 482 400	
17. Bali	2 042 091 096	2 529 976 146	2 920 416 698	2 840 927 951	
18. Nusa Tenggara Barat	745 979 811	858 454 205	1 115 060 397	1 256 936 903	
19. Nusa Tenggara Timur	459 657 187	528 832 134	763 337 478	829 811 062	
20. Kalimantan Barat	1 164 425 412	1 347 396 425	1 621 610 891	2 166 920 791	
21. Kalimantan Tengah	945 362 708	1 093 821 486	1 253 708 122	1 399 867 368	
22. Kalimantan Selatan	2 517 518 566	2 502 279 216	2 898 704 954	3 001 297 216	
23. Kalimantan Timur	5 409 949 386	5 885 262 004	6 663 113 275	5 545 993 570	
24. Kalimantan Utara	0	0	11 833 885	349 246 995	
25. Sulawesi Utara	633 650 533	789 631 755	937 681 927	1 028 490 800	
26. Sulawesi Tengah	605 821 437	662 226 616	824 611 352	883 321 883	
27. Sulawesi Selatan	2 198 776 396	2 560 045 632	3 029 122 239	3 380 993 212	
28. Sulawesi Tenggara	439 184 125	514 857 030	599 942 751	533 101 637	
29. Gorontalo	180 039 376	214 684 375	281 920 210	318 172 268	
30. Sulawesi Barat	140 396 940	154 131 860	223 704 906	239 795 819	
31. Maluku	267 502 524	304 364 506	425 425 608	603 458 017	
32. Maluku Utara	115 905 322	165 886 908	203 059 698	248 646 493	
33. Papua Barat	175 450 133	236 282 890	306 674 697	289 969 200	
34. Papua	623 162 648	597 707 375	944 929 692	882 299 190	
JUMLAH/TOTAL	86 541 912 951	101 596 400 437	121 450 818 035	136 355 998 144	

*) Data APBD

**REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah),
2012-2015**
**ACTUAL LOCAL INCOME TAXES OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	687 476 817	752 846 745	1 030 679 175	1 147 306 353
2.	Sumatera Utara	3 636 074 646	3 685 437 788	4 054 634 671	4 743 736 526
3.	Sumatera Barat	994 570 032	1 085 164 285	1 354 541 147	1 395 115 224
4.	R i a u	2 058 595 751	2 110 997 530	2 496 771 206	2 924 923 047
5.	J a m b i	808 258 461	841 884 452	1 010 560 585	1 019 755 850
6.	Sumatera Selatan	1 803 818 849	1 882 596 916	2 267 779 726	2 530 928 661
7.	Bengkulu	370 247 703	394 141 932	483 711 051	496 996 347
8.	Lampung	1 465 711 124	1 547 336 215	1 946 452 924	2 122 600 000
9.	Bangka Belitung	396 527 427	447 462 199	508 262 616	517 786 493
10.	Kepulauan Riau	685 601 565	852 188 093	1 006 068 104	1 078 250 000
11.	DKI Jakarta	17 721 493 016	23 370 213 237	27 050 949 024	36 079 102 000
12.	Jawa Barat	9 149 214 330	11 236 145 855	13 753 760 403	14 942 465 917
13.	Jawa Tengah	5 590 597 156	6 716 170 095	8 213 117 978	10 266 079 853
14.	D I Yogyakarta	871 630 605	1 063 314 118	1 291 664 421	1 296 531 744
15.	Jawa Timur	7 816 590 831	9 404 934 972	11 517 684 924	12 591 000 000
16.	Banten	3 257 728 615	3 943 816 592	4 624 337 476	4 944 467 880
17.	B a l i	1 813 341 219	2 202 392 551	2 517 432 372	2 583 385 033
18.	Nusa Tenggara Barat	580 615 755	697 834 322	904 783 591	1 007 154 427
19.	Nusa Tenggara Timur	315 287 237	363 720 612	559 803 346	636 726 117
20.	Kalimantan Barat	986 813 358	1 129 549 657	1 343 346 494	1 945 759 554
21.	Kalimantan Tengah	836 503 945	973 244 830	1 087 630 498	1 262 556 240
22.	Kalimantan Selatan	2 199 594 030	2 136 882 989	2 395 925 506	2 648 326 199
23.	Kalimantan Timur	4 486 404 585	4 929 791 599	5 429 125 999	4 669 869 000
24.	Kalimantan Utara	0	0	0	346 246 995
25.	Sulawesi Utara	554 846 121	667 921 447	785 141 595	911 161 600
26.	Sulawesi Tengah	494 753 016	555 077 910	663 633 353	786 211 296
27.	Sulawesi Selatan	1 949 194 027	2 253 427 933	2 667 266 553	3 044 546 191
28.	Sulawesi Tenggara	336 932 584	408 107 144	457 838 380	405 603 271
29.	Gorontalo	168 068 662	200 883 464	247 137 061	298 220 946
30.	Sulawesi Barat	119 939 739	132 801 331	196 874 903	216 196 519
31.	M a l u k u	204 292 148	217 800 853	279 566 231	407 189 258
32.	Maluku Utara	91 735 153	137 782 856	145 451 712	169 135 747
33.	Papua Barat	142 529 273	184 122 827	229 610 362	231 288 200
34.	P a p u a	401 691 994	453 677 291	566 062 615	659 441 989
JUMLAH/TOTAL		72 996 679 774	86 979 670 640	103 087 606 002	120 326 064 477

*) Data APBD

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI RETRIBUSI DAERAH SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2012-2015
TABEL 3.1.2 ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM RETRIBUTIONS THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	6 317 974	6 346 062	3 701 217	4 900 000
2.	Sumatera Utara	33 494 628	79 173 619	78 497 614	83 519 774
3.	Sumatera Barat	38 054 666	34 595 713	16 751 318	14 387 677
4.	R i a u	12 174 266	24 359 497	16 992 124	24 369 294
5.	J a m b i	12 053 725	15 363 759	14 587 181	18 144 020
6.	Sumatera Selatan	13 376 825	16 522 296	11 422 670	13 495 184
7.	Bengkulu	7 655 853	12 326 203	4 625 281	4 194 888
8.	Lampung	8 209 834	8 672 979	9 253 336	8 014 153
9.	Bangka Belitung	3 689 016	5 327 341	9 357 404	6 139 822
10.	Kepulauan Riau	5 352 202	13 413 198	2 713 029	8 465 000
11.	DKI Jakarta	1 820 435 448	333 787 344	515 162 936	600 000 000
12.	Jawa Barat	57 326 324	63 654 936	70 081 405	62 037 467
13.	Jawa Tengah	68 250 252	69 970 596	79 475 022	84 022 367
14.	D I Yogyakarta	34 115 158	38 043 014	44 595 095	40 376 418
15.	Jawa Timur	118 823 638	105 580 782	148 638 032	136 337 487
16.	Banten	6 418 728	13 669 634	30 734 862	41 827 000
17.	B a l i	50 545 903	32 012 802	71 324 628	37 393 205
18.	Nusa Tenggara Barat	10 129 108	12 917 378	19 838 517	16 264 406
19.	Nusa Tenggara Timur	9 850 009	8 589 942	18 408 844	34 149 935
20.	Kalimantan Barat	89 055 036	108 076 248	166 639 948	119 376 119
21.	Kalimantan Tengah	6 963 110	7 371 574	9 065 199	9 623 378
22.	Kalimantan Selatan	9 275 042	20 534 550	20 001 837	20 152 379
23.	Kalimantan Timur	22 495 632	33 676 707	15 494 253	12 204 020
24.	Kalimantan Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Utara	14 790 121	25 269 651	34 468 180	39 679 200
26.	Sulawesi Tengah	3 123 783	3 622 024	4 326 901	3 399 989
27.	Sulawesi Selatan	113 058 779	60 528 671	94 595 827	89 851 070
28.	Sulawesi Tenggara	19 160 705	24 471 159	18 244 034	18 335 522
29.	Gorontalo	88 420	571 212	1 967 050	2 175 000
30.	Sulawesi Barat	1 422 265	2 326 506	4 031 227	4 141 800
31.	M a l u k u	25 576 587	43 994 598	70 162 844	66 406 956
32.	Maluku Utara	7 201 989	16 604 423	41 852 324	47 240 121
33.	Papua Barat	1 420 766	1 944 900	1 206 600	1 545 000
34.	P a p u a	15 773 347	24 524 172	57 091 739	59 670 440
JUMLAH/TOTAL		2 645 679 139	1 267 843 490	1 705 308 478	1 731 839 091

*) Data APBD

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SELURUH

TABEL 3.1.3

TABLE 3.1.3
ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM INCOME OF REGIONAL GOVERNMENT CORPORATE AND MANAGEMENT OF SEPARATED REGIONAL GOVERNMENT WEALTH THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiah), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	96 317 228	123 628 755	134 013 450	142 500 000	
2. Sumatera Utara	263 801 190	229 337 171	156 330 873	282 309 000	
3. Sumatera Barat	80 348 993	93 871 535	94 207 475	68 569 316	
4. Riau	139 601 792	146 463 620	154 214 508	208 544 824	
5. Jambi	29 984 606	26 879 028	32 219 309	50 020 000	
6. Sumatera Selatan	85 892 644	59 352 769	30 668 098	145 941 418	
7. Bengkulu	7 636 009	12 069 161	17 080 376	16 652 096	
8. Lampung	21 270 704	25 144 919	25 462 865	25 838 906	
9. Bangka Belitung	7 193 086	5 390 252	1 025 926	7 500 000	
10. Kepulauan Riau	0	2 559 183	0	0	
11. DKI Jakarta	351 823 211	397 234 722	465 979 963	600 000 000	
12. Jawa Barat	232 647 377	261 601 089	304 380 445	277 345 935	
13. Jawa Tengah	238 231 933	263 267 978	291 844 276	319 188 988	
14. DI Yogyakarta	35 492 533	40 817 517	48 247 880	55 978 162	
15. Jawa Timur	352 899 912	332 020 395	342 920 270	351 344 506	
16. Banten	32 293 949	38 331 096	42 421 275	40 900 000	
17. Bali	76 701 656	106 105 514	89 747 348	87 040 110	
18. Nusa Tenggara Barat	53 821 736	52 715 118	55 670 167	56 646 030	
19. Nusa Tenggara Timur	42 740 305	53 317 241	63 445 963	75 770 160	
20. Kalimantan Barat	47 620 148	55 010 160	62 865 346	65 648 568	
21. Kalimantan Tengah	22 159 324	25 298 652	29 760 680	30 000 000	
22. Kalimantan Selatan	42 309 263	916 252	1 116 058	39 275 500	
23. Kalimantan Timur	208 293 801	291 684 072	309 599 926	281 184 550	
24. Kalimantan Utara	0	0	0	0	
25. Sulawesi Utara	24 433 971	33 010 612	29 410 022	30 000 000	
26. Sulawesi Tengah	5 474 894	8 170 067	9 548 970	12 259 077	
27. Sulawesi Selatan	67 557 465	71 057 299	74 599 105	80 227 283	
28. Sulawesi Tenggara	25 046 620	23 843 795	23 315 540	24 000 000	
29. Gorontalo	0	0	1 946 292	4 000 000	
30. Sulawesi Barat	0	530 814	1 175 246	1 175 000	
31. Maluku	19 133 252	19 311 339	31 317 239	69 001 900	
32. Maluku Utara	73 140	170 360	634 494	634 493	
33. Papua Barat	8 809 755	13 020 674	14 364 750	20 000 000	
34. Papua	22 598 926	25 792 803	32 942 178	15 898 578	
JUMLAH/TOTAL	2 642 209 423	2 837 923 962	2 972 476 313	3 485 394 400	

*) Data APBD

TABEL 3.1.4 REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI LAIN-LAIN P.A.D. YANG SAH
 SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2012-2015
*ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOV. FROM OTHER ORIGINAL PROVINCIAL GOV.
 REVENUE THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015*

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	111 608 357	442 613 529	562 736 998	588 407 406	
2. Sumatera Utara	118 734 427	97 337 309	127 348 707	148 102 875	
3. Sumatera Barat	112 492 332	152 546 569	263 722 344	276 615 168	
4. Riau	378 316 636	443 803 266	577 109 907	498 523 733	
5. Jambi	145 525 816	179 794 826	223 872 398	130 205 199	
6. Sumatera Selatan	98 651 071	63 224 806	98 034 745	94 601 643	
7. Bengkulu	98 228 710	106 670 639	166 647 760	177 190 489	
8. Lampung	192 509 537	190 143 822	293 516 448	185 158 531	
9. Bangka Belitung	30 964 044	37 616 283	44 282 891	44 295 751	
10. Kepulauan Riau	32 100 193	39 821 565	61 427 156	41 030 000	
11. DKI Jakarta	2 147 049 773	2 750 957 150	3 242 123 963	3 076 751 088	
12. Jawa Barat	543 729 384	798 707 990	909 931 057	569 353 545	
13. Jawa Tengah	732 228 669	1 163 391 972	1 331 920 955	1 027 531 035	
14. DI Yogyakarta	62 824 830	73 928 101	80 097 558	60 326 907	
15. Jawa Timur	1 437 313 188	1 753 840 466	2 432 973 294	1 692 457 282	
16. Banten	99 441 752	122 734 394	201 632 128	106 287 520	
17. Bali	101 502 318	189 465 279	241 912 350	133 109 603	
18. Nusa Tenggara Barat	101 413 212	94 987 387	134 768 122	176 872 040	
19. Nusa Tenggara Timur	91 779 636	103 204 339	121 679 325	83 164 850	
20. Kalimantan Barat	40 936 870	54 760 360	48 759 103	36 136 550	
21. Kalimantan Tengah	79 736 329	87 906 430	127 251 745	97 687 750	
22. Kalimantan Selatan	266 340 231	343 945 425	481 661 553	293 543 138	
23. Kalimantan Timur	692 755 368	630 109 626	908 893 097	582 736 000	
24. Kalimantan Utara	0	0	11 833 885	3 000 000	
25. Sulawesi Utara	39 580 320	63 430 045	88 662 130	47 650 000	
26. Sulawesi Tengah	102 469 744	95 356 615	147 102 128	81 451 521	
27. Sulawesi Selatan	68 966 125	175 031 729	192 660 754	166 368 668	
28. Sulawesi Tenggara	58 044 216	58 434 932	100 544 797	85 162 844	
29. Gorontalo	11 882 294	13 229 699	30 869 807	13 776 322	
30. Sulawesi Barat	19 034 936	18 473 209	21 623 530	18 282 500	
31. Maluku	18 500 537	23 257 716	44 379 294	60 859 903	
32. Maluku Utara	16 895 040	11 329 269	15 121 168	31 636 132	
33. Papua Barat	22 690 339	37 194 489	61 492 985	37 136 000	
34. Papua	183 098 381	93 713 109	288 833 160	147 288 183	
JUMLAH/TOTAL	8 257 344 615	10 510 962 345	13 685 427 242	10 812 700 176	

*) Data APBD

TABEL 3.2 REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI DANA PERIMBANGAN SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 3.2 ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM BALANCED BUDGET THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 334 800 286	2 675 448 212	2 551 683 310	1 659 438 446
2.	Sumatera Utara	1 605 181 560	1 710 602 556	1 812 638 981	1 838 572 482
3.	Sumatera Barat	1 143 895 852	1 240 879 867	1 333 059 018	1 441 568 251
4.	R i a u	3 618 842 731	3 610 182 230	4 231 808 634	4 196 336 985
5.	J a m b i	1 332 579 087	1 489 852 560	1 514 518 389	1 713 020 175
6.	Sumatera Selatan	2 378 798 651	2 649 216 454	2 982 866 001	3 262 707 213
7.	Bengkulu	882 996 673	977 347 954	1 104 582 676	1 225 693 875
8.	Lampung	1 280 851 522	1 384 043 537	1 472 486 569	1 579 395 052
9.	Bangka Belitung	821 499 996	907 835 915	1 025 142 797	1 147 712 494
10.	Kepulauan Riau	1 594 446 909	1 753 710 493	1 664 959 883	1 860 047 273
11.	DKI Jakarta	11 554 964 808	9 387 539 402	9 677 533 225	12 760 465 925
12.	Jawa Barat	2 832 746 609	2 950 532 546	3 260 505 636	2 528 916 818
13.	Jawa Tengah	2 318 806 100	2 467 814 629	2 542 626 745	2 694 385 621
14.	D I Yogyakarta	894 544 325	957 561 851	1 013 811 390	1 046 869 045
15.	Jawa Timur	3 069 016 102	2 919 371 008	3 485 336 764	4 345 684 182
16.	Banten	1 015 105 168	1 126 004 172	1 159 872 633	1 122 953 698
17.	B a l i	908 371 147	980 714 800	1 018 431 009	1 025 947 167
18.	Nusa Tenggara Barat	1 054 470 183	1 075 004 986	1 212 086 447	1 305 287 245
19.	Nusa Tenggara Timur	1 098 619 869	1 165 848 623	1 282 745 347	1 481 037 037
20.	Kalimantan Barat	1 249 834 007	1 382 042 462	1 531 868 903	1 687 980 742
21.	Kalimantan Tengah	1 296 011 128	1 442 477 674	1 557 416 499	1 711 928 503
22.	Kalimantan Selatan	1 534 463 778	1 505 123 319	1 523 714 616	1 417 991 006
23.	Kalimantan Timur	6 071 586 086	5 335 759 150	4 253 320 982	2 624 018 350
24.	Kalimantan Utara	0	0	1 228 625 713	1 003 004 752
25.	Sulawesi Utara	933 366 697	1 029 942 557	1 093 949 318	1 191 740 699
26.	Sulawesi Tengah	1 042 926 565	1 160 797 527	1 239 776 947	1 439 007 125
27.	Sulawesi Selatan	1 349 192 581	1 422 165 817	1 531 386 241	1 530 716 897
28.	Sulawesi Tenggara	1 020 125 146	1 160 895 854	1 236 016 579	1 321 756 467
29.	Gorontalo	637 007 089	722 098 488	800 313 829	936 274 443
30.	Sulawesi Barat	671 146 618	772 106 138	857 098 935	992 140 187
31.	M a l u k u	959 240 295	1 026 829 361	1 165 471 924	1 400 504 593
32.	Maluku Utara	858 295 011	940 667 169	1 089 674 339	1 309 937 956
33.	Papua Barat	1 516 156 701	2 992 755 350	2 783 645 235	3 034 151 452
34.	P a p u a	2 118 450 110	2 511 020 686	2 643 812 997	3 457 230 338
JUMLAH/TOTAL		61 998 339 390	64 834 193 347	68 882 788 511	73 294 422 494

*) Data APBD

TABEL 3.2.1 REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 3.2.1 ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM TAX SHARES THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	251 127 885	254 514 663	77 430 824	274 769 551
2.	Sumatera Utara	451 848 733	424 244 826	380 468 139	460 776 895
3.	Sumatera Barat	183 066 225	131 404 781	132 678 673	145 582 469
4.	R i a u	502 497 680	618 581 036	668 492 187	559 669 579
5.	J a m b i	217 355 132	246 548 942	194 972 088	251 045 177
6.	Sumatera Selatan	490 241 630	572 654 634	548 897 750	497 915 042
7.	Bengkulu	61 848 269	53 933 686	50 653 058	52 282 428
8.	Lampung	164 927 667	145 424 014	142 641 117	131 447 701
9.	Bangka Belitung	63 591 599	60 622 259	52 839 392	54 983 955
10.	Kepulauan Riau	199 561 150	198 090 541	203 987 983	242 313 505
11.	DKI Jakarta	10 984 787 700	8 863 205 864	9 279 068 989	12 659 962 912
12.	Jawa Barat	1 199 350 816	1 026 017 163	1 076 897 693	873 581 024
13.	Jawa Tengah	610 215 375	583 478 946	490 753 590	650 875 594
14.	D I Yogyakarta	112 691 591	89 148 689	70 324 850	80 502 169
15.	Jawa Timur	1 507 072 635	1 134 478 292	1 123 170 491	1 236 834 603
16.	Banten	451 137 610	494 140 096	415 270 933	455 310 674
17.	B a l i	180 266 157	131 057 469	144 532 786	149 853 189
18.	Nusa Tenggara Barat	169 222 739	148 645 947	149 750 882	152 984 035
19.	Nusa Tenggara Timur	100 345 548	83 417 371	74 913 781	89 685 140
20.	Kalimantan Barat	154 586 920	131 778 562	127 364 266	149 417 478
21.	Kalimantan Tengah	163 501 928	169 674 606	144 812 235	159 817 408
22.	Kalimantan Selatan	196 743 601	195 943 995	171 176 951	159 000 000
23.	Kalimantan Timur	715 648 111	825 858 411	662 727 209	668 000 000
24.	Kalimantan Utara	0	0	104 848 110	131 569 861
25.	Sulawesi Utara	92 316 876	84 261 033	69 660 411	78 728 000
26.	Sulawesi Tengah	83 175 645	81 976 567	62 083 121	78 262 293
27.	Sulawesi Selatan	299 680 577	256 812 149	218 129 274	247 991 298
28.	Sulawesi Tenggara	69 714 283	67 214 668	62 477 343	27 476 090
29.	Gorontalo	30 667 268	26 408 286	22 554 272	28 031 074
30.	Sulawesi Barat	43 462 087	39 214 271	27 843 302	11 532 482
31.	M a l u k u	82 945 042	72 694 999	66 624 446	121 873 039
32.	Maluku Utara	66 657 071	50 805 123	44 229 087	58 194 166
33.	Papua Barat	191 649 305	232 101 384	175 115 617	271 712 574
34.	P a p u a	311 768 070	287 065 667	244 216 931	288 079 783
JUMLAH/TOTAL		20 403 672 925	17 781 418 940	17 481 607 781	21 500 061 188

*) Data APBD

**REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM PEMERINTAH
PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2012-2015**
TABEL 3.2.2 *ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM NON TAX SHARES / NATURAL
RESOURCES THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015*

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	122 177 984	1 253 339 521	1 199 685 909	58 191 339	
2. Sumatera Utara	8 315 200	8 088 878	23 310 178	28 663 311	
3. Sumatera Barat	9 768 542	5 610 600	16 385 839	12 126 076	
4. Riau	2 564 673 767	2 226 231 958	2 698 594 353	2 903 245 156	
5. Jambi	350 162 175	353 397 070	321 853 079	414 397 115	
6. Sumatera Selatan	1 127 002 330	1 180 856 653	1 385 670 591	1 709 844 091	
7. Bengkulu	17 216 628	17 179 110	44 907 411	63 437 427	
8. Lampung	145 696 928	117 848 110	144 940 791	206 240 038	
9. Bangka Belitung	98 684 932	85 902 968	122 110 799	139 396 326	
10. Kepulauan Riau	910 862 352	862 879 432	721 284 492	879 252 847	
11. DKI Jakarta	294 849 251	225 151 072	312 478 954	100 503 013	
12. Jawa Barat	315 078 753	371 990 322	417 706 527	328 051 409	
13. Jawa Tengah	141 067 324	130 953 804	168 776 726	181 606 198	
14. DI Yogyakarta	5 743 298	5 582 494	6 431 380	6 738 114	
15. Jawa Timur	16 892 271	240 250 663	393 742 118	1 455 548 682	
16. Banten	3 446 980	4 181 762	3 573 210	5 675 711	
17. Bali	0	13 456 075	0	0	
18. Nusa Tenggara Barat	22 303 389	9 598 323	27 281 795	33 926 020	
19. Nusa Tenggara Timur	538 607	616 889	1 908 066	5 415 632	
20. Kalimantan Barat	28 104 240	31 378 670	51 092 301	47 384 895	
21. Kalimantan Tengah	131 068 852	146 986 818	198 245 696	198 989 287	
22. Kalimantan Selatan	646 336 615	584 114 343	596 622 189	493 375 000	
23. Kalimantan Timur	5 268 684 084	4 446 313 563	3 532 243 333	1 890 054 485	
24. Kalimantan Utara	0	0	1 094 988 347	160 239 643	
25. Sulawesi Utara	6 975 400	5 651 107	14 761 225	19 172 000	
26. Sulawesi Tengah	14 426 121	18 212 925	25 866 332	65 155 677	
27. Sulawesi Selatan	9 797 950	11 317 890	30 681 746	24 357 442	
28. Sulawesi Tenggara	45 493 192	59 378 675	61 153 215	44 362 850	
29. Gorontalo	191 189	392 411	1 106 059	2 504 718	
30. Sulawesi Barat	217 890	377 275	2 455 801	24 581 422	
31. Maluku	8 741 099	3 052 290	9 009 006	14 234 880	
32. Maluku Utara	50 620 895	47 582 504	64 198 612	75 957 780	
33. Papua Barat	384 475 833	1 630 850 129	1 425 049 229	1 402 481 153	
34. Papua	130 708 426	200 789 929	287 888 085	430 914 337	
JUMLAH/TOTAL	12 880 322 497	14 299 514 233	15 406 003 394	13 426 024 074	

*) Data APBD

TABEL 3.2.3 REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 3.2.3 ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM GENERAL ALLOCATION FUNDS THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	911 080 707	1 092 445 518	1 201 612 787	1 237 894 986
2.	Sumatera Utara	1 103 389 237	1 223 445 404	1 349 132 276	1 349 132 276
3.	Sumatera Barat	918 560 365	1 039 922 511	1 129 886 306	1 221 128 606
4.	R i a u	489 179 914	726 630 916	820 984 584	654 220 250
5.	J a m b i	731 952 242	836 578 062	948 337 712	995 754 598
6.	Sumatera Selatan	716 153 261	870 516 767	985 542 760	985 542 760
7.	Bengkulu	775 311 166	854 647 828	955 095 187	1 046 080 820
8.	Lampung	939 139 287	1 060 663 183	1 136 053 041	1 192 855 693
9.	Bangka Belitung	634 087 815	717 140 118	806 820 146	897 887 443
10.	Kepulauan Riau	460 857 807	656 067 610	698 009 318	695 943 711
11.	DKI Jakarta	275 327 857	299 182 466	85 985 282	0
12.	Jawa Barat	1 269 960 760	1 472 453 011	1 687 686 386	1 303 654 355
13.	Jawa Tengah	1 516 892 951	1 670 859 369	1 803 931 189	1 803 931 189
14.	D I Yogyakarta	757 056 696	828 334 768	899 923 550	920 544 722
15.	Jawa Timur	1 491 561 136	1 496 594 268	1 866 548 185	1 587 261 707
16.	Banten	530 833 378	617 081 101	728 490 012	640 981 003
17.	B a l i	694 079 080	792 365 876	832 297 473	831 597 268
18.	Nusa Tenggara Barat	809 617 715	859 353 026	980 390 340	1 063 713 760
19.	Nusa Tenggara Timur	940 646 764	1 003 991 703	1 131 687 590	1 300 445 875
20.	Kalimantan Barat	1 023 229 807	1 144 712 840	1 290 222 856	1 405 594 169
21.	Kalimantan Tengah	951 256 068	1 062 516 940	1 152 428 738	1 280 595 848
22.	Kalimantan Selatan	652 535 312	683 511 441	701 725 536	701 725 536
23.	Kalimantan Timur	52 637 761	55 539 336	57 312 515	57 312 515
24.	Kalimantan Utara	0	0	20 567 986	651 247 428
25.	Sulawesi Utara	790 534 491	885 684 277	949 852 622	1 026 948 809
26.	Sulawesi Tengah	902 087 729	994 658 685	1 087 885 014	1 221 602 865
27.	Sulawesi Selatan	996 939 584	1 089 771 438	1 209 598 741	1 180 010 167
28.	Sulawesi Tenggara	870 257 871	981 035 741	1 053 636 011	1 176 423 577
29.	Gorontalo	582 140 302	652 284 261	734 279 438	845 395 651
30.	Sulawesi Barat	590 680 361	685 497 592	776 214 122	895 580 933
31.	M a l u k u	829 491 474	897 657 192	1 019 704 312	1 177 774 674
32.	Maluku Utara	703 159 025	772 591 162	906 623 550	1 061 177 950
33.	Papua Barat	901 398 453	1 064 872 637	1 122 264 659	1 284 079 945
34.	P a p u a	1 569 782 444	1 889 267 850	1 991 202 341	2 277 932 698
JUMLAH/TOTAL		27 381 818 820	30 977 874 897	34 121 932 565	35 971 973 787

*) Data APBD

**REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2012-2015**
**TABEL 3.2.4 ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM SPECIAL ALLOCATION FUNDS
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh		50 413 710	75 148 510	72 953 790	88 582 570
2. Sumatera Utara		41 628 390	54 823 448	59 728 388	0
3. Sumatera Barat		32 500 720	63 941 975	54 108 200	62 731 100
4. Riau		62 491 370	38 738 320	43 737 510	79 202 000
5. Jambi		33 109 538	53 328 486	49 355 510	51 823 285
6. Sumatera Selatan		45 401 430	25 188 400	62 754 900	69 405 320
7. Bengkulu		28 620 610	51 587 330	53 927 020	63 893 200
8. Lampung		31 087 640	60 108 230	48 851 620	48 851 620
9. Bangka Belitung		25 135 650	44 170 570	43 372 460	55 444 770
10. Kepulauan Riau		23 165 600	36 672 910	41 678 090	42 537 210
11. DKI Jakarta		0	0	0	0
12. Jawa Barat		48 356 280	80 072 050	78 215 030	23 630 030
13. Jawa Tengah		50 630 450	82 522 510	79 165 240	57 972 640
14. DI Yogyakarta		19 052 740	34 495 900	37 131 610	39 084 040
15. Jawa Timur		53 490 060	48 047 785	101 875 970	66 039 190
16. Banten		29 687 200	10 601 213	12 538 478	20 986 310
17. Bali		34 025 910	43 835 380	41 600 750	44 496 710
18. Nusa Tenggara Barat		53 326 340	57 407 690	54 663 430	54 663 430
19. Nusa Tenggara Timur		57 088 950	77 822 660	74 235 910	85 490 390
20. Kalimantan Barat		43 913 040	74 172 390	63 189 480	85 584 200
21. Kalimantan Tengah		50 184 280	63 299 310	61 929 830	72 525 960
22. Kalimantan Selatan		38 848 250	41 553 540	54 189 940	63 890 470
23. Kalimantan Timur		34 616 130	8 047 840	1 037 925	8 651 350
24. Kalimantan Utara		0	0	8 221 270	59 947 820
25. Sulawesi Utara		43 539 930	54 346 140	59 675 060	66 891 890
26. Sulawesi Tengah		43 237 070	65 949 350	63 942 480	73 986 290
27. Sulawesi Selatan		42 774 470	64 264 340	72 976 480	78 357 990
28. Sulawesi Tenggara		34 659 800	53 266 770	58 750 010	73 493 950
29. Gorontalo		24 008 330	43 013 530	42 374 060	60 343 000
30. Sulawesi Barat		36 786 280	47 017 000	50 585 710	60 445 350
31. Maluku Utara		38 062 680	53 424 880	70 134 160	86 622 000
32. Maluku Utara		37 858 020	69 688 380	74 623 090	114 608 060
33. Papua Barat		38 633 110	64 931 200	61 215 730	75 877 780
34. Papua		106 191 170	133 897 240	120 505 640	460 303 520
JUMLAH/TOTAL		1 332 525 148	1 775 385 277	1 873 244 771	2 396 363 445

*) Data APBD

REALISASI PENDAPATAN LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 3.3 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 3.3 ACTUAL OTHER LEGAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	6 943 622 386	6 670 943 217	7 323 510 565	8 468 190 578	
2. Sumatera Utara	1 544 552 842	1 596 098 329	1 542 578 307	1 578 596 637	
3. Sumatera Barat	553 220 265	540 782 390	573 556 459	755 909 160	
4. Riau	639 784 644	658 840 062	655 513 513	868 876 400	
5. Jambi	326 292 542	332 530 443	369 297 931	362 105 554	
6. Sumatera Selatan	843 346 041	797 226 450	846 596 523	1 146 028 518	
7. Bengkulu	195 760 447	193 814 032	209 591 850	283 466 926	
8. Lampung	773 451 562	746 609 142	779 360 150	776 684 056	
9. Bangka Belitung	125 063 816	125 479 292	131 522 785	179 626 400	
10. Kepulauan Riau	155 910 740	182 025 258	184 017 160	239 163 000	
11. DKI Jakarta	1 783 413 796	3 277 812 157	2 872 551 450	7 326 419 771	
12. Jawa Barat	4 062 464 971	3 926 968 894	4 012 294 085	5 534 365 714	
13. Jawa Tengah	2 746 365 589	2 662 743 057	2 698 475 028	2 706 478 470	
14. DI Yogyakarta	273 126 857	409 392 163	661 455 536	924 193 734	
15. Jawa Timur	2 748 395 878	2 857 020 921	2 844 930 590	3 746 714 308	
16. Banten	1 002 716 972	985 673 926	1 009 434 538	1 388 197 600	
17. Bali	682 671 342	598 686 858	638 830 684	741 733 600	
18. Nusa Tenggara Barat	442 367 135	446 134 510	462 280 398	477 763 404	
19. Nusa Tenggara Timur	683 264 995	698 389 683	741 505 872	971 816 935	
20. Kalimantan Barat	518 653 402	532 875 213	566 290 317	716 099 400	
21. Kalimantan Tengah	272 657 453	272 796 979	318 570 125	351 804 129	
22. Kalimantan Selatan	329 628 135	343 407 921	370 745 061	474 579 416	
23. Kalimantan Timur	404 935 033	410 675 898	369 393 935	366 201 430	
24. Kalimantan Utara	0	0	272 893 280	212 799 800	
25. Sulawesi Utara	267 891 058	242 508 778	289 179 538	337 324 000	
26. Sulawesi Tengah	313 645 165	309 910 862	375 838 517	445 926 456	
27. Sulawesi Selatan	885 994 043	885 381 161	942 652 926	1 258 467 945	
28. Sulawesi Tenggara	352 675 057	296 806 997	353 600 428	408 178 800	
29. Gorontalo	116 123 470	115 842 912	126 815 450	165 403 800	
30. Sulawesi Barat	147 486 011	147 622 197	159 438 150	206 179 500	
31. Maluku	209 902 388	214 270 809	232 132 491	293 243 400	
32. Maluku Utara	222 546 023	209 345 039	215 843 636	269 343 200	
33. Papua Barat	2 181 781 583	2 408 658 394	2 672 028 269	2 776 420 691	
34. Papua	4 720 432 216	5 252 411 330	7 121 076 261	7 648 066 280	
JUMLAH/TOTAL	37 470 143 857	39 349 685 274	42 943 801 808	54 406 369 012	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 3.B (ribu rupiah), 2012-2015
ACTUAL FINANCING RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	1 508 840 609	1 968 699 122	1 399 323 697	898 705 783	
2. Sumatera Utara	720 866 154	14 107 542	51 426 062	5 105 000	
3. Sumatera Barat	361 250 283	276 750 267	240 276 961	220 000 000	
4. Riau	1 906 680 479	1 978 312 715	1 451 086 907	1 962 400 000	
5. Jambi	632 401 128	690 767 077	514 103 467	219 909 958	
6. Sumatera Selatan	477 175 785	521 334 563	10 179 492	110 000 000	
7. Bengkulu	197 339 471	241 356 037	210 176 309	71 052 751	
8. Lampung	117 688 684	23 710 615	41 141 205	26 000 000	
9. Bangka Belitung	242 123 559	285 022 225	201 966 080	227 501 517	
10. Kepulauan Riau	290 737 799	514 289 374	538 524 513	458 500 000	
11. DKI Jakarta	6 475 552 012	9 463 721 531	7 593 994 776	8 843 683 216	
12. Jawa Barat	3 003 186 559	2 934 630 844	3 586 471 831	1 400 000 000	
13. Jawa Tengah	707 735 960	1 306 017 472	1 689 438 285	450 000 000	
14. DI Yogyakarta	293 608 593	403 200 659	389 527 178	281 988 867	
15. Jawa Timur	1 359 475 042	1 753 509 144	1 846 787 127	1 193 115 371	
16. Banten	374 844 507	450 814 202	1 069 804 863	1 325 000 000	
17. Bali	787 311 641	899 202 574	1 039 709 937	580 856 381	
18. Nusa Tenggara Barat	17 713 224	28 134 779	13 828 458	11 650 000	
19. Nusa Tenggara Timur	188 710 799	245 944 915	235 104 724	61 161 306	
20. Kalimantan Barat	383 302 411	222 258 326	127 744 740	75 000 000	
21. Kalimantan Tengah	451 605 920	559 334 316	386 719 707	243 464 715	
22. Kalimantan Selatan	933 954 408	1 203 925 399	863 395 088	566 000 000	
23. Kalimantan Timur	2 837 723 895	3 198 903 975	1 050 356 119	800 000 000	
24. Kalimantan Utara	0	0	313 461 401	799 572 065	
25. Sulawesi Utara	189 114 090	252 914 032	249 382 344	109 233 605	
26. Sulawesi Tengah	209 216 673	147 788 886	147 909 346	76 138 677	
27. Sulawesi Selatan	212 338 656	149 803 013	339 681 251	132 932 844	
28. Sulawesi Tenggara	23 590 982	203 679 670	331 004 017	150 505 134	
29. Gorontalo	63 968 779	101 032 865	92 443 365	58 881 561	
30. Sulawesi Barat	19 000 000	101 379 671	129 254 556	68 310 487	
31. Maluku	78 105 094	149 438 146	89 519 602	66 239 687	
32. Maluku Utara	199 701 142	125 225 151	24 141 586	116 455 591	
33. Papua Barat	398 118 932	372 575 438	1 334 408 797	746 207 071	
34. Papua	779 591 449	768 415 821	833 202 864	1 305 864 549	
JUMLAH/TOTAL	26 442 574 719	31 556 200 366	28 435 496 655	23 661 436 136	

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.

TABEL 4
TABLE

REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		101 468 624 588	109 747 735 878	123 757 692 489	151 218 153 962
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	27 208 539 791	28 592 924 382	30 925 023 835	44 550 880 391	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	25 975 172	35 990 508	45 111 554	113 436 454	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	26 641 086	25 717 306	31 757 432	981 200 000	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	33 608 704 717	35 964 403 377	33 018 207 958	37 839 617 276	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	1 402 416 897	2 267 140 617	1 640 604 334	3 404 020 538	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	20 956 233 374	22 612 403 925	31 842 794 308	36 876 519 895	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	18 004 216 615	20 047 554 907	26 086 116 602	26 771 806 992	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	235 896 936	201 600 856	168 076 466	680 672 416	
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		77 977 219 171	94 000 696 054	95 577 208 617	127 751 519 189
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	6 637 103 062	7 873 832 502	7 216 340 527	7 242 417 020	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	41 370 226 739	49 557 469 337	51 521 471 053	62 565 526 676	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	29 969 889 370	36 569 394 215	36 839 397 037	57 943 575 493	
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		33 007 127 158	33 588 047 492	42 380 330 565	8 748 552 635
JUMLAH/TOTAL		212 452 970 917	237 336 479 424	261 715 231 671	287 718 225 786

*) Data APBD

TABEL 4.1 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MENURUT JENIS
TABLE 4.1 **PENGELUARAN (ribu rupiah), 2012-2015**
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		3 408 378 593	3 464 270 270	5 580 074 906	5 771 842 804
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		774 594 474	819 274 025	870 169 543	949 428 291
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		1 065 211 457	1 219 682 993	693 008 973	639 148 800
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		515 656 041	292 533 440	309 012 899	258 181 800
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		262 803 876	269 719 474	298 490 577	502 822 696
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		693 635 000	801 680 060	3 407 472 166	3 344 061 217
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		96 477 745	61 380 278	1 920 748	78 200 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		5 348 941 351	7 756 157 285	6 465 772 436	6 983 800 921
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		303 248 909	487 041 503	364 456 742	475 737 917
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		4 230 353 664	5 618 995 231	3 703 813 328	4 229 944 993
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		815 338 778	1 650 120 551	2 397 502 366	2 278 118 011
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		1 931 663 713	1 420 098 087	959 801 070	153 804 841
JUMLAH/TOTAL		10 688 983 657	12 640 525 642	13 005 648 412	12 909 448 566

*) Data APBD

TABEL 4.2 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 4.2 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		5 159 086 805	5 004 403 323	5 371 411 832	5 619 854 578
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	955 151 592	924 490 865	1 008 161 979	1 174 303 458	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 781 350 465	1 825 737 597	1 611 718 257	1 588 169 654	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	25 858 294	43 718 380	1 065 000	1 700 000	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	549 531 770	522 121 373	1 692 809 639	2 330 828 370	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 844 619 727	1 687 837 008	1 053 174 611	517 353 096	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 574 957	498 100	4 482 346	7 500 000	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	2 474 547 705	2 256 064 927	2 437 145 478	3 060 087 716	
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	160 000 784	167 575 793	144 540 209	188 229 202	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 510 939 323	1 327 766 717	1 146 633 041	1 477 047 248	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	803 607 598	760 722 417	1 145 972 228	1 394 811 266	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	289 070 937	151 626 064	14 897 905		0
JUMLAH/TOTAL	7 922 705 447	7 412 094 314	7 823 455 215	8 679 942 294	

*) Data APBD

TABEL 4.3 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 4.3 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 592 402 826	1 668 156 981	1 831 872 717	2 357 524 766
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	524 517 313	562 989 640	598 043 410	719 318 018	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	647 568 586	572 705 110	591 642 080	802 390 100	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	13 934 490	28 909 462	0	0	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	390 898 542	416 913 494	546 614 466	639 173 368	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	15 483 895	85 739 275	94 969 449	191 643 280	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	900 000	603 312	5 000 000	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 369 888 390	1 445 156 684	1 651 799 638	1 693 603 726
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	117 389 700	117 827 070	116 677 136	95 899 798	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	606 885 148	635 840 015	749 234 578	893 009 193	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	645 613 542	691 489 599	785 887 924	704 694 735	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		321 541 207	311 276 961	392 442 367	121 036 304
JUMLAH/TOTAL		3 283 832 423	3 424 590 626	3 876 114 722	4 172 164 796

*) Data APBD

TABEL 4.4 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELOUARAN
 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 4.4 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU BY KIND OF
 EXPENDITURE (thousand rupiah), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		3 245 053 341	3 292 872 527	3 431 470 705	4 402 191 631
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	790 433 933	877 503 081	937 258 185	1 122 745 693	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	4 999 254		0	
4. Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	1 459 570 748	1 251 675 819	751 853 825	1 070 651 842	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	20 053 500	20 887 500	13 015 000	7 177 300	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	796 726 772	874 713 339	1 614 630 539	1 159 145 279	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	178 268 388	263 093 534	114 713 156	1 032 471 517	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0	0	10 000 000	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		3 425 711 796	4 232 409 979	2 170 603 791	6 281 782 652
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	247 361 895	319 820 084	188 187 847	272 812 027	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 216 684 489	1 667 282 867	1 358 771 642	3 107 845 722	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 961 665 412	2 245 307 028	623 644 302	2 901 124 903	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		2 083 231 162	1 447 676 414	3 981 422 303	0
JUMLAH/TOTAL		8 753 996 299	8 972 958 920	9 583 496 799	10 683 974 283

*) Data APBD

TABEL 4.5 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS
TABLE 4.5 *ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAMBI BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiah), 2012-2015*

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 245 496 974	1 271 925 809	1 483 115 535	1 771 657 077
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	446 994 502	434 868 794	480 217 430	584 390 649	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	237 500	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	356 592 340	335 646 046	380 761 572	491 451 290	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	65 500 450	33 441 017	19 518 750	0	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	298 917 433	315 495 683	462 356 647	550 590 138	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	74 860 636	150 386 797	138 550 780	141 725 000	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 394 113	2 087 472	1 710 356	3 500 000	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 286 101 339	1 738 815 356	1 721 517 300	1 741 503 679
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	84 157 929	98 333 655	90 004 993	110 038 812	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	523 196 634	702 495 631	813 453 043	833 886 726	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	678 746 776	937 986 070	818 059 264	797 578 141	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		755 497 052	566 330 980	474 526 425	0
JUMLAH/TOTAL		3 287 095 365	3 577 072 145	3 679 159 260	3 513 160 756

*) Data APBD

TABEL 4.6 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 4.6 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA SELATAN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		3 194 440 679	3 683 194 508	4 010 626 533	3 573 744 695
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	618 614 096	731 001 398	752 819 177	777 044 323	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	2 606 928	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 515 320 781	2 031 305 992	1 574 378 204	1 779 951 649	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	507 000	399 597	513 384	600 000	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	500 000 000	115 227 612	268 508 790	300 000 000	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	556 429 130	804 677 610	1 413 549 040	707 436 233	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	962 744	582 299	857 938	8 712 490	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	1 866 482 043	1 995 509 103	1 760 106 497	3 035 963 930	
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	28 994 537	58 351 300	23 441 741	9 023 654	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	820 354 604	1 074 254 135	1 005 053 067	1 350 247 243	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 017 132 902	862 903 668	731 611 689	1 676 693 033	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	640 137 144	310 770 643	476 814 225	693 994 012	
JUMLAH/TOTAL	5 701 059 866	5 989 474 254	6 247 547 255	7 303 702 637	

*) Data APBD

TABEL 4.7 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS
TABLE 4.7 *ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BENGKULU BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiah), 2012-2015*

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		786 792 391	795 311 582	908 754 313	1 027 126 706
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	407 803 333	425 728 526	450 265 493	521 700 183	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	221 706 458	209 507 795	225 782 948	273 863 800	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	0	0	0	0	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	153 837 811	142 626 514	211 055 929	218 158 359	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	3 444 789	15 627 639	21 144 500	4 403 195	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	1 821 108	505 443	9 001 169	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		731 660 414	931 694 776	1 025 967 285	1 231 570 330
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	72 673 925	90 923 857	96 977 553	119 179 076	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	368 721 830	563 392 939	623 936 194	646 989 286	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	290 264 659	277 377 980	305 053 538	465 401 968	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		241 412 061	210 719 600	261 693 705	16 550 336
JUMLAH/TOTAL		1 759 864 866	1 937 725 958	2 196 415 303	2 275 247 372

*) Data APBD

TABEL 4.8 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS
TABLE 4.8 *ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAMPUNG BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiah), 2012-2015*

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 942 405 359	1 811 879 220	2 144 560 815	2 637 268 598
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	488 121 065	497 662 948	544 114 850	771 913 782	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	741 234 652	761 045 629	847 424 324	807 523 430	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	7 840 000	5 448 514	4 521 800	9 700 000	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	472 103 539	357 471 263	723 095 813	1 000 000 000	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	211 493 780	170 214 409	20 173 866	25 642 600	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	21 612 323	20 036 457	5 230 162	22 488 786	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 892 330 184	2 072 655 734	2 309 626 502	2 085 922 100
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	135 197 636	100 476 762	109 214 896	117 594 815	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	925 181 888	1 168 089 647	1 274 956 923	1 248 015 165	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	831 950 660	804 089 325	925 454 683	720 312 120	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		24 957 424	41 126 275	113 486 180	500 000
JUMLAH/TOTAL		3 859 692 967	3 925 661 229	4 567 673 497	4 723 690 698

*) Data APBD

TABEL 4.9 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 4.9 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		764 754 923	808 318 501	855 780 981	1 152 668 096
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	216 271 988	246 900 473	274 339 635	329 023 180	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	197 922 560	220 160 776	167 022 783	284 091 950	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	669 500	2 611 950	745 500	1 000 000	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	212 792 436	177 383 056	212 859 717	280 474 272	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	137 098 439	161 262 246	200 796 461	256 078 694	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0	16 885	2 000 000	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	567 283 797	801 348 925	740 305 877	977 894 381	
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	49 903 758	79 233 302	70 712 734	91 216 605	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	226 599 151	319 349 046	364 039 655	575 987 488	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	290 780 888	402 766 577	305 553 488	310 690 288	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	295 022 224	204 466 081	325 473 641		0
JUMLAH/TOTAL	1 627 060 944	1 814 133 507	1 921 560 499	2 130 562 477	

*) Data APBD

TABEL 4.10

**REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2012-2015**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KEPULAUAN RIAU BY KIND
OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 041 488 315	1 195 146 662	1 213 820 569	1 597 792 766
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		212 470 060	220 943 360	252 064 813	300 000 000
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		278 411 673	365 873 250	470 786 270	555 375 462
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		115 916 316	134 215 225	40 688 431	119 482 500
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		256 225 110	283 495 455	252 894 344	345 000 000
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		177 255 623	188 604 802	197 356 711	274 934 804
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		1 209 533	2 014 570	30 000	3 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 208 337 100	1 520 685 847	2 098 638 305	2 072 662 507
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		165 484 844	189 822 416	183 736 097	187 320 116
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		780 511 969	937 953 666	1 196 907 727	1 236 229 374
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		262 340 287	392 909 765	717 994 481	649 113 017
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		514 323 993	642 174 655	145 250 971	15 000 000
JUMLAH/TOTAL		2 764 149 408	3 358 007 164	3 457 709 845	3 685 455 273

*) Data APBD

TABEL 4.11 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS
TABLE 4.11 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY KIND OF EXPENDITURE** (*ribu rupiah*), 2012-2015
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY KIND OF EXPENDITURE (*thousand rupiahs*), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		11 673 114 294	13 148 602 086	12 631 884 602	24 760 911 186
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	9 688 176 243	10 046 180 477	10 472 324 237	19 311 408 500	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	3 172 975	2 191 752	1 218 529	46 070 053	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	940 000 000	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 933 097 204	1 999 968 587	1 462 044 387	1 681 897 940	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	15 993 940	1 044 598 130	680 155 340	2 312 852 969	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	0	0	0	0	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	30 186 259	44 286 271	14 005 707	401 179 004	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 487 673	11 376 869	2 136 402	67 502 720	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	19 885 592 605	25 152 900 311	25 167 779 696	38 889 193 814	
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 397 773 926	1 815 488 704	2 132 264 555	1 786 029 167	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	9 703 452 919	12 641 399 413	12 624 396 751	16 659 139 837	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	8 784 365 760	10 696 012 194	10 411 118 390	20 444 024 810	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	10 296 025 165	10 679 763 146	13 618 631 039	5 636 317 000	
JUMLAH/TOTAL	41 854 732 064	48 981 265 543	51 418 295 337	69 286 422 000	

*) Data APBD

TABEL 4.12 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS
TABLE 4.12 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA BARAT BY KIND OF**
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2012-2015
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		13 648 410 111	14 724 113 008	16 958 816 394	19 626 961 424
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		1 511 157 915	1 535 932 802	1 569 541 693	1 750 356 996
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		15 055	2 940 521	6 805 400	10 000 000
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		6 136 668 844	5 673 020 648	6 179 782 846	7 154 144 995
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		16 685 225	13 600 215	2 871 320	12 000 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		3 161 224 937	3 994 277 232	5 461 539 028	6 134 790 633
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		2 815 801 802	3 504 341 590	3 738 146 028	4 448 668 800
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		6 856 333	0	130 079	117 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		3 274 067 487	3 672 632 315	3 839 172 071	5 126 796 909
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		404 836 267	426 605 110	304 590 204	237 420 694
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		1 733 979 983	1 973 247 376	2 174 779 252	2 656 963 530
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		1 135 251 237	1 272 779 829	1 359 802 615	2 232 412 685
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		2 958 837 956	3 775 496 831	5 099 436 397	560 727 063
JUMLAH/TOTAL		19 881 315 554	22 172 242 154	25 897 424 862	25 314 485 396

*) Data APBD

TABEL 4.13 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS
TABLE 4.13 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TENGAH BY KIND OF EXPENDITURE** (ribu rupiah), 2012-2015
(thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		8 540 012 837	9 213 696 623	10 646 904 181	11 665 348 934
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		1 241 600 972	1 368 517 191	1 726 640 884	2 451 025 833
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		3 123 911 500	3 499 864 177	2 963 856 035	2 913 067 653
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		7 548 325	14 362 375	23 281 040	28 557 200
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		2 253 337 259	1 825 598 247	3 263 403 899	4 295 303 353
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		1 908 190 238	2 503 166 398	2 661 510 573	1 947 394 895
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		5 424 543	2 188 235	8 211 750	30 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		2 906 831 268	3 511 079 685	4 439 160 853	5 672 337 400
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		318 033 645	373 147 586	470 795 604	349 994 085
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		1 977 523 313	2 143 191 579	2 397 685 838	2 645 250 074
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		611 274 310	994 740 520	1 570 679 411	2 677 093 241
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		955 371 554	1 924 599 491	1 760 833 255	210 000 000
JUMLAH/TOTAL		12 402 215 659	14 649 375 799	16 846 898 289	17 547 686 334

*) Data APBD

TABEL 4.14 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS
TABLE 4.14 **PENGELUARAN (ribu rupiah), 2012-2015**
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DI YOGYAKARTA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 239 114 375	1 440 462 297	1 560 157 356	1 796 753 922
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		455 794 240	491 077 276	512 498 971	526 621 883
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>		369 002 245	437 147 781	441 914 970	579 125 391
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		24 153 330	12 509 469	9 919 078	9 134 490
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		314 308 555	376 702 291	472 309 827	511 457 705
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		74 683 445	123 025 480	121 560 575	147 414 453
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		1 172 560	0	1 953 935	23 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		814 711 584	1 069 181 078	1 420 910 964	1 899 510 955
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		116 229 478	143 754 843	111 425 291	137 325 260
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		482 062 124	556 030 441	867 039 199	1 063 344 946
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		216 419 982	369 395 794	442 446 474	698 840 749
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		411 516 942	476 614 048	548 330 738	10 000 000
JUMLAH/TOTAL		2 465 342 901	2 986 257 423	3 529 399 058	3 706 264 877

*) Data APBD

TABEL 4.15 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS
TABLE 4.15 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE** (*ribu rupiah*), 2012-2015
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (*thousand rupiahs*), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		9 633 570 876	10 689 813 108	13 700 106 993	15 405 542 296
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		1 486 342 134	1 620 351 902	1 623 569 154	2 172 654 878
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		6 036 025	5 108 753	3 921 186	2 829 352
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		3 865 450 910	4 903 476 408	4 673 473 427	5 270 776 500
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		44 990 102	32 672 903	8 434 380	7 009 544
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		2 702 288 007	3 081 718 245	4 934 876 836	5 020 519 196
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		1 477 431 620	986 232 679	2 362 512 570	2 856 752 826
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		51 032 078	60 252 218	93 319 440	75 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		5 677 971 455	6 048 844 119	6 306 212 284	8 315 377 507
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		1 019 269 017	1 070 076 913	656 587 346	779 474 112
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		3 601 337 254	3 803 016 160	4 442 168 317	4 969 939 249
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		1 057 365 184	1 175 751 046	1 207 456 621	2 565 964 146
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		1 590 972 260	2 387 620 461	2 612 951 724	335 733 333
JUMLAH/TOTAL		16 902 514 591	19 126 277 688	22 619 271 001	24 056 653 136

*) Data APBD

TABEL 4.16 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS
TABLE 4.16 **PENGELUARAN (ribu rupiah), 2012-2015**
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		3 300 647 526	3 316 069 657	4 013 607 703	4 927 481 697
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		384 981 221	423 141 044	481 328 441	593 556 884
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		1 288 347 988	1 331 719 638	1 244 666 640	1 611 330 805
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		38 852 100	36 185 650	86 602 000	136 250 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		1 177 659 226	1 334 273 510	1 764 024 523	2 025 839 817
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		410 060 815	190 749 815	436 986 099	555 504 191
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		746 176	0	0	5 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		2 017 087 962	1 979 069 495	2 178 547 864	4 020 152 001
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		148 070 031	181 862 098	144 776 980	172 547 997
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		951 318 823	983 932 220	1 342 286 491	1 991 960 898
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		917 699 108	813 275 177	691 484 393	1 855 643 106
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		470 814 203	1 385 904 864	1 946 082 208	22 000 000
JUMLAH/TOTAL		5 788 549 691	6 681 044 016	8 138 237 775	8 969 633 698

*) Data APBD

TABEL 4.17 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENGELOUARAN
 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 4.17 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI BY KIND OF
 EXPENDITURE (thousand rupiah), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		2 430 673 383	2 607 826 785	3 151 101 687	3 463 283 973
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	581 866 718	624 347 012	715 280 041	903 501 398	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	3 594 375	3 999 800	10 000 000	10 000 000	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	798 197 590	689 580 542	867 202 764	734 607 912	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	25 229 500	144 236 452	147 024 713	159 280 601	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	833 781 099	671 432 090	910 123 410	977 284 567	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	180 142 797	472 642 328	497 128 613	648 609 495	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	7 861 304	1 588 561	4 342 146	30 000 000	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 132 059 614	1 260 913 651	1 340 543 869	1 526 181 126
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	39 820 073	41 906 917	62 150 385	91 026 978	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	748 605 554	764 537 190	907 808 176	900 637 010	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	343 633 987	454 469 544	370 585 308	534 517 138	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		857 712 229	1 139 839 942	1 125 742 772	200 000 000
JUMLAH/TOTAL		4 420 445 226	5 008 580 378	5 617 388 328	5 189 465 099

*) Data APBD

TABEL 4.18 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 4.18 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 344 468 440	1 482 172 654	1 558 834 866	1 660 755 585
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		436 435 436	472 165 454	502 984 121	567 926 423
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		241 576	197 768	248 496	0
4. Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>		549 159 045	669 157 984	536 698 599	549 327 758
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		82 354 460	55 886 880	25 477 063	36 550 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		195 501 621	215 435 740	454 803 323	475 495 566
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		72 567 932	67 117 173	38 517 986	21 530 000
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		8 208 370	2 211 655	105 278	9 925 838
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		844 713 401	897 421 047	1 055 265 236	1 332 881 967
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		73 718 885	81 597 916	89 028 411	102 806 232
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		366 001 340	365 543 941	543 439 395	619 694 812
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		404 993 176	450 279 190	422 797 430	610 380 923
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		71 348 512	28 134 779	189 155 598	58 000 000
JUMLAH/TOTAL		2 260 530 353	2 407 728 480	2 803 255 700	3 051 637 552

*) Data APBD

TABEL 4.19 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 4.19 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 439 363 825	1 590 293 920	1 734 235 032	2 053 350 765
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		426 109 148	439 173 808	464 325 697	508 382 966
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		798 677 253	960 359 791	932 596 147	1 152 778 400
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		64 755 830	29 518 270	22 191 490	28 337 378
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		136 640 474	141 657 476	267 099 625	320 448 854
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		12 888 770	15 209 207	29 252 565	35 903 167
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		292 350	4 375 368	18 769 508	7 500 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		724 991 767	791 017 156	958 813 561	1 235 775 575
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		87 761 374	105 220 376	77 667 705	92 573 079
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		392 479 928	460 616 404	473 545 067	581 066 051
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		244 750 465	225 180 376	407 600 789	562 136 445
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		265 897 258	257 704 279	329 644 828	54 700 000
JUMLAH/TOTAL		2 430 252 850	2 639 015 355	3 022 693 421	3 343 826 340

*) Data APBD

TABEL 4.20
TABLE

**REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS
PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN BARAT BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 803 799 149	1 764 246 629	2 064 408 105	2 757 706 048
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		433 187 735	441 182 327	546 771 365	699 479 724
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		770 670 616	598 994 336	666 837 274	801 587 400
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		665 000	948 000	252 000	1 997 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		447 341 470	455 946 490	435 940 603	928 664 900
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		147 081 933	267 175 476	414 606 863	320 977 024
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		4 852 395	0	0	5 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 240 157 756	1 532 360 118	1 588 506 036	1 818 294 885
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		97 802 602	143 022 608	151 348 580	143 039 256
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		787 874 946	898 826 047	946 938 051	1 148 871 738
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		354 480 208	490 511 463	490 219 405	526 383 891
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		272 258 327	187 965 679	194 600 710	70 000 000
JUMLAH/TOTAL		3 316 215 232	3 484 572 426	3 847 514 851	4 646 000 933

*) Data APBD

TABEL 4.21 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 4.21 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 229 065 954	1 361 950 809	1 485 025 739	1 738 188 435
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		321 002 514	346 955 356	385 757 112	477 350 000
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		18 438 992	13 579 963	13 704 956	15 000 000
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		357 148 366	289 034 924	332 463 903	526 263 600
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		116 714 897	59 366 720	69 886 615	80 256 445
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		372 548 061	485 973 440	527 398 945	465 123 964
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		43 083 828	165 887 728	154 846 272	172 349 426
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		129 296	1 152 678	967 936	1 845 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 122 281 366	1 566 774 812	1 750 774 460	1 913 876 280
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		65 931 229	67 960 906	71 273 654	139 534 510
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		420 535 875	558 211 280	864 992 982	792 941 658
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		635 814 262	940 602 626	814 507 824	981 400 112
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		614 289 889	439 704 834	280 614 254	55 000 000
JUMLAH/TOTAL		2 965 637 209	3 368 430 455	3 516 414 453	3 707 064 715

*) Data APBD

TABEL 4.22 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 4.22 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN SELATAN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		2 284 975 632	2 056 784 526	2 242 236 096	2 772 463 993
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	503 465 989	518 257 961	592 656 846	711 054 876	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	387 088 001	411 285 086	412 026 386	654 085 380	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	25 619 950	239 550	1 325 000	0	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	1 347 484 542	1 088 250 666	1 195 304 364	1 363 227 750	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	18 573 830	36 878 830	38 419 519	34 095 987	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 743 320	1 872 433	2 503 981	10 000 000	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	1 719 293 695	2 693 290 021	2 675 591 544	2 656 403 645	
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	110 249 234	175 877 019	141 220 680	162 515 382	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	753 427 953	1 177 554 354	1 267 486 876	1 298 558 736	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	855 616 508	1 339 858 648	1 266 883 988	1 195 329 527	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	1 311 295 560	804 661 308	738 732 079	31 000 000	
JUMLAH/TOTAL	5 315 564 887	5 554 735 855	5 656 559 719	5 459 867 638	

*) Data APBD

TABEL 4.23
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2012-2015
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		6 126 151 181	7 103 434 642	6 414 604 671	5 406 872 865
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		765 957 565	779 583 156	930 549 933	1 051 166 430
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		856 807 353	1 567 763 966	909 317 897	610 966 430
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		7 073 500	3 940 000	4 249 500	5 500 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		2 132 835 257	2 692 808 046	2 563 201 309	2 461 934 205
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		2 354 896 682	2 059 339 474	2 005 786 032	1 259 305 800
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		8 580 824	0	1 500 000	18 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		5 231 046 557	6 676 810 264	4 859 951 094	3 929 340 485
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		493 003 243	568 035 669	494 060 058	360 779 592
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		2 221 477 609	2 457 642 779	2 154 573 721	1 824 495 618
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		2 516 565 705	3 651 131 816	2 211 317 315	1 744 065 275
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		3 366 996 662	1 050 356 121	1 061 628 546	0
JUMLAH/TOTAL		14 724 194 400	14 830 601 027	12 336 184 311	9 336 213 350

*) Data APBD

**REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MENURUT JENIS
TABEL 4.24 PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015**
**TABLE 4.24 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN UTARA BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		0	0	141 231 908	803 896 351
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		0	0	46 206 963	196 210 911
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		0	0	94 624 945	261 147 800
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		0	0	0	5 000 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		0	0	0	172 126 140
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		0	0	0	159 411 500
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		0	0	400 000	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		0	0	501 133 396	1 560 727 261
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		0	0	35 906 166	135 501 463
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		0	0	240 588 072	771 947 791
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		0	0	224 639 158	653 278 007
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		0	0	1 184 448 975	0
JUMLAH/TOTAL		0	0	1 826 814 279	2 364 623 612

*) Data APBD

TABEL 4.25

**REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2012-2015**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI UTARA BY KIND
OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		860 233 283	921 771 690	1 141 016 762	1 462 143 592
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	380 581 934	395 525 193	467 712 987	541 672 092	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	998 580	1 200 000	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	279 993 486	262 920 572	294 610 568	519 241 500	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	500 000	5 230 000	12 316 500	1 500 000	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	198 156 413	256 177 100	293 834 637	362 250 000	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	931 330	899 998	69 957 386	31 280 000	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	70 120	1 018 827	1 586 104	5 000 000	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		910 885 053	1 103 819 186	1 088 467 705	1 179 645 512
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	56 662 658	70 928 416	35 073 022	31 491 726	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	503 625 677	645 754 385	546 671 365	496 724 605	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	350 596 718	387 136 385	506 723 318	651 429 181	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		252 904 042	289 406 246	340 708 660	25 000 000
JUMLAH/TOTAL		2 024 022 378	2 314 997 122	2 570 193 127	2 666 789 104

*) Data APBD

TABEL 4.26
TABLE

REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGAH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		961 116 052	942 898 008	1 167 333 262	1 531 260 871
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		339 580 347	350 485 761	376 699 998	604 458 961
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		169 233	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		350 879 809	328 963 444	363 244 679	456 427 400
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		6 705 100	3 116 500	4 124 500	5 000 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		221 449 610	194 496 854	305 162 965	345 594 446
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		41 098 927	65 745 494	117 267 144	114 780 064
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		1 233 026	89 955	833 976	5 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 051 905 688	1 202 329 811	1 278 327 985	1 306 303 270
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		114 424 678	140 508 898	148 177 160	122 059 924
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		612 618 687	706 301 866	853 319 017	851 971 173
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		324 862 323	355 519 047	276 831 808	332 272 173
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		158 588 100	135 496 072	142 474 915	6 830 000
JUMLAH/TOTAL		2 171 609 840	2 280 723 891	2 588 136 162	2 844 394 141

*) Data APBD

TABEL 4.27

**REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS
PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI SELATAN BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		3 135 433 892	3 193 410 492	3 446 840 488	4 113 983 703
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		713 658 235	736 658 019	852 198 957	991 777 416
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	8 715 554	16 151 416	39 500 000
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		1 205 710 313	1 028 773 966	950 682 805	1 264 505 600
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		0	0	0	0
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		676 635 863	843 117 427	1 101 354 583	1 308 803 961
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		538 874 428	572 441 642	525 489 443	489 396 726
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		555 053	3 703 884	963 284	20 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 468 214 388	1 730 806 859	2 153 546 288	2 053 127 195
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		157 196 580	186 117 682	168 276 411	174 040 480
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		933 865 895	1 054 475 228	1 309 032 668	1 220 477 832
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		377 151 913	490 213 949	676 237 209	658 608 883
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		42 653 396	93 178 272	242 455 881	136 000 000
JUMLAH/TOTAL		4 646 301 676	5 017 395 623	5 842 842 657	6 303 110 898

*) Data APBD

TABEL 4.28 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 4.28 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 163 334 848	1 060 331 581	1 114 072 138	1 336 120 086
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		421 500 309	431 361 209	458 968 695	534 853 095
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		14 762 534	18 329 792	22 627 810	24 162 640
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		390 194 203	295 628 063	324 556 946	412 989 800
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		0	0	0	0
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		104 260 188	214 814 429	203 217 978	224 906 481
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		232 530 147	96 245 018	104 700 709	101 179 531
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		87 467	3 953 070	0	38 028 539
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		551 561 176	752 613 024	974 527 586	985 772 804
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		72 313 877	62 484 468	58 057 283	58 764 650
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		275 044 116	259 411 676	362 977 173	334 473 604
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		204 203 183	430 716 880	553 493 130	592 534 550
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		120 679 286	363 294 946	431 964 051	91 649 148
JUMLAH/TOTAL		1 835 575 310	2 176 239 551	2 520 563 775	2 413 542 038

*) Data APBD

TABEL 4.29

**REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2012-2015**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF GORONTALO BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		465 099 947	506 042 855	558 125 330	661 544 695
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		209 099 424	224 332 890	239 795 987	302 669 797
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		1 506 660	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		182 988 988	171 421 290	181 553 544	205 015 370
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		39 250	556 000	1 479 000	2 000 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		55 182 733	78 238 394	112 638 502	126 905 069
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		16 088 905	31 158 408	21 600 082	19 756 585
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		193 987	335 873	1 058 215	5 197 874
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		419 921 214	544 773 920	646 364 708	807 187 377
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		32 854 602	36 434 870	35 278 153	53 121 364
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		248 669 038	323 379 712	378 661 812	390 072 561
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		138 397 574	184 959 338	232 424 743	363 993 452
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		112 117 553	102 841 865	97 002 816	10 000 000
JUMLAH/TOTAL		997 138 714	1 153 658 640	1 301 492 854	1 478 732 072

*) Data APBD

TABEL 4.30

**REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2012-2015**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI BARAT BY KIND
OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		328 534 121	438 697 989	507 606 860	633 842 788
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		127 058 283	200 211 221	210 732 942	241 369 985
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		149 806 420	158 222 764	173 152 932	222 942 800
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		56 500	122 400	11 125 744	11 500 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		44 733 370	51 538 654	112 595 242	86 280 956
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		6 306 177	28 337 950	0	70 749 047
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		573 371	265 000	0	1 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		539 598 513	605 373 178	719 815 524	870 583 205
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		75 318 392	34 830 232	0	0
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		328 893 109	387 091 610	452 797 262	427 173 458
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		135 387 012	183 451 336	267 018 262	443 409 747
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		109 896 935	131 168 699	142 074 163	2 000 000
JUMLAH/TOTAL		978 029 569	1 175 239 866	1 369 496 547	1 506 425 993

*) Data APBD

TABEL 4.31
TABLE

**REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2012-2015**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		739 129 513	939 228 838	830 868 693	1 046 547 213
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	321 492 983	360 075 315	392 741 104	494 977 383	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	1 834 405	1 644 657	1 192 613	874 409	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	309 662 975	459 681 993	306 012 795	362 839 517	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	10 556 957	4 992 696	2 016 380	6 000 000	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	81 427 724	91 395 308	102 848 334	153 174 798	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	12 543 203	19 008 296	24 215 570	21 411 106	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 611 266	2 430 573	1 841 897	7 270 000	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		616 858 597	637 219 990	895 264 571	1 309 162 599
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	75 586 968	64 172 558	30 606 186	7 358 325	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	359 287 327	379 456 442	495 328 479	756 752 943	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	181 984 302	193 590 990	369 329 906	545 051 331	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		158 762 191	118 453 994	186 416 361	7 735 885
JUMLAH/TOTAL		1 514 750 301	1 694 902 822	1 912 549 625	2 363 445 697

*) Data APBD

TABEL 4.32 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 4.32 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		450 872 973	591 900 918	560 913 095	709 894 671
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	200 362 804	215 957 878	265 437 989	339 277 975	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	5 000 000	
4. Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	169 693 350	315 975 829	196 660 633	255 261 783	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	30 979 064	26 406 259	15 042 365	15 000 000	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	43 144 197	33 534 852	83 272 108	92 454 913	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	739 549	0	0	900 000	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	5 954 009	26 100	500 000	2 000 000	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		808 787 045	795 692 214	920 652 250	1 114 532 978
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	51 649 027	69 715 759	77 207 847	78 606 642	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	338 549 685	336 245 301	415 479 700	538 865 985	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	418 588 333	389 731 154	427 964 703	497 060 351	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		136 787 480	53 531 135	51 153 914	119 955 591
JUMLAH/TOTAL		1 396 447 498	1 441 124 267	1 532 719 259	1 944 383 240

*) Data APBD

TABEL 4.33 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS
TABLE 4.33 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE** (ribu rupiah), 2012-2015
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (*thousand rupiahs*), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		2 055 364 553	2 577 912 070	2 876 703 562	3 816 278 611
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	171 578 191	172 542 175	178 580 573	322 629 605	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	377 022 796	467 016 555	463 623 362	461 650 600	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	6 397 320	38 319 893	35 295 750	42 419 000	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	448 054 264	777 049 506	713 746 670	1 400 272 942	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 052 311 982	1 120 101 441	1 485 457 207	1 574 306 464	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	2 882 500	0	15 000 000	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 843 567 358	1 934 518 145	2 552 145 929	2 950 450 681
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	110 328 271	128 783 417	136 216 566	144 734 528	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	879 370 336	972 065 646	1 224 141 281	1 295 240 417	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	853 868 751	833 669 082	1 191 788 082	1 510 475 736	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		372 575 438	1 497 841 857	1 667 907 507	80 019 122
JUMLAH/TOTAL		4 271 507 349	6 010 272 072	7 096 756 998	6 846 748 414

*) Data APBD

TABEL 4.34 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS
TABLE 4.34 **PENGELUARAN (ribu rupiah), 2012-2015**
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		4 235 837 617	5 080 595 310	6 419 561 804	7 155 348 541
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		652 577 095	657 545 845	744 258 374	1 006 628 803
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		693 635 742	651 084 026	732 224 238	885 016 965
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		110 610 956	178 167 170	88 453 792	100 034 311
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		114 401 215	232 800 665	280 781 136	297 467 197
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		2 664 612 609	3 348 440 831	4 562 248 919	4 843 201 265
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		0	12 556 773	11 595 345	23 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		3 003 829 503	3 090 757 039	3 884 225 042	6 113 111 816
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		153 855 088	175 893 795	196 401 072	214 619 552
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		1 540 796 548	1 694 118 393	1 998 521 178	2 729 759 712
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		1 309 177 867	1 220 744 851	1 689 302 792	3 168 732 552
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		1 001 969 303	958 202 863	1 239 234 968	25 000 000
JUMLAH/TOTAL		8 241 636 423	9 129 555 212	11 543 021 814	13 293 460 357

*) Data APBD

TABEL
TABLE 5.

TABEL 5.A REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2012-2015
ACTUAL INDIRECT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	3 408 378 593	3 464 270 270	5 580 074 906	5 771 842 804	
2. Sumatera Utara	5 159 086 805	5 004 403 323	5 371 411 832	5 619 854 578	
3. Sumatera Barat	1 592 402 826	1 668 156 981	1 831 872 717	2 357 524 766	
4. Riau	3 245 053 341	3 292 872 527	3 431 470 705	4 402 191 631	
5. Jambi	1 245 496 974	1 271 925 809	1 483 115 535	1 771 657 077	
6. Sumatera Selatan	3 194 440 679	3 683 194 508	4 010 626 533	3 573 744 695	
7. Bengkulu	786 792 391	795 311 582	908 754 313	1 027 126 706	
8. Lampung	1 942 405 359	1 811 879 220	2 144 560 815	2 637 268 598	
9. Bangka Belitung	764 754 923	808 318 501	855 780 981	1 152 668 096	
10. Kepulauan Riau	1 041 488 315	1 195 146 662	1 213 820 569	1 597 792 766	
11. DKI Jakarta	11 673 114 294	13 148 602 086	12 631 884 602	24 760 911 186	
12. Jawa Barat	13 648 410 111	14 724 113 008	16 958 816 394	19 626 961 424	
13. Jawa Tengah	8 540 012 837	9 213 696 623	10 646 904 181	11 665 348 934	
14. DI Yogyakarta	1 239 114 375	1 440 462 297	1 560 157 356	1 796 753 922	
15. Jawa Timur	9 633 570 876	10 689 813 108	13 700 106 993	15 405 542 296	
16. Banten	3 300 647 526	3 316 069 657	4 013 607 703	4 927 481 697	
17. Bali	2 430 673 383	2 607 826 785	3 151 101 687	3 463 283 973	
18. Nusa Tenggara Barat	1 344 468 440	1 482 172 654	1 558 834 866	1 660 755 585	
19. Nusa Tenggara Timur	1 439 363 825	1 590 293 920	1 734 235 032	2 053 350 765	
20. Kalimantan Barat	1 803 799 149	1 764 246 629	2 064 408 105	2 757 706 048	
21. Kalimantan Tengah	1 229 065 954	1 361 950 809	1 485 025 739	1 738 188 435	
22. Kalimantan Selatan	2 284 975 632	2 056 784 526	2 242 236 096	2 772 463 993	
23. Kalimantan Timur	6 126 151 181	7 103 434 642	6 414 604 671	5 406 872 865	
24. Kalimantan Utara	0	0	141 231 908	803 896 351	
25. Sulawesi Utara	860 233 283	921 771 690	1 141 016 762	1 462 143 592	
26. Sulawesi Tengah	961 116 052	942 898 008	1 167 333 262	1 531 260 871	
27. Sulawesi Selatan	3 135 433 892	3 193 410 492	3 446 840 488	4 113 983 703	
28. Sulawesi Tenggara	1 163 334 848	1 060 331 581	1 114 072 138	1 336 120 086	
29. Gorontalo	465 099 947	506 042 855	558 125 330	661 544 695	
30. Sulawesi Barat	328 534 121	438 697 989	507 606 860	633 842 788	
31. Maluku	739 129 513	939 228 838	830 868 693	1 046 547 213	
32. Maluku Utara	450 872 973	591 900 918	560 913 095	709 894 671	
33. Papua Barat	2 055 364 553	2 577 912 070	2 876 703 562	3 816 278 611	
34. Papua	4 235 837 617	5 080 595 310	6 419 561 804	7 155 348 541	
JUMLAH/TOTAL	101 468 624 588	109 747 735 878	123 757 686 233	151 218 153 962	

*) Data APBD

**REALISASI BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2012-2015**
TABEL 5.A.1 *ACTUAL INDIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015*

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	774 594 474	819 274 025	870 169 543	949 428 291
2.	Sumatera Utara	955 151 592	924 490 865	1 008 161 979	1 174 303 458
3.	Sumatera Barat	524 517 313	562 989 640	598 043 410	719 318 018
4.	R i a u	790 433 933	877 503 081	937 258 185	1 122 745 693
5.	J a m b i	446 994 502	434 868 794	480 217 430	584 390 649
6.	Sumatera Selatan	618 614 096	731 001 398	752 819 177	777 044 323
7.	Bengkulu	407 803 333	425 728 526	450 265 493	521 700 183
8.	Lampung	488 121 065	497 662 948	544 114 850	771 913 782
9.	Bangka Belitung	216 271 988	246 900 473	274 339 635	329 023 180
10.	Kepulauan Riau	212 470 060	220 943 360	252 064 813	300 000 000
11.	DKI Jakarta	9 688 176 243	10 046 180 477	10 472 324 237	19 311 408 500
12.	Jawa Barat	1 511 157 915	1 535 932 802	1 569 541 693	1 750 356 996
13.	Jawa Tengah	1 241 600 972	1 368 517 191	1 726 640 884	2 451 025 833
14.	D I Yogyakarta	455 794 240	491 077 276	512 498 971	526 621 883
15.	Jawa Timur	1 486 342 134	1 620 351 902	1 623 569 154	2 172 654 878
16.	Banten	384 981 221	423 141 044	481 328 441	593 556 884
17.	B a l i	581 866 718	624 347 012	715 280 041	903 501 398
18.	Nusa Tenggara Barat	436 435 436	472 165 454	502 984 121	567 926 423
19.	Nusa Tenggara Timur	426 109 148	439 173 808	464 325 697	508 382 966
20.	Kalimantan Barat	433 187 735	441 182 327	546 771 365	699 479 724
21.	Kalimantan Tengah	321 002 514	346 955 356	385 757 112	477 350 000
22.	Kalimantan Selatan	503 465 989	518 257 961	592 656 846	711 054 876
23.	Kalimantan Timur	765 957 565	779 583 156	930 549 933	1 051 166 430
24.	Kalimantan Utara	0	0	46 206 963	196 210 911
25.	Sulawesi Utara	380 581 934	395 525 193	467 712 987	541 672 092
26.	Sulawesi Tengah	339 580 347	350 485 761	376 699 998	604 458 961
27.	Sulawesi Selatan	713 658 235	736 658 019	852 198 957	991 777 416
28.	Sulawesi Tenggara	421 500 309	431 361 209	458 968 695	534 853 095
29.	Gorontalo	209 099 424	224 332 890	239 795 987	302 669 797
30.	Sulawesi Barat	127 058 283	200 211 221	210 732 942	241 369 985
31.	M a l u k u	321 492 983	360 075 315	392 741 104	494 977 383
32.	Maluku Utara	200 362 804	215 957 878	265 437 989	339 277 975
33.	Papua Barat	171 578 191	172 542 175	178 580 573	322 629 605
34.	P a p u a	652 577 095	657 545 845	744 258 374	1 006 628 803
JUMLAH/TOTAL		27 208 539 791	28 592 924 382	30 925 017 579	44 550 880 391

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BUNGA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.A.2 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 5.A.2 ACTUAL INTEREST EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh		0	0	0	0
2. Sumatera Utara		0	0	0	0
3. Sumatera Barat		0	0	0	0
4. Riau		0	0	0	0
5. Jambi		0	0	0	0
6. Sumatera Selatan		0	0	0	0
7. Bengkulu		0	0	0	0
8. Lampung		0	0	0	0
9. Bangka Belitung		0	0	0	0
10. Kepulauan Riau		0	0	0	0
11. DKI Jakarta		3 172 975	2 191 752	1 218 529	46 070 053
12. Jawa Barat		0	0	0	0
13. Jawa Tengah		0	0	0	0
14. DI Yogyakarta		0	0	0	0
15. Jawa Timur		6 036 025	5 108 753	3 921 186	2 829 352
16. Banten		0	0	0	0
17. Bali		0	0	0	0
18. Nusa Tenggara Barat		0	0	0	0
19. Nusa Tenggara Timur		0	0	0	0
20. Kalimantan Barat		0	0	0	0
21. Kalimantan Tengah		0	0	0	0
22. Kalimantan Selatan		0	0	0	0
23. Kalimantan Timur		0	0	0	0
24. Kalimantan Utara		0	0	0	0
25. Sulawesi Utara		0	0	0	0
26. Sulawesi Tengah		169 233	0	0	0
27. Sulawesi Selatan		0	8 715 554	16 151 416	39 500 000
28. Sulawesi Tenggara		14 762 534	18 329 792	22 627 810	24 162 640
29. Gorontalo		0	0	0	0
30. Sulawesi Barat		0	0	0	0
31. Maluku		1 834 405	1 644 657	1 192 613	874 409
32. Maluku Utara		0	0	0	0
33. Papua Barat		0	0	0	0
34. Papua		0	0	0	0
JUMLAH/TOTAL		25 975 172	35 990 508	45 111 554	113 436 454

*) Data APBD

REALISASI BELANJA SUBSIDI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.A.3 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 5.A.3 ACTUAL SUBSIDIES EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh		0	0	0	0
2. Sumatera Utara		0	0	0	0
3. Sumatera Barat		0	0	0	0
4. Riau		0	4 999 254	0	0
5. Jambi		237 500	0	0	0
6. Sumatera Selatan		2 606 928	0	0	0
7. Bengkulu		0	0	0	0
8. Lampung		0	0	0	0
9. Bangka Belitung		0	0	0	0
10. Kepulauan Riau		0	0	0	0
11. DKI Jakarta		0	0	0	940 000 000
12. Jawa Barat		15 055	2 940 521	6 805 400	10 000 000
13. Jawa Tengah		0	0	0	0
14. DI Yogyakarta		0	0	0	0
15. Jawa Timur		0	0	0	0
16. Banten		0	0	0	0
17. Bali		3 594 375	3 999 800	10 000 000	10 000 000
18. Nusa Tenggara Barat		241 576	197 768	248 496	0
19. Nusa Tenggara Timur		0	0	0	0
20. Kalimantan Barat		0	0	0	0
21. Kalimantan Tengah		18 438 992	13 579 963	13 704 956	15 000 000
22. Kalimantan Selatan		0	0	0	0
23. Kalimantan Timur		0	0	0	0
24. Kalimantan Utara		0	0	0	0
25. Sulawesi Utara		0	0	998 580	1 200 000
26. Sulawesi Tengah		0	0	0	0
27. Sulawesi Selatan		0	0	0	0
28. Sulawesi Tenggara		0	0	0	0
29. Gorontalo		1 506 660	0	0	0
30. Sulawesi Barat		0	0	0	0
31. Maluku		0	0	0	0
32. Maluku Utara		0	0	0	5 000 000
33. Papua Barat		0	0	0	0
34. Papua		0	0	0	0
JUMLAH/TOTAL		26 641 086	25 717 306	31 757 432	981 200 000

*) Data APBD

REALISASI BELANJA HIBAH PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.A.4 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 5.A.4 ACTUAL GRANT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	1 065 211 457	1 219 682 993	693 008 973	639 148 800	
2. Sumatera Utara	1 781 350 465	1 825 737 597	1 611 718 257	1 588 169 654	
3. Sumatera Barat	647 568 586	572 705 110	591 642 080	802 390 100	
4. Riau	1 459 570 748	1 251 675 819	751 853 825	1 070 651 842	
5. Jambi	356 592 340	335 646 046	380 761 572	491 451 290	
6. Sumatera Selatan	1 515 320 781	2 031 305 992	1 574 378 204	1 779 951 649	
7. Bengkulu	221 706 458	209 507 795	225 782 948	273 863 800	
8. Lampung	741 234 652	761 045 629	847 424 324	807 523 430	
9. Bangka Belitung	197 922 560	220 160 776	167 022 783	284 091 950	
10. Kepulauan Riau	278 411 673	365 873 250	470 786 270	555 375 462	
11. DKI Jakarta	1 933 097 204	1 999 968 587	1 462 044 387	1 681 897 940	
12. Jawa Barat	6 136 668 844	5 673 020 648	6 179 782 846	7 154 144 995	
13. Jawa Tengah	3 123 911 500	3 499 864 177	2 963 856 035	2 913 067 653	
14. DI Yogyakarta	369 002 245	437 147 781	441 914 970	579 125 391	
15. Jawa Timur	3 865 450 910	4 903 476 408	4 673 473 427	5 270 776 500	
16. Banten	1 288 347 988	1 331 719 638	1 244 666 640	1 611 330 805	
17. Bali	798 197 590	689 580 542	867 202 764	734 607 912	
18. Nusa Tenggara Barat	549 159 045	669 157 984	536 698 599	549 327 758	
19. Nusa Tenggara Timur	798 677 253	960 359 791	932 596 147	1 152 778 400	
20. Kalimantan Barat	770 670 616	598 994 336	666 837 274	801 587 400	
21. Kalimantan Tengah	357 148 366	289 034 924	332 463 903	526 263 600	
22. Kalimantan Selatan	387 088 001	411 285 086	412 026 386	654 085 380	
23. Kalimantan Timur	856 807 353	1 567 763 966	909 317 897	610 966 430	
24. Kalimantan Utara	0	0	94 624 945	261 147 800	
25. Sulawesi Utara	279 993 486	262 920 572	294 610 568	519 241 500	
26. Sulawesi Tengah	350 879 809	328 963 444	363 244 679	456 427 400	
27. Sulawesi Selatan	1 205 710 313	1 028 773 966	950 682 805	1 264 505 600	
28. Sulawesi Tenggara	390 194 203	295 628 063	324 556 946	412 989 800	
29. Gorontalo	182 988 988	171 421 290	181 553 544	205 015 370	
30. Sulawesi Barat	149 806 420	158 222 764	173 152 932	222 942 800	
31. Maluku	309 662 975	459 681 993	306 012 795	362 839 517	
32. Maluku Utara	169 693 350	315 975 829	196 660 633	255 261 783	
33. Papua Barat	377 022 796	467 016 555	463 623 362	461 650 600	
34. Papua	693 635 742	651 084 026	732 224 238	885 016 965	
JUMLAH/TOTAL	33 608 704 717	35 964 403 377	33 018 207 958	37 839 617 276	

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.A.5 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 5.A.5 ACTUAL SOCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	515 656 041	292 533 440	309 012 899	258 181 800	
2. Sumatera Utara	25 858 294	43 718 380	1 065 000	1 700 000	
3. Sumatera Barat	13 934 490	28 909 462	0	0	
4. Riau	20 053 500	20 887 500	13 015 000	7 177 300	
5. Jambi	65 500 450	33 441 017	19 518 750	0	
6. Sumatera Selatan	507 000	399 597	513 384	600 000	
7. Bengkulu	0	0	0	0	
8. Lampung	7 840 000	5 448 514	4 521 800	9 700 000	
9. Bangka Belitung	669 500	2 611 950	745 500	1 000 000	
10. Kepulauan Riau	115 916 316	134 215 225	40 688 431	119 482 500	
11. DKI Jakarta	15 993 940	1 044 598 130	680 155 340	2 312 852 969	
12. Jawa Barat	16 685 225	13 600 215	2 871 320	12 000 000	
13. Jawa Tengah	7 548 325	14 362 375	23 281 040	28 557 200	
14. DI Yogyakarta	24 153 330	12 509 469	9 919 078	9 134 490	
15. Jawa Timur	44 990 102	32 672 903	8 434 380	7 009 544	
16. Banten	38 852 100	36 185 650	86 602 000	136 250 000	
17. Bali	25 229 500	144 236 452	147 024 713	159 280 601	
18. Nusa Tenggara Barat	82 354 460	55 886 880	25 477 063	36 550 000	
19. Nusa Tenggara Timur	64 755 830	29 518 270	22 191 490	28 337 378	
20. Kalimantan Barat	665 000	948 000	252 000	1 997 000	
21. Kalimantan Tengah	116 714 897	59 366 720	69 886 615	80 256 445	
22. Kalimantan Selatan	25 619 950	239 550	1 325 000	0	
23. Kalimantan Timur	7 073 500	3 940 000	4 249 500	5 500 000	
24. Kalimantan Utara	0	0	0	5 000 000	
25. Sulawesi Utara	500 000	5 230 000	12 316 500	1 500 000	
26. Sulawesi Tengah	6 705 100	3 116 500	4 124 500	5 000 000	
27. Sulawesi Selatan	0	0	0	0	
28. Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	
29. Gorontalo	39 250	556 000	1 479 000	2 000 000	
30. Sulawesi Barat	56 500	122 400	11 125 744	11 500 000	
31. Maluku	10 556 957	4 992 696	2 016 380	6 000 000	
32. Maluku Utara	30 979 064	26 406 259	15 042 365	15 000 000	
33. Papua Barat	6 397 320	38 319 893	35 295 750	42 419 000	
34. Papua	110 610 956	178 167 170	88 453 792	100 034 311	
JUMLAH/TOTAL	1 402 416 897	2 267 140 617	1 640 604 334	3 404 020 538	

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BAGI HASIL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.A.6 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 5.A.6 ACTUAL SHARING FUND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	262 803 876	269 719 474	298 490 577	502 822 696	
2. Sumatera Utara	549 531 770	522 121 373	1 692 809 639	2 330 828 370	
3. Sumatera Barat	390 898 542	416 913 494	546 614 466	639 173 368	
4. Riau	796 726 772	874 713 339	1 614 630 539	1 159 145 279	
5. Jambi	298 917 433	315 495 683	462 356 647	550 590 138	
6. Sumatera Selatan	500 000 000	115 227 612	268 508 790	300 000 000	
7. Bengkulu	153 837 811	142 626 514	211 055 929	218 158 359	
8. Lampung	472 103 539	357 471 263	723 095 813	1 000 000 000	
9. Bangka Belitung	212 792 436	177 383 056	212 859 717	280 474 272	
10. Kepulauan Riau	256 225 110	283 495 455	252 894 344	345 000 000	
11. DKI Jakarta	0	0	0	0	
12. Jawa Barat	3 161 224 937	3 994 277 232	5 461 539 028	6 134 790 633	
13. Jawa Tengah	2 253 337 259	1 825 598 247	3 263 403 899	4 295 303 353	
14. DI Yogyakarta	314 308 555	376 702 291	472 309 827	511 457 705	
15. Jawa Timur	2 702 288 007	3 081 718 245	4 934 876 836	5 020 519 196	
16. Banten	1 177 659 226	1 334 273 510	1 764 024 523	2 025 839 817	
17. Bali	833 781 099	671 432 090	910 123 410	977 284 567	
18. Nusa Tenggara Barat	195 501 621	215 435 740	454 803 323	475 495 566	
19. Nusa Tenggara Timur	136 640 474	141 657 476	267 099 625	320 448 854	
20. Kalimantan Barat	447 341 470	455 946 490	435 940 603	928 664 900	
21. Kalimantan Tengah	372 548 061	485 973 440	527 398 945	465 123 964	
22. Kalimantan Selatan	1 347 484 542	1 088 250 666	1 195 304 364	1 363 227 750	
23. Kalimantan Timur	2 132 835 257	2 692 808 046	2 563 201 309	2 461 934 205	
24. Kalimantan Utara	0	0	0	172 126 140	
25. Sulawesi Utara	198 156 413	256 177 100	293 834 637	362 250 000	
26. Sulawesi Tengah	221 449 610	194 496 854	305 162 965	345 594 446	
27. Sulawesi Selatan	676 635 863	843 117 427	1 101 354 583	1 308 803 961	
28. Sulawesi Tenggara	104 260 188	214 814 429	203 217 978	224 906 481	
29. Gorontalo	55 182 733	78 238 394	112 638 502	126 905 069	
30. Sulawesi Barat	44 733 370	51 538 654	112 595 242	86 280 956	
31. Maluku	81 427 724	91 395 308	102 848 334	153 174 798	
32. Maluku Utara	43 144 197	33 534 852	83 272 108	92 454 913	
33. Papua Barat	448 054 264	777 049 506	713 746 670	1 400 272 942	
34. Papua	114 401 215	232 800 665	280 781 136	297 467 197	
JUMLAH/TOTAL	20 956 233 374	22 612 403 925	31 842 794 308	36 876 519 895	

*) Data APBD

**REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2012-2015**
TABEL 5.A.7 *ACTUAL FINANCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015*

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	693 635 000	801 680 060	3 407 472 166	3 344 061 217	
2. Sumatera Utara	1 844 619 727	1 687 837 008	1 053 174 611	517 353 096	
3. Sumatera Barat	15 483 895	85 739 275	94 969 449	191 643 280	
4. Riau	178 268 388	263 093 534	114 713 156	1 032 471 517	
5. Jambi	74 860 636	150 386 797	138 550 780	141 725 000	
6. Sumatera Selatan	556 429 130	804 677 610	1 413 549 040	707 436 233	
7. Bengkulu	3 444 789	15 627 639	21 144 500	4 403 195	
8. Lampung	211 493 780	170 214 409	20 173 866	25 642 600	
9. Bangka Belitung	137 098 439	161 262 246	200 796 461	256 078 694	
10. Kepulauan Riau	177 255 623	188 604 802	197 356 711	274 934 804	
11. DKI Jakarta	30 186 259	44 286 271	14 005 707	401 179 004	
12. Jawa Barat	2 815 801 802	3 504 341 590	3 738 146 028	4 448 668 800	
13. Jawa Tengah	1 908 190 238	2 503 166 398	2 661 510 573	1 947 394 895	
14. DI Yogyakarta	74 683 445	123 025 480	121 560 575	147 414 453	
15. Jawa Timur	1 477 431 620	986 232 679	2 362 512 570	2 856 752 826	
16. Banten	410 060 815	190 749 815	436 986 099	555 504 191	
17. Bali	180 142 797	472 642 328	497 128 613	648 609 495	
18. Nusa Tenggara Barat	72 567 932	67 117 173	38 517 986	21 530 000	
19. Nusa Tenggara Timur	12 888 770	15 209 207	29 252 565	35 903 167	
20. Kalimantan Barat	147 081 933	267 175 476	414 606 863	320 977 024	
21. Kalimantan Tengah	43 083 828	165 887 728	154 846 272	172 349 426	
22. Kalimantan Selatan	18 573 830	36 878 830	38 419 519	34 095 987	
23. Kalimantan Timur	2 354 896 682	2 059 339 474	2 005 786 032	1 259 305 800	
24. Kalimantan Utara	0	0	0	159 411 500	
25. Sulawesi Utara	931 330	899 998	69 957 386	31 280 000	
26. Sulawesi Tengah	41 098 927	65 745 494	117 267 144	114 780 064	
27. Sulawesi Selatan	538 874 428	572 441 642	525 489 443	489 396 726	
28. Sulawesi Tenggara	232 530 147	96 245 018	104 700 709	101 179 531	
29. Gorontalo	16 088 905	31 158 408	21 600 082	19 756 585	
30. Sulawesi Barat	6 306 177	28 337 950	0	70 749 047	
31. Maluku	12 543 203	19 008 296	24 215 570	21 411 106	
32. Maluku Utara	739 549	0	0	900 000	
33. Papua Barat	1 052 311 982	1 120 101 441	1 485 457 207	1 574 306 464	
34. Papua	2 664 612 609	3 348 440 831	4 562 248 919	4 843 201 265	
JUMLAH/TOTAL	18 004 216 615	20 047 554 907	26 086 116 602	26 771 806 992	

*) Data APBD

REALISASI BELANJA TAK TERDUGA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.A.8 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 5.A.8 ACTUAL UNPREDICTED EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	96 477 745	61 380 278	1 920 748	78 200 000	
2. Sumatera Utara	2 574 957	498 100	4 482 346	7 500 000	
3. Sumatera Barat	0	900 000	603 312	5 000 000	
4. Riau	0	0	0	10 000 000	
5. Jambi	2 394 113	2 087 472	1 710 356	3 500 000	
6. Sumatera Selatan	962 744	582 299	857 938	8 712 490	
7. Bengkulu	0	1 821 108	505 443	9 001 169	
8. Lampung	21 612 323	20 036 457	5 230 162	22 488 786	
9. Bangka Belitung	0	0	16 885	2 000 000	
10. Kepulauan Riau	1 209 533	2 014 570	30 000	3 000 000	
11. DKI Jakarta	2 487 673	11 376 869	2 136 402	67 502 720	
12. Jawa Barat	6 856 333	0	130 079	117 000 000	
13. Jawa Tengah	5 424 543	2 188 235	8 211 750	30 000 000	
14. DI Yogyakarta	1 172 560	0	1 953 935	23 000 000	
15. Jawa Timur	51 032 078	60 252 218	93 319 440	75 000 000	
16. Banten	746 176	0	0	5 000 000	
17. Bali	7 861 304	1 588 561	4 342 146	30 000 000	
18. Nusa Tenggara Barat	8 208 370	2 211 655	105 278	9 925 838	
19. Nusa Tenggara Timur	292 350	4 375 368	18 769 508	7 500 000	
20. Kalimantan Barat	4 852 395	0	0	5 000 000	
21. Kalimantan Tengah	129 296	1 152 678	967 936	1 845 000	
22. Kalimantan Selatan	2 743 320	1 872 433	2 503 981	10 000 000	
23. Kalimantan Timur	8 580 824	0	1 500 000	18 000 000	
24. Kalimantan Utara	0	0	400 000	10 000 000	
25. Sulawesi Utara	70 120	1 018 827	1 586 104	5 000 000	
26. Sulawesi Tengah	1 233 026	89 955	833 976	5 000 000	
27. Sulawesi Selatan	555 053	3 703 884	963 284	20 000 000	
28. Sulawesi Tenggara	87 467	3 953 070	0	38 028 539	
29. Gorontalo	193 987	335 873	1 058 215	5 197 874	
30. Sulawesi Barat	573 371	265 000	0	1 000 000	
31. Maluku	1 611 266	2 430 573	1 841 897	7 270 000	
32. Maluku Utara	5 954 009	26 100	500 000	2 000 000	
33. Papua Barat	0	2 882 500	0	15 000 000	
34. Papua	0	12 556 773	11 595 345	23 000 000	
JUMLAH/TOTAL	235 896 936	201 600 856	168 076 466	680 672 416	

*) Data APBD

TABEL 5.B REALISASI BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 5.B ACTUAL DIRECT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
 INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	5 348 941 351	7 756 157 285	6 465 772 436	6 983 800 921
2.	Sumatera Utara	2 474 547 705	2 256 064 927	2 437 145 478	3 060 087 716
3.	Sumatera Barat	1 369 888 390	1 445 156 684	1 651 799 638	1 693 603 726
4.	R i a u	3 425 711 796	4 232 409 979	2 170 603 791	6 281 782 652
5.	J a m b i	1 286 101 339	1 738 815 356	1 721 517 300	1 741 503 679
6.	Sumatera Selatan	1 866 482 043	1 995 509 103	1 760 106 497	3 035 963 930
7.	Bengkulu	731 660 414	931 694 776	1 025 967 285	1 231 570 330
8.	Lampung	1 892 330 184	2 072 655 734	2 309 626 502	2 085 922 100
9.	Bangka Belitung	567 283 797	801 348 925	740 305 877	977 894 381
10.	Kepulauan Riau	1 208 337 100	1 520 685 847	2 098 638 305	2 072 662 507
11.	DKI Jakarta	19 885 592 605	25 152 900 311	25 167 779 696	38 889 193 814
12.	Jawa Barat	3 274 067 487	3 672 632 315	3 839 172 071	5 126 796 909
13.	Jawa Tengah	2 906 831 268	3 511 079 685	4 439 160 853	5 672 337 400
14.	D I Yogyakarta	814 711 584	1 069 181 078	1 420 910 964	1 899 510 955
15.	Jawa Timur	5 677 971 455	6 048 844 119	6 306 212 284	8 315 377 507
16.	Banten	2 017 087 962	1 979 069 495	2 178 547 864	4 020 152 001
17.	B a l i	1 132 059 614	1 260 913 651	1 340 543 869	1 526 181 126
18.	Nusa Tenggara Barat	844 713 401	897 421 047	1 055 265 236	1 332 881 967
19.	Nusa Tenggara Timur	724 991 767	791 017 156	958 813 561	1 235 775 575
20.	Kalimantan Barat	1 240 157 756	1 532 360 118	1 588 506 036	1 818 294 885
21.	Kalimantan Tengah	1 122 281 366	1 566 774 812	1 750 774 460	1 913 876 280
22.	Kalimantan Selatan	1 719 293 695	2 693 290 021	2 675 591 544	2 656 403 645
23.	Kalimantan Timur	5 231 046 557	6 676 810 264	4 859 951 094	3 929 340 485
24.	Kalimantan Utara	0	0	501 133 396	1 560 727 261
25.	Sulawesi Utara	910 885 053	1 103 819 186	1 088 467 705	1 179 645 512
26.	Sulawesi Tengah	1 051 905 688	1 202 329 811	1 278 327 985	1 306 303 270
27.	Sulawesi Selatan	1 468 214 388	1 730 806 859	2 153 546 288	2 053 127 195
28.	Sulawesi Tenggara	551 561 176	752 613 024	974 527 586	985 772 804
29.	Gorontalo	419 921 214	544 773 920	646 364 708	807 187 377
30.	Sulawesi Barat	539 598 513	605 373 178	719 815 524	870 583 205
31.	M a l u k u	616 858 597	637 219 990	895 264 571	1 309 162 599
32.	Maluku Utara	808 787 045	795 692 214	920 652 250	1 114 532 978
33.	Papua Barat	1 843 567 358	1 934 518 145	2 552 145 929	2 950 450 681
34.	P a p u a	3 003 829 503	3 090 757 039	3 884 225 042	6 113 111 816
JUMLAH/TOTAL		77 977 219 171	94 000 696 054	95 577 183 625	127 751 519 189

*) Data APBD

**REALISASI BELANJA PEGAWAI LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2012-2015**
TABEL 5.B.1 *ACTUAL DIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015*

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	303 248 909	487 041 503	364 456 742	475 737 917
2.	Sumatera Utara	160 000 784	167 575 793	144 540 209	188 229 202
3.	Sumatera Barat	117 389 700	117 827 070	116 677 136	95 899 798
4.	R i a u	247 361 895	319 820 084	188 187 847	272 812 027
5.	J a m b i	84 157 929	98 333 655	90 004 993	110 038 812
6.	Sumatera Selatan	28 994 537	58 351 300	23 441 741	9 023 654
7.	Bengkulu	72 673 925	90 923 857	96 977 553	119 179 076
8.	Lampung	135 197 636	100 476 762	109 214 896	117 594 815
9.	Bangka Belitung	49 903 758	79 233 302	70 712 734	91 216 605
10.	Kepulauan Riau	165 484 844	189 822 416	183 736 097	187 320 116
11.	DKI Jakarta	1 397 773 926	1 815 488 704	2 132 264 555	1 786 029 167
12.	Jawa Barat	404 836 267	426 605 110	304 590 204	237 420 694
13.	Jawa Tengah	318 033 645	373 147 586	470 795 604	349 994 085
14.	D I Yogyakarta	116 229 478	143 754 843	111 425 291	137 325 260
15.	Jawa Timur	1 019 269 017	1 070 076 913	656 587 346	779 474 112
16.	Banten	148 070 031	181 862 098	144 776 980	172 547 997
17.	B a l i	39 820 073	41 906 917	62 150 385	91 026 978
18.	Nusa Tenggara Barat	73 718 885	81 597 916	89 028 411	102 806 232
19.	Nusa Tenggara Timur	87 761 374	105 220 376	77 667 705	92 573 079
20.	Kalimantan Barat	97 802 602	143 022 608	151 348 580	143 039 256
21.	Kalimantan Tengah	65 931 229	67 960 906	71 273 654	139 534 510
22.	Kalimantan Selatan	110 249 234	175 877 019	141 220 680	162 515 382
23.	Kalimantan Timur	493 003 243	568 035 669	494 060 058	360 779 592
24.	Kalimantan Utara	0	0	35 906 166	135 501 463
25.	Sulawesi Utara	56 662 658	70 928 416	35 073 022	31 491 726
26.	Sulawesi Tengah	114 424 678	140 508 898	148 177 160	122 059 924
27.	Sulawesi Selatan	157 196 580	186 117 682	168 276 411	174 040 480
28.	Sulawesi Tenggara	72 313 877	62 484 468	58 057 283	58 764 650
29.	Gorontalo	32 854 602	36 434 870	35 278 153	53 121 364
30.	Sulawesi Barat	75 318 392	34 830 232	0	0
31.	M a l u k u	75 586 968	64 172 558	30 606 186	7 358 325
32.	Maluku Utara	51 649 027	69 715 759	77 207 847	78 606 642
33.	Papua Barat	110 328 271	128 783 417	136 216 566	144 734 528
34.	P a p u a	153 855 088	175 893 795	196 401 072	214 619 552
JUMLAH/TOTAL		6 637 103 062	7 873 832 502	7 216 339 267	7 242 417 020

*) Data APBD

**REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2012-2015**
TABEL 5.B.2 *ACTUAL GOODS AND SERVICES EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015*

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	4 230 353 664	5 618 995 231	3 703 813 328	4 229 944 993
2.	Sumatera Utara	1 510 939 323	1 327 766 717	1 146 633 041	1 477 047 248
3.	Sumatera Barat	606 885 148	635 840 015	749 234 578	893 009 193
4.	R i a u	1 216 684 489	1 667 282 867	1 358 771 642	3 107 845 722
5.	J a m b i	523 196 634	702 495 631	813 453 043	833 886 726
6.	Sumatera Selatan	820 354 604	1 074 254 135	1 005 053 067	1 350 247 243
7.	Bengkulu	368 721 830	563 392 939	623 936 194	646 989 286
8.	Lampung	925 181 888	1 168 089 647	1 274 956 923	1 248 015 165
9.	Bangka Belitung	226 599 151	319 349 046	364 039 655	575 987 488
10.	Kepulauan Riau	780 511 969	937 953 666	1 196 907 727	1 236 229 374
11.	DKI Jakarta	9 703 452 919	12 641 399 413	12 624 396 751	16 659 139 837
12.	Jawa Barat	1 733 979 983	1 973 247 376	2 174 779 252	2 656 963 530
13.	Jawa Tengah	1 977 523 313	2 143 191 579	2 397 685 838	2 645 250 074
14.	D I Yogyakarta	482 062 124	556 030 441	867 039 199	1 063 344 946
15.	Jawa Timur	3 601 337 254	3 803 016 160	4 442 168 317	4 969 939 249
16.	Banten	951 318 823	983 932 220	1 342 286 491	1 991 960 898
17.	B a l i	748 605 554	764 537 190	907 808 176	900 637 010
18.	Nusa Tenggara Barat	366 001 340	365 543 941	543 439 395	619 694 812
19.	Nusa Tenggara Timur	392 479 928	460 616 404	473 545 067	581 066 051
20.	Kalimantan Barat	787 874 946	898 826 047	946 938 051	1 148 871 738
21.	Kalimantan Tengah	420 535 875	558 211 280	864 992 982	792 941 658
22.	Kalimantan Selatan	753 427 953	1 177 554 354	1 267 486 876	1 298 558 736
23.	Kalimantan Timur	2 221 477 609	2 457 642 779	2 154 573 721	1 824 495 618
24.	Kalimantan Utara	0	0	240 588 072	771 947 791
25.	Sulawesi Utara	503 625 677	645 754 385	546 671 365	496 724 605
26.	Sulawesi Tengah	612 618 687	706 301 866	853 319 017	851 971 173
27.	Sulawesi Selatan	933 865 895	1 054 475 228	1 309 032 668	1 220 477 832
28.	Sulawesi Tenggara	275 044 116	259 411 676	362 977 173	334 473 604
29.	Gorontalo	248 669 038	323 379 712	378 661 812	390 072 561
30.	Sulawesi Barat	328 893 109	387 091 610	452 797 262	427 173 458
31.	M a l u k u	359 287 327	379 456 442	495 328 479	756 752 943
32.	Maluku Utara	338 549 685	336 245 301	415 479 700	538 865 985
33.	Papua Barat	879 370 336	972 065 646	1 224 141 281	1 295 240 417
34.	P a p u a	1 540 796 548	1 694 118 393	1 998 521 178	2 729 759 712
JUMLAH/TOTAL		41 370 226 739	49 557 469 337	51 521 457 321	62 565 526 676

*) Data APBD

REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.B.3 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 5.B.3 ACTUAL CAPITAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	815 338 778	1 650 120 551	2 397 502 366	2 278 118 011	
2. Sumatera Utara	803 607 598	760 722 417	1 145 972 228	1 394 811 266	
3. Sumatera Barat	645 613 542	691 489 599	785 887 924	704 694 735	
4. Riau	1 961 665 412	2 245 307 028	623 644 302	2 901 124 903	
5. Jambi	678 746 776	937 986 070	818 059 264	797 578 141	
6. Sumatera Selatan	1 017 132 902	862 903 668	731 611 689	1 676 693 033	
7. Bengkulu	290 264 659	277 377 980	305 053 538	465 401 968	
8. Lampung	831 950 660	804 089 325	925 454 683	720 312 120	
9. Bangka Belitung	290 780 888	402 766 577	305 553 488	310 690 288	
10. Kepulauan Riau	262 340 287	392 909 765	717 994 481	649 113 017	
11. DKI Jakarta	8 784 365 760	10 696 012 194	10 411 118 390	20 444 024 810	
12. Jawa Barat	1 135 251 237	1 272 779 829	1 359 802 615	2 232 412 685	
13. Jawa Tengah	611 274 310	994 740 520	1 570 679 411	2 677 093 241	
14. DI Yogyakarta	216 419 982	369 395 794	442 446 474	698 840 749	
15. Jawa Timur	1 057 365 184	1 175 751 046	1 207 456 621	2 565 964 146	
16. Banten	917 699 108	813 275 177	691 484 393	1 855 643 106	
17. Bali	343 633 987	454 469 544	370 585 308	534 517 138	
18. Nusa Tenggara Barat	404 993 176	450 279 190	422 797 430	610 380 923	
19. Nusa Tenggara Timur	244 750 465	225 180 376	407 600 789	562 136 445	
20. Kalimantan Barat	354 480 208	490 511 463	490 219 405	526 383 891	
21. Kalimantan Tengah	635 814 262	940 602 626	814 507 824	981 400 112	
22. Kalimantan Selatan	855 616 508	1 339 858 648	1 266 883 988	1 195 329 527	
23. Kalimantan Timur	2 516 565 705	3 651 131 816	2 211 317 315	1 744 065 275	
24. Kalimantan Utara	0	0	224 639 158	653 278 007	
25. Sulawesi Utara	350 596 718	387 136 385	506 723 318	651 429 181	
26. Sulawesi Tengah	324 862 323	355 519 047	276 831 808	332 272 173	
27. Sulawesi Selatan	377 151 913	490 213 949	676 237 209	658 608 883	
28. Sulawesi Tenggara	204 203 183	430 716 880	553 493 130	592 534 550	
29. Gorontalo	138 397 574	184 959 338	232 424 743	363 993 452	
30. Sulawesi Barat	135 387 012	183 451 336	267 018 262	443 409 747	
31. Maluku	181 984 302	193 590 990	369 329 906	545 051 331	
32. Maluku Utara	418 588 333	389 731 154	427 964 703	497 060 351	
33. Papua Barat	853 868 751	833 669 082	1 191 788 082	1 510 475 736	
34. Papua	1 309 177 867	1 220 744 851	1 689 302 792	3 168 732 552	
JUMLAH/TOTAL	29 969 889 370	36 569 394 215	36 839 387 037	57 943 575 493	

*) Data APBD

TABEL 5.C REALISASI BELANJA PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
 (ribu rupiah), 2012-2015
TABLE 5.C ACTUAL FINANCING EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
 INDONESIA (thousand rupiahs), 2012-2015

No.	Provinsi/Province	2012	2013	2014	2015 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	1 931 663 713	1 420 098 087	959 801 070	153 804 841	
2. Sumatera Utara	289 070 937	151 626 064	14 897 905	0	
3. Sumatera Barat	321 541 207	311 276 961	392 442 367	121 036 304	
4. Riau	2 083 231 162	1 447 676 414	3 981 422 303	0	
5. Jambi	755 497 052	566 330 980	474 526 425	0	
6. Sumatera Selatan	640 137 144	310 770 643	476 814 225	693 994 012	
7. Bengkulu	241 412 061	210 719 600	261 693 705	16 550 336	
8. Lampung	24 957 424	41 126 275	113 486 180	500 000	
9. Bangka Belitung	295 022 224	204 466 081	325 473 641	0	
10. Kepulauan Riau	514 323 993	642 174 655	145 250 971	15 000 000	
11. DKI Jakarta	10 296 025 165	10 679 763 146	13 618 631 039	5 636 317 000	
12. Jawa Barat	2 958 837 956	3 775 496 831	5 099 436 397	560 727 063	
13. Jawa Tengah	955 371 554	1 924 599 491	1 760 833 255	210 000 000	
14. DI Yogyakarta	411 516 942	476 614 048	548 330 738	10 000 000	
15. Jawa Timur	1 590 972 260	2 387 620 461	2 612 951 724	335 733 333	
16. Banten	470 814 203	1 385 904 864	1 946 082 208	22 000 000	
17. Bali	857 712 229	1 139 839 942	1 125 742 772	200 000 000	
18. Nusa Tenggara Barat	71 348 512	28 134 779	189 155 598	58 000 000	
19. Nusa Tenggara Timur	265 897 258	257 704 279	329 644 828	54 700 000	
20. Kalimantan Barat	272 258 327	187 965 679	194 600 710	70 000 000	
21. Kalimantan Tengah	614 289 889	439 704 834	280 614 254	55 000 000	
22. Kalimantan Selatan	1 311 295 560	804 661 308	738 732 079	31 000 000	
23. Kalimantan Timur	3 366 996 662	1 050 356 121	1 061 628 546	0	
24. Kalimantan Utara	0	0	1 184 448 975	0	
25. Sulawesi Utara	252 904 042	289 406 246	340 708 660	25 000 000	
26. Sulawesi Tengah	158 588 100	135 496 072	142 474 915	6 830 000	
27. Sulawesi Selatan	42 653 396	93 178 272	242 455 881	136 000 000	
28. Sulawesi Tenggara	120 679 286	363 294 946	431 964 051	91 649 148	
29. Gorontalo	112 117 553	102 841 865	97 002 816	10 000 000	
30. Sulawesi Barat	109 896 935	131 168 699	142 074 163	2 000 000	
31. Maluku	158 762 191	118 453 994	186 416 361	7 735 885	
32. Maluku Utara	136 787 480	53 531 135	51 153 914	119 955 591	
33. Papua Barat	372 575 438	1 497 841 857	1 667 907 507	80 019 122	
34. Papua	1 001 969 303	958 202 863	1 239 234 968	25 000 000	
JUMLAH/TOTAL	33 007 127 158	33 588 047 492	42 378 035 151	8 748 552 635	

*) Data APBD

STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI 2012-2015

Anggota Tim Penyusun:

Koordinator : Sentot Bangun Widoyono, M.A.

Editor : Mila Hertinmalyana, M.Comm.
Agus Nuwibowo, S.Si., M.M.

Penulis : Izzun Nafiah, SST

Pengolah Data : Desy Apresziyanti, SST

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

